



# FESTIVAL FILM INDONESIA



DEPARTEMEN PENERANGAN RI - 1983



# FESTIVAL FILM INDONESIA

Festival Film Indonesia telah menjadi forum utama penyelenggara film Indonesia untuk ketiga kalinya yang berlangsung selama 14 Agustus 1982.

Salah seorang juri yang berjumlah sekitar 62 buah telah dipilih melalui undian Dewan Juri, tanggal 17 Agustus 1982 yang diumumkan dalam Festival Film Indonesia tahun 1982.

Dari 20 buah film unggulan itu, akhirnya Film "KEMERDEKAAN PIALA CITRA" karya Anisa C. Noer, Produser FFI, sebagai pemenang PIALA CITRA, sebagai Film Terbaik.

Sebelumnya, di Pekan Asia yang sudah menjadi tradisi dalam penyelenggaraan Festival Film, di mana penyelenggara yang telah produktif dengan beberapa karya terbaik di beberapa bidang di Indonesia, seperti karya dan Pekan Apresiasi dan

dan diadakan di penyelenggaraan dalam bentuk di mana penyelenggara dengan industri dan pelita film. Dan telah mendapat dengan perlakuan nasional dan karya C. Noer, Spemanika, Terpuh Karya dan karya terbaik, sebagai Prodiator, tanggal dengan forum dan pameran.

Sebagai pemenang, FFI 1982 telah menunjukkan kesan yang sangat baik, karena penyelenggaraan Festival Film Indonesia di Indonesia, yang akan datang sudah perlu

diperhatikan sebagai forum untuk menguji sejauh mana perkembangan perfilman kita setiap tahunnya.

Dengan demikian, hubungan masyarakat film dengan masyarakat umum akan tetap akrab. Dan yang lebih penting adalah, masyarakat sebagai partisipan akan berfungsi sebagai pendukung dan peminat dalam perkembangan perfilman di tanah air kita.

Demikian pula halnya dengan penyelenggaraan Sidang MMPI yang tentunya mengawali acara Festival Film, yang telah sebagai dan menjadi sarana komunikasi untuk mempromosikan berbagai informasi yang mungkin sudah terlewat dalam dunia film kita.

Sebelum hari-hari-hari Sidang MMPI itu, kita menaruh perhatian khusus agar yang akan terwujud dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan mutu perfilman di tanah yang dan datang.

Untuk informasi dan memahami hal-hal yang terjadi selama FFI berlangsung, dimulailah pada Sidang MMPI 1982, Direktorat Publikasi, Dinas Peminatan Film dan Grafika Departemen Penerangan mempublikasikan hasil ilham dari penyelenggaraan FFI tahun 1982.

Semoga publikasi ini akan bermanfaat bagi kita bersama.

Tetrahastuti.

DEPARTEMEN PENERANGAN RI - 1983



## KATA PENGANTAR

JAKARTA— telah menjadi tuan rumah penyelenggaraan Festival Film Indonesia untuk ketiga kalinya yang berlangsung dari 9 hingga 14 Agustus 1982.

Film-film peserta festival yang berjumlah sekitar 62 buah film, setelah melalui seleksi oleh Dewan Juri, terpilih 17 buah film unggulan yang diikutsertakan dalam Festival Film Indonesia tahun 1982.

Dari 17 buah film unggulan itu, akhirnya Film "SERANGAN FAJAR", karya Arifin C. Noer, Produksi PPFN, berhasil meraih PIALA CITRA, sebagai film terbaik 1982.

Sementara itu Pawai Artis yang sudah menjadi ciri khas dalam setiap penyelenggaraan Festival Film, dialihkan kegiatannya yang lebih produktif dengan pemutaran film-film nasional di beberapa bioskop di lima wilayah DKI Jakarta Raya dan Pekan Apresiasi bagi Generasi Muda.

Pekan apresiasi ini diselenggarakan dalam bentuk diskusi terbuka dengan kalangan mahasiswa dan pelajar Ibukota. Tiga tokoh penting dalam perfilman nasional yakni : Arifin C. Noer, Syumanjaya, Teguh Karya dan Hendrik Gozali, seorang Produser, tampil dalam forum diskusi tersebut.

Secara umum, FFI 1982 telah meninggalkan kesan positif bagi kita, karena penyelenggaraan Festival Film semacam ini di masa-masa yang akan datang masih perlu

dilanjutkan sebagai sarana untuk mengkaji sejauh mana perkembangan perfilman kita setiap tahunnya.

Dengan demikian, hubungan masyarakat film dengan masyarakat umum akan tetap akrab. Dan yang lebih penting adalah, masyarakat sebagai partisipan akan berfungsi sebagai pendukung dan pengamat dalam perkembangan perfilman di tanah air kita.

Demikian pula halnya dengan penyelenggaraan Sidang MMPI yang biasanya mengawali acara Festival Film, masih tetap relevan dan menjadi sarana demokratis untuk memecahkan berbagai hambatan yang mungkin masih terjadi dalam dunia film kita.

Sebab, dari hasil-hasil Sidang MMPI itu, kita menemukan pikiran-pikiran segar yang amat bermanfaat dalam upaya mengembangkan dan meningkatkan mutu perfilman di masa yang akan datang.

Untuk meresapi dan memahami hal-hal yang terjadi selama FFI berlangsung, demikian pula Sidang MMPI 1982, Direktorat Publikasi, Ditjen Pembinaan Pers dan Grafika Departemen Penerangan menerbitkan hasil liputan dari penyelenggaraan FFI tahun 1982.

Semoga publikasi ini akan bermanfaat bagi kita bersama.

Terimakasih.

REDAKSI.

# KATA PENGANTAR

diwujudkan sebagai sarana untuk mencapai suatu tujuan yang  
perkembangan pertunjukan kita setiap tahunnya.  
Dengan demikian, hubungan masyarakat film dengan  
masyarakat umum akan tetap erat. Dan yang lebih  
penting adalah, masyarakat sebagai partisipan akan  
bertugas sebagai pendukung dan pengamat dalam per-  
kembangan pertunjukan di tanah air kita.

Demikian pula halnya dengan perkembangan  
Sidang MMPI yang biasanya diselenggarakan dalam Festival  
Film, maka setiap tahun akan menjadi suatu demokratis  
untuk memberikan berbagai bantuan yang mungkin  
untuk terjadi dalam dunia film kita.  
Sebab, dari hasil-hasil Sidang MMPI itu, kita menemukan  
dibidang-bidang yang sangat bermanfaat dalam upaya  
mempertahankan dan meningkatkan mutu pertunjukan di  
masa yang akan datang.

Untuk mencapai dan memahami hal-hal yang terdapat  
dalam FFI diharapkan demikian pula Sidang MMPI  
1982 Direktorat Publikasi, Diken Persewaan Per dan  
Grafis Departemen Penerangan memberikan hasil li-  
buan dan penyelenggaraan FFI tahun 1982.

Sebagai publikasi ini akan bermanfaat bagi kita  
bersama.

Tetrahastika

REDAKSI

JAKARTA - tahun ini akan diadakan Festival Film Indonesia  
ke-17 pada film tunggal dan festival bergelut  
yang diselenggarakan pada tanggal 14 Agustus 1982.  
Festival bergelut yang diselenggarakan selama 83 buah  
film, setelah diadakan selama 101 tahun (1911-1981)  
pada film tunggal yang diselenggarakan dalam Festival  
Film Indonesia tahun 1982.

Untuk 17 buah film tunggal dan festival Film  
"SEKANGGAH BAKAR" karya Arifin C. Nour, Produk  
PFR, dan festival FILM CITA, sebagai film  
tahun 1982.

Sebelumnya, Festival Film Indonesia menyelenggarakan  
film dalam rangka penyelenggaraan Festival Film di  
bidang internasional yang akan diadakan dengan ge-  
mukannya Festival Film Indonesia di berbagai tingkat di lima  
wilayah DKI Jakarta, Jawa dan Pulau Kalimantan bagi  
Gubernur masing-masing.

Festival bergelut dan penyelenggaraan dalam bentuk di-  
antaranya adalah dengan tujuan memajukan dan pelepas  
budaya film lokal bergelut dalam pertunjukan nasional  
tahun: Arifin C. Nour, Sekanggaah, Teguh Karya dan  
Hendrik Gonsky sebagai produsen, tampil dalam forum  
di bawah bimbingan.

Sebelumnya, FFI 1982 telah diselenggarakan dalam  
posisi film dan festival penyelenggaraan Festival Film  
sebelumnya ini di Indonesia yang akan datang masih pada

## DAFTAR ISI

	HAL.
I. PENDAHULUAN .....	9
II. FFI 1982 DALAM BERBAGAI KEGIATAN .....	11
III. HASIL-HASIL FFI 1982 .....	30
IV. PERLUNYA PERSIDANGAN MMPI TIAP TAHUN .....	46
V. PANDANGAN PARA PEJABAT TENTANG PERFILMAN NASIONAL .....	75
1. LIMA TAHUN BERSAMA MASYARAKAT FILM .....	75
OLEH: ALI MOERTOPO	
2. FILM DAN PEMBANGUNAN BANGSA .....	84
OLEH: AMIRMACHMUD	
3. KONSEP KEPEMUDAAN DAN PERFILMAN .....	87
OLEH: ABDUL GAFUR	
VI. KEPUTUSAN PERSIDANGAN MMPI TAHUN 1982 .....	90





## NILAI FILM INDONESIA JAUH LEBIH MAJU

Wakil Presiden, Adam Malik, pada malam pembukaan FFI 1982 tanggal 9 Agustus 1982, di Senayan berkenan memberi kata sambutan dan sekaligus membuka secara resmi penyelenggaraan Festival Film Indonesia tahun 1982. Dikatakan, bahwa FFI '82 sebagai suatu "pesta film nasional" yang kesepuluh sejak dimulainya kembali kegiatan Festival Film Indonesia merupakan salah satu pertanda keberhasilan pembangunan dalam masa pemerintahan Orde Baru. Pembangunan tidak hanya terbatas fisik semata-mata, tetapi juga dalam bidang sosial budaya sesuai dengan tujuan pembangunan nasional untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya yang sejahtera lahir dan bathin.

Adam Malik yang juga dikenal penggemar film-film silat menilai: "selama ini secara umum film Indonesia sudah jauh berkembang dibanding masa-masa sebelumnya. Nilainya jauh lebih maju dari sekedar alat hiburan semata, karena daya pengaruhnya terhadap khalayak telah sedemikian memasyarakat sehingga sulit bagi kita untuk dapat membayangkan kegiatan kehidupan masyarakat sehari-hari tanpa kehadiran film".

Hampir duapuluh lima tahun yang lalu, atau tepatnya pada tahun 1960 melalui salah satu Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, kita telah

sepakat untuk membina dan mengembangkan perfilman nasional, agar film Indonesia benar-benar dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk menunjang pembangunan nasional, khususnya di bidang sosial budaya, kata Adam Malik lebih lanjut.

Amanat yang dikandung oleh TAP MPRS tersebut secara bertahap telah mulai dilaksanakan oleh Pemerintah, dalam hal ini Departemen Penerangan, bersama seluruh insan dan organisasi profesi perfilman nasional mulai tahun 1967.

Hal ini kiranya dapat kita lihat dari kenyataan-kenyataan bahwa pada akhir-akhir ini cita-cita untuk "menjadikan film Indonesia sebagai tuan di negeri sendiri" tampaknya telah mulai menjadi kenyataan. Selain itu adanya sebutan "film nasional" untuk film-film produksi dalam negeri telah umum kita dengar.

Hal ini mencerminkan keberhasilan yang telah diperoleh akibat berbagai kebijaksanaan di bidang pembinaan dan pengembangan perfilman nasional, yang telah dapat memupuk dan menumbuhkan "rasa memiliki" di kalangan masyarakat.

Dengan perkataan lain, sedikit banyaknya fungsi film Indonesia sebagai "alat pendidikan dan penerangan" untuk masyarakat telah diterima dengan baik.

Yang cukup menggembirakan pula kata Adam Malik, adalah adanya peningkatan usaha-usaha perluasan pemasaran film nasional di luar negeri. Hal ini sejalan dengan kebijaksanaan Pemerintah untuk lebih menggalakkan usaha-usaha ekspor non-migas. Dengan demikian dapat diharapkan bahwa dalam waktu dekat ini kegiatan ekspor film Indonesia akan dapat menjadi salah satu sumber devisa bagi negara kita.

Film sebagai salah satu anak kandung teknologi modern dan salah satu alat komunikasi massa yang ampuh, dalam dasawarsa delapanpuluhan ini akan mempunyai nilai-nilai yang berbeda dari masa-masa sebelumnya. Sekarang ini, film sekurang-kurangnya akan mempunyai empat aspek nilai, yaitu sebagai komoditi komersial atau lebih tepat kita sebutkan komoditi jasa-kreatif, sebagai sarana diplomatik, sebagai sarana kultural dan sebagai sarana teknologi. Oleh karena itu sudah sepatutnyalah bila kita semua, khususnya insan film Indonesia, segera menyesuaikan diri dengan perkembangan nilai tersebut tanpa meninggalkan ciri-ciri kepri-

badian nasional.

Usaha penyesuaian diri tersebut hendaknya dimulai secara mendasar, yaitu dengan mengembangkan fungsi film Indonesia yang semula kita sepakati hanya sebagai barang dagangan serta alat pendidikan dan penerangan saja, tetapi lebih luas lagi yakni untuk menjadikan perfilman nasional sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Oleh karena itu pembinaan serta pengembangannya harus disesuaikan dengan arah, strategi dan tujuan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan Film Indonesia yang kultural-edukatif, sehingga dapat memenuhi fungsinya sebagai alat hiburan, penerangan dan pendidikan dalam rangka pembangunan nasional.

Mengakhiri sambutannya, Wakil Presiden berkeyakinan bahwa hanya dengan usaha penyesuaian diri itulah, film Indonesia akan lebih dapat memantapkan diri sebagai "tuan di negeri sendiri" dan sekaligus mampu "menempatkan diri secara meyakinkan dalam petabumi Sinema Dunia atau Perfilman Internasional".

## PENDAHULUAN

Dalam FFI 1982 di Jakarta Menteri Penerangan Ali Moertopo tidak memberi kata sambutan dalam acara pembukaan, baik dalam rangka Festival maupun Sidang MMPI. FFI 1982 dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Adam Malik.

Pembukaan Sidang MMPI dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Amirmachmud. Pak Ali baru berbicara pada acara penutupan, baik dalam penutupan FFI di Balai Sidang Senayan maupun penutupan Sidang MMPI di Gedung Dewan Pers, Kebon Sirih.

Dalam penutupan Sidang MMPI, beliau mengutarakan segala kesan-kesannya selama lima tahun ini bergaul dengan masyarakat film Indonesia yang dinilainya terlalu sulit didekati pada mulanya, tetapi dengan cara pendekatan persuasif akhirnya segalanya berjalan dengan lancar. Pidato beliau tersebut juga bisa disebut sebagai suatu evaluasi tentang hubungan beliau selaku Menteri Penerangan dengan masyarakat film Indonesia selama beliau memimpin Departemen Penerangan, khususnya bertolak dari penyelenggaraan FFI setiap tahun.

Dengan FFI 1982 Jakarta mendapatkan kesempatan sebagai tuan rumah yang ketiga kalinya. Berbeda dengan kebiasaan FFI di daerah, di Jakarta tidak diselenggarakan pawai artis, tidak ada gaba-gaba atau spanduk-spanduk menghiasi jalan-jalan kota Jakarta. Sekilas pintas tampaknya sepi-sepi saja, tetapi kegiatan

dan acaranya tetap padat. Menurut Badan Pelaksananya, FFI 1982 yang dilaksanakan mulai 9 Agustus sampai 14 Agustus 1982, menghindarkan diri dari hal-hal yang bersifat glamour, sebab bagi masyarakat Jakarta pada dasarnya lebih menyukai materi acara yang mengandung segi-segi yang positif untuk mengembangkan perfilman nasional. Oleh karena itu Panitia lebih menekankan acara-acara yang lebih mengarah pada hal-hal yang bersifat memperdalam rasa mencintai film Indonesia.

Pokoknya FFI 1982 dilaksanakan secara sederhana. Tetapi banyak kalangan sangat menyayangkan tidak terpenuhinya komitmen masyarakat film seperti tercetus pada FFI 1981 di Surabaya, yang menghendaki penyelenggaraan FFI 1982 tidak boleh kurang dari FFI 1981 di Surabaya, minimal sama. Pada hal itu sudah tekad dari Surabaya. Bahkan waktu itu dijadikan sebagai salah satu syarat bagi daerah yang mau terpilih sebagai penyelenggara FFI.

Namun agaknya hal ini tidak perlu diperdebatkan. Yang penting kali ini juga seperti festival-festival sebelumnya, bahwa dalam setiap kali menyelenggarakan festival kita mendapat kesempatan untuk melakukan evaluasi atas perjalanan dunia perfilman nasional. Dan kesan kita kali ini dari beberapa film yang diunggulkan dan yang memperoleh Piala Citra ternyata membuktikan bahwa film-film Indonesia sudah mulai sampai pada

penggalan unsur-unsur perfilman yang semakin spesifik dan tidak sekedar menyuguhkan selera-selera rendah saja. Sudah mulai tampak adanya keberanian dalam menampilkan hal-hal yang bersifat kreatif. Artinya, sudah mulai mendekat ke pembuatan film yang berorientasi kreatifitas ketimbang orientasi komersial yang galak seperti pengalaman-pengalaman di masa sebelumnya. Film pemenang Citra, **"SERANGAN FAJAR"** membuktikan hal itu. Sebuah film bertema perjuangan dalam masa revolusi di Yogyakarta dengan penyuguhan yang lain dari biasa (bahkan juga menurut ukuran Internasional) yang hampir-hampir mendekati selera film perang **"APOCALYPSE NOW"**. Begitu juga kalau kita melihat **"Sang Guru"**, **"Tangan-Tangan Mungil"**, **"Bercanda Dalam Duka"**, **"Gadis Marathon"**, dan lain-lain.

Memang masih banyak film-film yang belum juga beranjak dari selera-selera yang kurang edukatif, meskipun maksudnya mau berorientasi kultural seperti misalnya thema-thema horror dan film-film action yang terlalu bernafsu. Hal ini dapat menimbulkan kesan seakan-akan kita ingin menciptakan dua kutub warna perfilman kita. Yang satu sudah berorientasi kreatif dan yang lain masih ingin bersifat semata-mata komersial.

Kenyataan ini memang sudah menjadi sebuah catatan

panjang dalam perkembangan perfilman kita selama ini.

Dari hasil evaluasi setiap kali FFI dilaksanakan, kita memang banyak memperoleh catatan-catatan yang berguna untuk lebih mendewasakan diri. Dalam hubungan inilah rasanya FFI memang masih tetap kita perlukan, betapapun mahal biaya yang harus dikeluarkan dan betapapun kesan glamour masih sulit untuk ditinggalkan. Yang jelas, setiap kali FFI usai, kita akan mengetahui sejauh manakah dunia perfilman kita sudah berjalan. Yang lebih penting dari itu adalah bahwa semangat nasional dalam perfilman kita terus dapat dipupuk, sehingga tidak terlalu jauh tergelincir pada hal-hal yang tidak positif. Juga melalui FFI kita terus memupuk semangat masyarakat Indonesia untuk mencintai film-film nasional, sehingga komunikasi antara masyarakat film dengan penontonnya tetap terjaga. Dengan kata lain, FFI mencegah timbulnya sikap masa bodoh masyarakat terhadap film Indonesia. Dan itu sudah segalanya!

Sebenarnya ada hal yang mengganjal di hati kita, sebab bila pada FFI 1981 di Surabaya suasana diliputi keprihatinan korban bencana alam Lumajang, maka FFI 1982 kita masih diliputi rasa keprihatinan akibat letusan Gunung Galunggung. Berdasarkan kenyataan itu, penyelenggaraan FFI 1982 yang sederhana kiranya dapat dimengerti.

## FFI 1982

# DALAM BERBAGAI KEGIATAN

**A**da sebuah acara yang absen dalam penyelenggaraan FFI 1982. Acara tersebut adalah "Parade Artis" yang biasanya diarak keliling kota tempat diselenggarakannya FFI. Rupanya kali ini yang dipentingkan bukan artisnya, tetapi filmnya.

Seperti juga di FFI 1981 Surabaya, FFI 1982 di Jakarta mengadakan acara hiburan berupa pemutaran film-film Indonesia di setiap bioskop di wilayah DKI.

Namun berbeda dengan film-film umum yang biasa diputar di pelosok-pelosok wilayah DKI, yang setiap malam dibanjiri oleh masyarakat, maka film-film unggulan FFI yang diputar di bioskop-bioskop kelas satu itu agak sepi dari penonton. Ada dugaan, hal ini disebabkan hampir semua acara pemutaran film FFI diselenggarakan siang hari dan hanya beberapa saja yang diputar malam hari.

Acara pembukaan FFI 1982 berlangsung di Balai Sidang Senayan tanggal 9 Agustus 1982. Dalam kesempatan ini Wakil Presiden Adam Malik memberi kata sambutan dan secara resmi membuka FFI 1982. Keesokan harinya, Dirjen RTF Sumadi membuka pameran perfilman, juga di Balai Sidang Senayan. Dalam pameran ini diperlihatkan berbagai kegiatan film nasional sejak jaman sebelum perang sampai yang mutakhir. Juga didemonstrasikan cara-cara pembuatan (proses) film.

Dalam FFI 1982 juga diundang tokoh-tokoh perfilman internasional dan bintang-bintang film Hollywood hadir memeriahkan penyelenggaraan Festival. Di Golden Ballroom Hotel Hilton diselenggarakan malam ramah tamah bintang-bintang Hollywood tersebut dengan masyarakat perfilman nasional. Acara yang berlangsung akrab dan meriah ini disebut sebagai **Hollywood Night**. Bintang Hollywood yang hadir malam itu diantaranya Richard Anderson, Jim Brown, Peter Graves, Trini Lopez, Barbara Mc Nair, Yudi Norton Tylor, Ad Ames dan Cliff Robertson. "Hollywood Night" juga dihadiri oleh Adam Malik, Tjokropranolo dan Surono. Juga tampak Hartini Soekarno, Ratna Saridewi dan Kartika Soekarno. Ketua Pelaksana adalah Ny. Norman Sasono dan yang memberi kata sambutan adalah Dirjen RTF Sumadi. Dalam kesempatan ini terkumpul dana korban Galunggung sebanyak Rp. 77 juta.

Setelah "Hollywood Night", rombongan artis itu keesokan harinya berangkat ke Bali untuk berwisata.

Seperti biasa di samping kegiatan-kegiatan yang bersifat hiburan, juga dalam rangka FFI 1982 Majelis Musyawarah Perfilman Indonesia (MMPI) menyelenggarakan sidang setelah mendengarkan laporan pertanggungjawaban Sekjen MMPI. Sidang-sidang tersebut berlangsung seru dan menegangkan. Dalam sidang ini

dibicarakan masalah-masalah perfilman secara menyeluruh mulai dari segi kebijaksanaan secara umum, pemasaran, pengaruhnya dan masalah-masalah perfilman lainnya. Anggota-anggotanya datang dari seluruh pelosok tanah air mewakili berbagai unsur atau golongan dan kelompok sosial seperti Deppen, Pendidikan, Agama, Pemuda, Artis, Perbioskopian, Budayawan, Wartawan, KFT dan lain-lain. Hasil-hasil sidang MMPI 1982 juga kami sajikan dalam penerbitan ini terutama tentang konsep pembinaan perfilman sebagai usulan bagi materi penyusunan GBHN 1983 yang akan datang. Pembahasan konsep usulan bagi bahan GBHN ini yang disusun oleh Dewan Film Nasional merupakan topik utama dalam sidang MMPI kali ini.

Sidang MMPI dibuka secara resmi oleh Menteri Amir Machmud dan ditutup oleh Menteri Penerangan Ali Moertopo. Pada kesempatan ini juga telah diadakan tukar menukar kenang-kenangan antara Menteri Penerangan dengan berbagai utusan daerah. Selesai acara penutupan diadakan acara kesenian di Taman Mini Indonesia Indah, yang juga dihadiri oleh tamu-tamu asing, serta beberapa pejabat antara lain Dirjen Kebudayaan, Haryati Soebadio.

MMPI juga mengadakan pengumpulan dana bagi korban bencana Galunggung yang dipelopori oleh Nani Widjaya dari PARFI. Dana yang terkumpul berjumlah Rp. 600.000,-

### **Pekan Apresiasi Film Indonesia**

Bekerjasama dengan Kanwil P & K DKI dan Pengurus OSIS DKI Jaya, Badan Pelaksana FFI juga mengadakan Pekan Apresiasi Film Indonesia. Dalam kesempatan ini diundang sutradara-sutradara untuk berbicara mengenai film-film mereka yang sebelumnya telah dipertunjukkan. Acara ini berlangsung tidak kalah seru. Berbeda juga dengan kebiasaan sebelumnya, maka kali ini para pembicara tidak menyediakan semacam makalah untuk didiskusikan. Mereka langsung bicara setelah filmnya diputar dan baru menyusul acara diskusi. Acara ini ditujukan bagi generasi muda (mahasiswa dan pelajar yang dikenal sebagai konsumen film yang paling utama) untuk mendapatkan masukan. Acara diskusi berlangsung hangat namun akrab.

Ada baiknya sebelum memulai acara diskusi, kita perkenalkan para panelis satu persatu.



## SYUMANJAYA

Jebolan Institut Sinematografi Moskow yang Cum Laude ini, sebelumnya pernah bekerja sebagai staf penulis cerita/skenario di Studio PERSARI pada tahun lima puluhan. Sekembalinya dari Moskow, Syumanjaya mendapatkan kepercayaan untuk mengelola perfilman Indonesia di Departemen Penerangan, sebagai Direktur Film. Tetapi rupanya Syuman tidak betah jadi pegawai negeri.

Film-film yang pernah digarapnya:

1. LEWAT TENGAH MALAM
2. FLAMBOYANT
3. SI DOEL ANAK BETAWI
4. PINANGAN
5. SI DOEL ANAK MODERN
6. ATHEIS
7. SI MAMAD
8. LAILA MAJENUN
9. YANG MUDA YANG BERCINTA
10. KABUT SUTRA UNGU
11. BUKAN SANDIWARA
12. KARTINI

## A T H E I S

### Ringkasan Cerita:

Kisah tiga orang pemuda yang sedang bergolak pada saat Jepang berhasil di bom atom oleh Amerika, menemui faham yang sedang berkembang disekitarnya dari barat. Semangat mereka untuk merdeka berhadapan dengan ragam ideologi mana yang pantas memberikan warna pada Republik Indonesia nanti.

Perbedaan-perbedaan pendapat diantara mereka merupakan jiwa dan tema sentral film ini. Antara yang Marxis, anarchis dan muslim. Hasan (Deddy Sutomo) dilanda keraguan antara tetap mempertahankan kemuslimannya dengan faham-faham barat yang mulai dikenalnya. Pada saat menjelang ajalnya, dia dibuai oleh ajakan-ajakan almarhum ayahnya untuk kembali ke jalan yang benar. \*\*\*



1977 : Badai Pasti Berlalu

1978 : November 1828

1980 : Usia 18

Kini Teguh sedang menyelesaikan pembuatan film **DI-BALIK KELAMBU**.

## USIA 18

### Ringkasan Cerita:

Dalam umur 18 tahun Edo harus berhadapan dengan kenyataan. Setelah bapaknya meninggal, dia berhenti kuliah karena mesti bekerja untuk menghidupi tiga orang adiknya dan seorang ibu. Dia bekerja di bengkel kereta api luar kota seperti pekerjaan bapaknya.

Keadaan ini menggelisahkan Ipah yang menjadi sahabatnya sejak masa kanak-kanak. Seluruh perhatiannya dia curahkan untuk membantu keluarga itu sehingga menimbulkan persoalan-persoalan yang sulit dimamah oleh orang tua mereka, kecuali dengan memengertikan bahwa anak-anak muda ini sedang belajar bertanggung jawab, mengasihi sesama, murni dalam bersahabat, bergotong royong dan belajar jujur dalam menghadapi kenyataan-kenyataan serta harapan-harapan. \*\*\*

## TEGUH KARYA

Teguh Karya lulusan Akademi Teater Nasional Indonesia. Terjun pertama ke-dunia film pada periode Usmar Ismail masih hidup dengan **Perfininya**. Sejak tahun 1971, Teguh menangani filmnya **sendiri**.

1971 : Wajah Seorang Laki-laki

1973 : Cinta Pertama

1974 : Ranjang Pengantin

1975 : Kawin Lari

1976 : Perkawinan Dalam Semusim



## ARIFIN C. NOER

Lulusan Fakultas Sos-Pol ini, sebelumnya aktif di dunia teater bersama Rendra, Deddy Sutomo dan kawan-kawan di Studi Group Drama Yogya. Kemudian sebagai motor Teater Muslim Yogyakarta. Setelah hijrah ke Jakarta Arifin mendirikan Teater Kecil. Pergaulannya dengan orang film, menyeret Arifin ke dunia film.

Film-film yang pernah digarapnya:

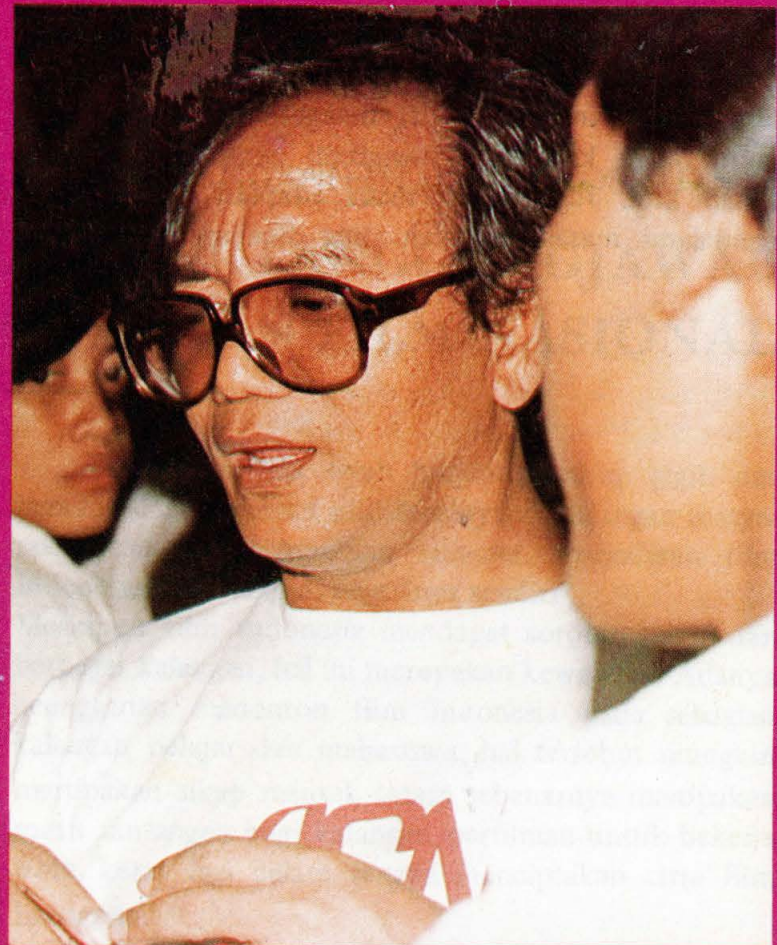
SUCI SANG PRIMADONA, HARMONIKAKU, PETUALANG-PETUALANG, YUYUN, SERANGAN FAJAR. Dan kini tengah menyelesaikan S.O.B. (SEJARAH ORDE BARU).

### SUCI SANG PRIMADONA

#### Ringkasan Cerita:

Cerita tentang seorang Sri Panggung dan anak muda yang sedang mencari identitas dirinya. Suci (Joice Erna) telah menjadi seorang Primadona yang mashur. Tidak heran kalau banyak orang mengelilinginya. Ada Kapten Kapal, ada pengusaha besar dan ada pula pengusaha garam. Ketiga-tiganya berebut untuk mendapatkan Suci. Sedang Si Anak-Muda, dalam mencoba melepaskan himpitan keributan orang tuanya dan pengapnya polusi Jakarta, bertemu dengan kedamaian yang diberikan oleh Suci. Anak Muda tadi kemudian jatuh cinta pada Suci yang umurnya lebih tua. Tetapi Suci bagaimanapun seorang Primadona, dia menyadari bahwa dia tidak bisa menurunkan pilihan, karena dia milik semua orang. \*\*\*

Masih dalam rangka Pekan Apresiasi, kepada generasi muda, pelajar dan mahasiswa juga diberi kesempatan untuk mengikuti lomba penulisan tentang perfilman Indonesia berupa kritik, resensi dan esei mengenai film-film Indonesia yang telah ditontonnya. Bagi para pemenang disediakan hadiah Mini Kamera 8 mm (Pe-



menang I), dan Fujika untuk masing-masing pemenang II dan III.

Adapun tujuan dari Pekan Apresiasi ini diarahkan untuk mengikutsertakan potensi generasi muda dalam film Indonesia, mengembangkan apresiasi, meningkatkan kecintaan menonton serta ikut bertanggungjawab atas kelestarian kekayaan budaya bangsa melalui film sebagai suatu kebanggaan nasional. Sesungguhnya film atau movie itu sendiri adalah gambaran dari gerak kehidupan. Maju mundurnya perfilman Indonesia juga merupakan pencerminan dari gerak kehidupan kita semua sebagai bangsa.

Untuk mengetahui jalannya diskusi, maka berikut ini dilaporkan hasil serapan yang patut kita simak. Dari hasil diskusi ini kita dapat mengetahui sejauh mana kaum muda kita telah mengikuti gerak langkah per-filman kita. Juga sejauh mana adaptasi mereka bisa mendalami masalah-masalah yang dihadapi orang film

serta berbagai pengertian tentang film yang sifatnya elementer.

Kita tampilkan pandangan umum pihak IKOSIS yang disampaikan oleh **Frans Hardini Ashari** selaku Kordina-tor IKOSIS Jaya.

PEMANDANGAN UMUM IKOSIS JAYA:

## MERASA BERTANGGUNGJAWAB ATAS PERKEMBANGAN FILM NASIONAL

**F**ilm sebagai salah satu media komunikasi massa mempunyai pengaruh bagi pembentukan watak dan opini masyarakat, yang dapat mengarah pada hal-hal yang membangun ataupun hal-hal yang meruntuhkan.

Dalam hubungan inilah IKOSIS DKI Jaya sebagai wadah komunikasi, konsultasi dan kordinasi pelajar memberikan sedikit pandangan mengenai perfilman di Indonesia pada kesempatan Pekan Apresiasi Film Indonesia tahun 1982 di Jakarta.

Film sebagai media penerangan dimaksudkan agar mampu memberikan informasi yang tepat dan benar bagi masyarakat, khususnya bagi pelajar yang merupakan bagian dari generasi muda dalam kegiatan mereka tanpa mengurangi hakekat film itu sendiri.

Sebagai media ekspresi yang mampu mengungkapkan nilai-nilai budaya bangsa, film juga merupakan media pendidikan. Film sebagai media hiburan dimaksudkan agar film mampu menciptakan hiburan yang segar dan sehat serta mampu menumbuhkan iklim yang gembira di dalam hidup bermasyarakat.

Film Indonesia adalah film yang mengutarakan pribadi manusia Indonesia, budayanya dan kenyataan hidup dari bangsa Indonesia yang berisi nilai norma, pandangan hidup dan sikap hidup bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar '45.

Film Indonesia telah berjuang cukup gigih dan panjang dalam rangka eksistensinya di kalangan masyarakat, untuk mewujudkan cita-cita menjadikan film Indonesia jadi "tuan di negerinya sendiri".

Meskipun film Indonesia mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan, hal ini merupakan kewajaran. Adanya keengganan menonton film Indonesia pada sebagian kalangan pelajar dan mahasiswa, hal tersebut mungkin merupakan sikap mental, tetapi sebenarnya merupakan suatu tantangan bagi kalangan perfilman untuk bekerja lebih keras lagi dalam rangka menciptakan citra film Indonesia.

Kami para pelajar, kata wakil IKOSIS, senantiasa optimis terhadap perkembangan perfilman di Indonesia pada masa yang akan datang. Hal ini telah tampak dalam beberapa perkembangan tahun-tahun belakangan ini, dengan adanya usaha-usaha dari beberapa individu maupun lembaga termasuk para panelis kita pada hari ini, dan usaha pemerintah c.q. Departemen Penerangan dalam menciptakan iklim yang sehat terhadap perkembangan perfilman di Indonesia. Kami menyadari bahwa di segi lain, film mempunyai citra komersial, namun sifat komersial harus memperhatikan perpaduan film sebagai media penerangan, pendidikan dan hiburan tanpa kehilangan mutunya.

Kami menyoroti penampilan citra pelajar, pemuda dan mahasiswa melalui film-film Indonesia berdasarkan aspirasi kreasi dan dedikasi dilihat dari seluruh dimensi dan aspek, dengan memberikan penekanan kepada unsur sosio kultural dan kultural edukatif.

Film, ibarat pisau bermata dua. Pertama, dapat mengarah pada hal-hal yang membangun dan kedua, bisa meruntuhkan.

Seperti film **"Binalnya Anak Muda"**. Realita menggambarkan karakter tokoh maupun keberadaan segolongan masyarakat. Hal semacam ini bisa dijadikan bahan untuk mawas diri bagi pelajar, orangtua dan masyarakat. Namun interpretasi lainnya bisa berpengaruh terhadap pembentukan watak dan perilaku kalangan remaja.

Mungkin karena menilai dampaknya akan negatif, maka Pemda Riau tidak mengizinkan film tersebut diputar di daerahnya. Menurut pertimbangan Muspida Riau, kenakalan remaja di daerahnya tidak seperti yang digambarkan dalam film tersebut.

Menanggapi film-film yang diputar dalam rangka Pekan Apresiasi Film Indonesia 1982, maka cerita ketiga film tersebut pada kenyataannya memang terjadi pada sebagian masyarakat kita.

Demikianlah pandangan kami, semoga **feed back** yang diharapkan dari Pekan Apresiasi Film Indonesia 1982 ini mampu mendorong dan menggugah potensi generasi muda untuk membuat film Indonesia menjadi tuan di rumahnya sendiri.

## DIBUTUHKAN FILM-FILM REMAJA BUKAN SEKEDAR CINTA-CINTAAN

**S**ebagai pengantar ke arah diskusi, ada baiknya diutarakan prakata dari masing-masing panelis sekedar untuk membuka cakrawala tentang bagaimana suasana diskusi dan sejauh mana pula persepsi para peserta dalam pengamatannya terhadap perkembangan perfilman di tanah air:

### 1. Syumanjaya:

Adik-adik sekalian yang saya cintai. Saya merasa bahagia melihat muka-muka muda yang cerah, gembira dan penuh kehangatan. Dari sini juga sudah bisa ditarik kesimpulan bahwa apresiasi film bagi kalangan muda sudah terbentuk dengan kehadiran adik-adik. Pada waktu film saya diputar, sebenarnya saya sudah bicara pada adik-adik sekalian selama kurang lebih dua setengah jam melalui film **Atheis**. Dan saya sebenarnya tinggal menunggu giliran adik-adik berbicara. Jadi silahkan. Kami di depan ini bersama rekan lainnya juga bergairah mendengar dan mengetahui persepsi anda semua tentang apa-apa yang kami ekspresikan dalam film-film kami. Silahkan.

### 2. Teguh Karya:

Adik-adik, saya tinggal di sebuah lingkungan kelas tiga. Satu daerah di mana banyak terjadi peristiwa yang begitu akrab dengan jiwa saya dan juga saya kira dekat dengan adik-adik.

Thema-thema film saya adalah tema-thema yang muncul dari lingkungan seperti itu. Seperti halnya "**USIA 18**", saya kira juga mencerminkan lingkungan seperti itu dan seusia dengan anda semua yang hadir sekarang. Suatu daerah di mana memang banyak anak-anak putus sekolah, anak muda yang tidak mempunyai pekerjaan, tidak berada, tidak mampu dan bahkan lari dari kenyataan-kenyataan. Saya melihat banyak yang mabuk, saya melihat banyak yang makan **pil kancing**. Saya takut melihat itu semua. Sebaliknya kalau saya ke luar negeri, saya melihat anak-anak kita seumur dengan Edo, sedang angkat kopor di Frankfurt, Jerman Barat, sedang kerja berat membiayai sekolahnya di luar negeri, yang tidak dibiayai keluarganya. Timbul pertanyaan dalam diri saya, mengapa mereka kok bisa?. Berdasarkan alasan itulah mengapa "**Usia 18**" dibuat. Saya ingin mereka mempunyai sedikit harapan. Saya ingin mereka berbeda dari orang-orang tua mereka, karena mereka tidak pernah angkat senjata dan tidak pernah berjuang secara fisik, tetapi justru pada mereka diandalkan suatu beban masa yang akan datang. Film yang anda lihat adalah sebuah film yang menampilkan kenyataan-kenyataan yang ada, dengan tentunya mengandung harapan-harapan.

Ini adalah Pekan Apresiasi yang pertama kita

selenggarakan dan saya mengharap banyak pertanyaannya dari anda semua.

### 3. Arifin C Noer:

Kalau tadi saudara Teguh Karya mengatakan bahwa beliau tinggal di daerah kelas tiga, maka saya juga harus mengatakan terus terang dalam suasana yang bahagia ini, bahwa saya tidak tinggal di daerah kelas tiga, saya adalah orang kelas tiga.

Dan kalau tadi oleh saudara Nurhadi disebutkan bahwa Bapak Syumanjaya pernah menjabat sebagai Direktur Film di Departemen Penerangan lulusan Institut Moskow, maka saya adalah seorang awam yang mencoba-coba membikin film. Berbeda dengan kedua rekan saya terdahulu, saya terpaksa harus mengatakan pada kesempatan yang mungkin tidak terlalu lapang ini, bahwa saya harus lebih banyak bicara dari beliau-beliau. Alasannya adalah karena mungkin film saya "**Suci Sang Primadona**" sebagai film pertama saya tidak cukup berbicara. Itu adalah film pertama saya dan sebagai alat ekspresi saya yang baru.

Supaya lengkap apa yang saya maksudkan dengan film saya, ijin kan saya mencoba juga mengungkapkan ide-ide yang melatari film tadi.

Pada mulanya SUCI SANG PRIMADONA berjudul "**P**". Judul "**P**" oleh beberapa pihak tidak disetujui, karena mengasosiasikan macam-macam. Tapi maksud saya sebenarnya mau membersihkan huruf "**P**" dari "**P**" yang ada. Kemudian akhirnya sang "**P**" saya kasih judul, yaitu "**Suci Sang Primadona**".

"**Suci Sang Primadona**" adalah sebuah film yang ingin melukiskan secara sederhana bagaimana seorang remaja Indonesia yang **gerah**. **Gerah** terhadap kehidupan kota, terhadap kekayaan dan terhadap masyarakat, yang menurut remaja tadi adalah **munafik**. Keluarga, orang tuanya, tante-tante di Jakarta dan

sebagainya. Dia gerah pada keadaan tersebut. Dan dia sedang belajar di SMA. Dari konflik akil balig ini dia mencoba lari dari kota menuju desa. Sementara itu dari pihak lain adalah seorang perempuan yang gerah kepada desa dan gerah kepada kemiskinan. Dia memimpikan kekayaan. Perempuan ini lari dari desa menuju ke kota untuk merebut impiannya, yang bernama **kekayaan**. Ironisnya mereka bertemu di atas ranjang. Film itu kemudian berakhir dengan "**Suci**" kembali ke desanya, karena dia pikir di desanya dia bisa merenungkan lebih banyak lagi apa yang lebih mungkin membahagiakannya daripada kekayaan yang akan dicapainya di kota. Sementara Eros, si pemuda, setelah memungut begitu banyak pengalaman kembali ke sekolah dan bercita-cita untuk menjadi orang besar.

Jelas sekali filmnya sangat sederhana dan disajikan secara gaya populer dengan latar belakang Indonesia miniatur, yaitu misalnya, ada tokoh dari grup sandiwara rakyat, tokoh tua yang selalu ingin mencari kekayaan, tetapi dengan membeli lotre, tokoh tukang rokok, yang pada mulanya memenangkan lotre akhirnya kembali miskin dan kembali jual rokok. Ini juga karikatur tentang manusia Indonesia dalam menggunakan kekayaannya. Yang pertama-tama dia kerjakan setelah memenangkan lotre adalah menghabiskan kekayaannya itu. Dia tidak pernah bersikap kreatif terhadap kekayaannya. Saya kira kalau diperhatikan benar-benar tokoh-tokoh dalam "**Suci Sang Primadona**" bukan semata-mata remaja tadi, tetapi banyak tokoh-tokoh lainnya.

Saya sangat senang mengatakan bahwa dalam film saya "**Suci Sang Primadona**", tokoh utamanya adalah masyarakat Indonesia.

Sekian dan terima kasih.

### 4. Hendrik Gozali (produser):

Sebenarnya tujuan saya datang ke tempat ini

hanya untuk ingin tahu atau mendengar secara langsung dari saudara-saudara mengenai kesan-kesan saudara terhadap film-film yang diputar selama Pekan Apresiasi khususnya dan film-film Indonesia umumnya. Dan mungkin melalui pembicaraan-pembicaraan ini akan juga ada manfaatnya untuk saya atau rekan-rekan saya sebagai produser dalam membuat film di kemudian hari.

Saya kira, pengalaman membuat sebuah film tidak beda dengan cerita "**Aladin Seribu Satu Malam**". Jadi seribu satu macamlah suka dukanya dan saya pikir pada kesempatan lain dapat kita bicarakan dalam forum tersendiri.

### **Inilah Yang Saya Takutkan!**

Dalam acara diskusi ini ada sepuluh penanya. Pertanyaan diajukan dalam dua termin dan untuk masing-masing termin muncul lima penanya. Pokok-pokok pertanyaan dalam termin pertama, menyangkut hal-hal yang sebenarnya selama ini juga sering dipermasalahkan oleh khalayak penonton maupun kritisi film Indonesia, seperti misalnya kemewahan dalam film, hubungan bebas, thema film yang kurang berakar di masyarakat, masalah jiplakan dan lain-lain. Bahkan seorang pelajar dari STM Penerbangan bernama **Mohammad Noer** mempertanyakan: kalau ada film tentang "Nostalgia di SMA", "Gita Cinta di SMA" serta thema-thema cinta yang umumnya diambil dari kehidupan SMA, kenapa tidak ada "Gita Cinta dari STM", "ST Pertanian", atau dari "SPG".

**Suryadharma** dari salah sebuah perguruan tinggi di Jakarta menyoroti tentang penggambaran adanya pergaulan bebas di kalangan mahasiswa. Katanya ini mungkin bisa berakibat buruk terhadap pandangan adik-adik di Sekolah Menengah tingkat Pertama dan Atas tentang kehidupan mahasiswa di perguruan tinggi. "Apakah kita masuk perguruan tinggi untuk begituan?". Inilah yang

saya takutkan, kata Suryadharma. Bahkan seorang pelajar putri menuntut, mengapa film-film Indonesia sekarang kebanyakan untuk konsumsi kalangan penonton usia 17 tahun ke atas. "Mana film untuk 13 tahun ke atas?".

### **"Petisi 27"**

Untuk menjawab sebagian pertanyaan tersebut secara berurutan tampil para panelis yang diawali oleh **Syumanjaya**:

"Ternyata anda semua sangat tajam. Saya kira ini suatu potensi yang sangat luar biasa dan naga-naganya anak muda jaman sekarang akan merupakan pendorong bagi perbaikan perfilman Indonesia, misalnya untuk masa lima tahun mendatang, film Indonesia tidak akan bisa muncul dengan sembarangan saja.

Pertama, saya akan menjawab pertanyaan: kenapa orang-orang film kurang memasyarakat pada generasi muda. Ke mana itu film-film remaja 13 tahun dan kenapa kalau cinta-cintaan mesti di SMA. Tidak di sekolah kejuruan atau di SMP.

Saya pribadi pernah menerima surat dari sebuah SMP di Kebayoran yang ditandatangani oleh kira-kira 27 penandatangan. Kita sebut saja sebagai "Petisi 27". Tulisan itu begitu serius sampai mengatas namakan diri: "Kami atas nama siswa-siswa SMP Kebayoran No. Sekian". Kalau Pak Syuman ada perhatian, kami 27 orang bersedia menghadap Pak Syuman untuk mencekiterakan kehidupan kami di kalangan siswa-siswa SMP bahwa itu lebih seru dari di SMA. Jangan dipikir bahwa kita tidak pacaran, kita sudah pacaran dan pacaran kita itu lucu-lucu dan seru-seru. Ada yang pacaran di atas genteng.

Ini memang sangat menarik. Dan saya sendiri tergugah untuk mencoba, tetapi masa SMP saya sudah terlalu jauh dan sudah lupa dan itu perlu suatu orientasi. Saya kira ini bahan yang baik bagi para produser untuk mulai menelusuri kehidupan yang semacam ini.

Pertanyaan dari saudara **Manaf**, kenapa scene atau adegan yang bersifat agamais selalu tidak lengkap. Jawaban saya adalah film memang tidak pernah lengkap menggambarkan kehidupan, sebab film pada dasarnya adalah suatu ekspose performance dari kehidupan. Perjalanan nasib seseorang dari mulai lahir kadang-kadang sampai dia mati. Dan waktunya dibatasi hanya 1½ jam atau 2 jam. Bagaimana mungkin menggambarkan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan itu secara lengkap. Justru di sinilah kekuatan movie! Bahwa dia tidak menggambarkan selengkap-lengkapnyanya, tetapi dia berhasil memberikan kesan seutuh-utuhnya. Jadi bukan hanya kehidupan agama yang digambarkan secara tidak lengkap, tetapi seluruh gambaran kehidupan yang lain pun demikian penggambarannya di dalam film. Yang terpenting di dalam film bukan menjelaskan tetapi adalah mengesankan. Selama ada kesan keutuhan, maka berarti film itu sudah bicara!

#### **Arifin C Noer:**

Mengenai film tentang 17 tahun ke atas saya khawatir pertanyaan itu benar-benar kena sasaran, sehingga kita semua bisa pingsan. Kalau memang demikian halnya, ada baiknya nanti setelah selesai diskusi, apakah itu dari pihak Sinematek, Parfi dan KFT mengadakan penelitian untuk memperoleh data yang lebih akurat. Apakah benar perbandingan antara film-film di atas 17 dengan 13 ke bawah itu tidak imbang?. Apakah benar banyak penonton di bawah 17 itu tidak punya giliran untuk menonton? Dan saya mendukung bahwa memang sangat, sangat dibutuhkan film-film untuk di bawah 17 tahun. Dengan ini juga saya menganjurkan kepada adik-adik, janganlah menonton film 17 tahun ke atas kalau anda belum 17 tahun.

Mengenai kemewahan yang katanya terlalu banyak digambarkan dalam film-film Indonesia, ini juga ada baiknya diselidiki secara lebih baik. Kita suka ikut latah,

suka ikut membuat pernyataan tanpa menyelidiki lebih lanjut. Apakah benar mayoritas film Indonesia menggambarkan kemewahan? Sebagai contoh, tiga film-film yang adik-adik saksikan dalam Pekan Apresiasi ini tidak ada hubungannya dengan kemewahan. "Atheis" tidak ada hubungannya dengan kemewahan, "Usia 18", tidak menyentuh masalah kemewahan, juga "Suci Sang Prima-dona" pun tidak menggambarkan semata-mata masalah kemewahan. Tiga film ini saja sudah membantah. Apakah seluruh film akan membantah penanya tadi, saya tidak tahu.

Yang akan menjawab adalah data yang pasti. Saya mengajak untuk jangan terbiasa latah dengan membuat pernyataan-pernyataan tanpa data yang lengkap. Itu hanya akan mengeruhkan suasana dan akan mengotori udara perfilman di tanah air yang kita cintai ini.

Mengenai masalah komersialisasi, sebagai satu catatan pinggir, perlu juga adik-adik pahami bahwa seni film adalah seni orang-orang kaya.

Ketika saya dulu hanya menulis puisi saja, ketika cuma seorang penyair, saya tidak memerlukan siapa-siapa, yang saya perlukan adalah selembar kertas dan potlot. Kalau saya memperoleh inspirasi, saya menulis. Selesai! Tetapi sekarang ketika saya terlibat dalam seni film, tidak lagi bisa berbuat bebas seperti itu. Seni film adalah seni orang-orang kaya.

Dan membuat film yang baik rupanya benar seperti yang dikatakan oleh seorang sutradara Amerika yang terkenal **Elia Kazan**: "kunci keberhasilan sebuah film adalah kekuasaan dan kekuasaan itu adalah uang". Persoalannya di sini memang bagaimana sikap para pembuat film terhadap uang. Dan kalau kita mempertanyakan secara radikal sikap kita kepada uang, maka kita pun terdorong untuk mempertanyakan lebih jauh lagi sikap kita terhadap hidup dan masa depan.

Tapi satu hal, tolong dipahami; bahwa bagaimanapun seni film atau film adalah seni yang paling



modern, yang paling mutakhir dan menurut saya paling representatif untuk abad ini. Di dalam film, seluruh abad yang gemuruh ini bertemu. Di dalam film, nafsu kita, akan uang muncul. Dalam film, teknologi dan naluri-naluri kita bertemu. Saya terus terang, inilah alasan utama saya, mengapa saya terjun ke bidang film. Karena film sebagai alat ekspresi lengkap dan sangat mewakili abad ini. Dan di samping itu ada segi dagangnya.

Persoalannya sekarang, bagaimana kita mempunyai seni dagang yang sehat. Apakah kita semua di sini memperdagangkan racun-racun, memperdagangkan hal-hal jelek dan sebagainya. Ini semata-mata bukan persoalan prosedur, tetapi persoalan moral masyarakat kita sendiri.

Kalau adik-adik menuntut, mengapa yang komersial saja?. Kami barangkali juga akan bertanya mengapa adik-adik tidak menonton film yang tidak komersial. Begitu banyak film-film yang tidak komersial, antara lain **"Rembulan dan Matahari"**, sebagai contoh yang dianggap tidak komersial, tetapi penonton tidak mau datang. Malahan yang disalahkan pembuatnya. Ini membuat saya teringat ungkapan seorang penyair kita, **Sutarzi Kalsum Bachri**. Selama ini katanya, yang digugat selalu seniman. Jangan-jangan masyarakat yang tidak solider terhadap seniman. Masyarakat seniman mencoba melakukan sesuatu, tetapi masyarakat diam saja. Kita coba ini, masyarakat diam. Kalau kita bikin yang komersial, masyarakat ribut. Tapi mereka nonton juga. Saya kira ini timbal balik: dari penanya yang emosional tadi, saya tanggap dengan sedikit emosional pula.

Lalu soal-soal keagamaan, saya kira dalam film **"Atheis"** cukup lengkap. **"Atheis"** diangkat dari sebuah karya sastra yang penting di Indonesia. **"Atheis"** sebagai roman dan sebagai film merupakan refleksi nilai-nilai keagamaan, dimana diperkenalkan pikiran-pikiran materialistik, komunis dan sebagainya, yang ditanggapi secara religius oleh bapak kita, Syumanjaya.

Jadi suatu hari ada baiknya diadakan diskusi yang lebih lengkap dengan waktu yang cukup tentang hal-hal

semacam ini, misalnya dengan Bapak Syumanjaya, khusus mengenai film **"Atheis"**.

Sekarang sedang dibuat oleh Chairul Umam, **"Titian Serambut Dibelah Tujuh"**. Dulu saudara Chairul telah membuat **"Al Kautzar"** (ada data di Majalah Tempo). Film **"Al Kautzar"** adalah film yang sangat bagus, tetapi secara komersial dianggap merugi. Di Sukabumi, seperti juga yang menanyakan tadi, penduduknya mayoritas adalah muslim. Mungkin dari seratus orang hanya satu orang yang tidak muslim. Tetapi di Sukabumi, ketika Gunawan Mohammad menonton **"Al Kautzar"**, dia hanya ditemani beberapa belas orang saja. Mengapa? Karena film itu dianggap tidak komersial. Dan tentu saja karena film membutuhkan modal, maka produser harus mikir-mikir dahulu untuk membuat film-film semacam itu. Ini juga hal-hal yang perlu ditimbang. Jadi di samping kami juga mawas diri, tentu masyarakat juga ada baiknya memikirkan persoalan ini. Jadi kalau ada dosa, maka itu adalah dosa kita bersama.

Lalu mengenai jiplakan; "mengapa saudara **Mohammad Noer** memarahi kami habis-habisan? Kami bertiga sebenarnya mau lari tadi, karena takut dimarahi seperti itu. "Mengapa harus jiplakan?" Kita harus mampu menandingi Hollywood. Retorikanya luar biasa. Nah, satu hal saya senang sekali bahwa ada seorang penanya yang secara berani sekali memarahi kami. Tapi terus terang ada yang lebih berani lagi ketika berlangsung Pekan Apresiasi film di Jakarta Utara. Secara konkrit menyebutkan film-filmnya. Ini film jiplakan dan itu film jiplakan, sehingga kami semua berkata dalam hati: **"Eh, sialan! Apa benar itu?"** Sayang sekali penanya kita di sini tadi tidak menyebutkan film mana yang jiplakan. Dan apakah semuanya jiplakan? Ini juga memerlukan suatu pendataan yang baik. Khusus mengenai jiplakan, saya tidak membela yang menjiplak. Tapi saya harus mengatakan, bagaimanapun itu adalah masalah etis. Saya setuju. Suatu karya seni: apakah itu film, puisi, cerpen dan bahkan novel, kadang-kadang lahir dari pengaruh

inspirasi-inspirasi dan ide-ide sebuah karya yang lain. Masalahnya, mbok ya (kalau orang Jawa bilang), sebaiknya sumber inspirasi atau sumber idenya itu dicantumkan, jadi itu masalah etika saja. Masalahnya tidak apa-apa.

Bisa saja satu hari saya nonton sebuah film, katakanlah sebuah karya yang bagus dari **Kurosawa** yang bernama **"KAGEMUSA"**. Dari nonton film itu saya terangsang untuk menjawab beberapa hal dari **"Kagemusa"**. Dan dialog antara saya dengan **Kurosawa** melahirkan film saya. Mungkin saja film itu agak serupa, tetapi saya harus cantumkan jawaban terhadap **"Kagemusa"** atau bahwa inspirasinya dari **"Kagemusa"**.

### **Teguh Karya:**

Saya sangat senang dengan pertanyaan-pertanyaan anda semua. Pertama-tama, yang ingin saya tekankan kalau ada film 17 tahun ke atas, jangan kita tonton kalau belum berusia 17. Kalau ada film yang katanya jiplakan, jangan nonton film itu. Kalau ada film yang hanya menggambarkan cinta-cintaan SMA melulu yang tidak sesuai dengan SMA atau kampus, jangan nonton film yang seperti itu. Semuanya jangan! Film yang tidak ada nilai pendidikannya, jangan ditonton!. Kalau kita tidak nonton film-film semacam itu, maka sebagian besar penonton seusia kita hilang dari daftar pembeli karcis bioskop. Pada saat itu yakinlah akan muncul film-film yang bernilai.

Dulu saya pernah duga-duga bahwa dari kalangan generasi muda bisa muncul film yang bernilai disebabkan oleh kritik-kritiknya yang tajam. Saya sekarang tambah yakin bahwa film baik akan lahir dari kalangan penonton seperti anda semua. Saya yakin juga bahwa film baik pun bisa lahir dari kritikus-kritikus serta dari cendekiawan-cendekiawan yang selalu mengeritik film-film yang ditontonnya. Sekarang saudara-saudara sedang memulai. Saya katakan memulai, karena masih ada beberapa

penanya yang ternyata **tidak** memiliki data yang lengkap.

Orang-orang film mempunyai pegangan kerja yang bunyinya begini: **"Film bukanlah semata-mata barang dagangan"** Itu artinya, dagangan juga bisa, bukan dagangan juga bisa.

Kalau sekarang anda sinyalir, mengapa hanya film cinta SMA melulu, tetapi sekolah kejuruan tidak? Kenapa hanya tujuh belas tahun melulu? Semuanya yang anda kritik tadi barangkali film-film yang sifat dagangnya lebih banyak daripada bukan-dagang-semata-mata. Dari sini muncul peranan anda semua sebagai pelajar untuk membuat **move** terhadap film-film dagangan semata itu. Anda semua sebagai masyarakat pemuda pelajar dan mahasiswa harus menuntut lebih banyak film-film yang bukan semata-mata barang dagangan saja. Jadi jangan hanya sebagian kecil saja, sebab kalau hanya sebagian kecil, maka film-film dagang semata itu makin bertambah banyak.

Dari sekian banyak pertanyaan anda semua dapat saya simpulkan, bahwa kalau dewasa ini memang lebih banyak film yang seperti anda sinyalir, maka hal itu disebabkan barangkali oleh karena sikap mereka yang ingin membuat film sebagai barang dagangan semata-mata. Ini pun anda harus punya data lengkap, untuk film-film semacam itu, saya setuju untuk tidak anda tonton! Sebab kalau membuat film begituan, gampang. Coba, kalau mau bikin film dagangan melulu: Anak-anak SMA banyak, bikin saja film tentang SMA. Kejuruan berapa, ya sedikit, tidak usah! Saudara tadi menanyakan film-film 17 tahun ke atas. Bukan itu saja yang harus dipertanyakan. Film-film yang bersifat Jakarta-oriented juga harus dipertanyakan, yaitu film Indonesia yang seakan-akan cuma menggambarkan orang-orang Jakarta. Film tentang orang Maluku, mana? Film tentang Irian, mana? Tentang Nias, mana? Apa itu bukan lingkungan bangsa kita? Itu juga harus dituntut!

Kalau tidak, nanti kita kelupaan tentang adanya Maluku, Nias, Irian dan sebagainya. Anda semua harus mengajak khalayak untuk lebih menuntut lahirnya film-film yang anda harapkan tadi.

#### **Hendrik Gozali:**

Saya juga tertarik pada pertanyaan-pertanyaan tadi, tetapi saya ingin melihat dari segi saya dulu, yaitu mengenai penonton. Alasannya karena yang katanya dilihat oleh produser biasanya adalah penonton. Kalau seperti hari ini, saya lihat penonton film nasional itu umumnya adalah murid-murid sekolah, maka pertanyaannya seperti tadi kita dengarkan; "Keinginan terhadap film nasional menggebu-gebu".

Biasanya penonton itu ada dua kelompok, yaitu:

1. **Penonton Dasar:** untuk setiap bioskop biasanya ada penonton dasar. Artinya, setiap film tukar dia menonton dan dia pergi ke bioskop yang biasa dia kunjungi. Bahkan ada juga yang tempat duduknya pun yang biasa dia duduki.
2. **Penonton Nyasar:** kita tidak tahu datangnya dari mana, cuma kebetulan saja masuk atau tertarik pada sebuah poster film lalu mereka masuk. Barangkali juga dia tidak tahu filmnya apa, dari mana, judulnya apa, siapa pembuatnya dan sebagainya.

Dari uraian saya tentang adanya dua kategori penonton itu, jelas kiranya bahwa bioskop baru bisa hidup dari **penonton dasar**. Jadi kalau pertanyaan-pertanyaan saudara tadi kita kaitkan, saya berharap keinginan dan tuntutan saudara tadi bukan sekedar disebabkan karena hari ini saudara-saudara melihat film, tetapi justru karena saudara-saudara sekalian adalah "**penonton-penonton dasar dari film nasional kita**". Kalau penonton dasar kita adalah seperti saudara-saudara sekalian, saya kira kita akan dapat melahirkan film-film nasional seperti yang saudara-saudara inginkan itu. Kalau

memang penonton-penonton dasar kita semuanya seperti saudara-saudara, saya yakin film nasional kita akan maju pesat dan akan bisa memenuhi tuntutan dari saudara-saudara sekalian.

#### **Kedudukan Bahasa Indonesia.**

Dalam termin kedua suasana terasa semakin seru. Yang paling gencar diperdebatkan adalah masalah kedudukan bahasa dalam film Indonesia. Juga dipertanyakan masalah warna film horror a la Indonesia. Kemudian mengenai thema-thema film Indonesia yang dinilai penanya umumnya kurang punya variasi.

**M. Saleh AS**, dari SMAN 20, menyebut "film Indonesia tidak terlepas dari cinta melulu". Hal ini ternyata dikaitkan dengan masalah komersialisme perfilman. Seorang penanya juga menyinggung masalah adegan kematian Pak Kuncung dalam film "**Suci, Sang Primadona**" yang menurut dia tidak pantas terlalu lama diexpose, yang tidak biasa dilakukan film-film Mandarin atau Barat. Juga dipertanyakan masalah-masalah adegan dan dialog dalam film serta pengaruh film terhadap para remaja.

#### **Syumanjaya:**

Film selalu bercerita tentang manusia dan apabila thema cinta dirasakan mendominasi, maka hal itu sesuatu yang galib, persis seperti misalnya saudara setiap kali harus ganti baju. Setiap apa pun yang diketengahkan mengenai kehidupan manusia, masalah cinta tidak akan terlepas daripadanya. Mungkin karena sifat Tuhan yang mengasihani. Ini adalah soal kasih sayang.

Saya kira yang harus dipermasalahkan adalah apakah masalah cinta itu dipresentasikan secara terbuka, manis dan dimensional atau tidak. "Kenapa sih saudara jadi keberatan betul terhadap masalah cinta ini"? Saya kira kalau anda kerja di bengkel pun, masalah cinta akan tetap terungkap. Begitu juga kalau bekerja di ladang atau

di sawah. Cinta memang dominan dalam kehidupan manusia. Jadi kalau manifestasinya kelihatan juga di dalam film, barangkali hal itu harus diterima sebagai suatu hal yang galib.

Terhadap perkembangan bahasa, ada pertanyaan: Bagaimana penggunaan bahasa yang baik di dalam film? Film itu merupakan produk dari suatu masyarakat modern yang industrialistis dan sekaligus merupakan salah satu bentuk teknologi. Sebagai produk yang baru dari sebuah masyarakat, hal-hal yang formalistis belum terbentuk. Masih harus dicari! Begitu juga halnya dengan bahasa dalam film.

Ketika orang menemukan sistem tata suara untuk film, orang mencoba mengadaptir atau menterjemahkan atau mengambil alih peranan teater ke dalam film, karena teater adalah suatu seni yang berbunyi, bersuara dan berdialog. Kemudian kita lihat beberapa film yang menggunakan bahasa teater ternyata **tidak** cocok. Perkembangan selanjutnya orang beralih kepada literatur, ternyata bahasa literatur juga punya alam yang lain dari film. Dan sekarang orang mencoba memasukkan bahasa secara realistis dan keseharian, tetapi ternyata masih juga mengalami suatu ketidakcocokan. Namun segala sesuatu harus mengalami proses perkembangan. Oleh karena itu biarlah orang-orang film nanti mencari bahasa-nya sendiri di dalam film.

Yang jelas ada progress, dan ada usaha pencaharian.

Soal kata-kata "**diamput**" saya kira ini salah alamat. Dalam film "**Atheis**" tidak ada kata "**diamput**". Dan andaikata ada kata "**diamput**" dalam film lain, justru harus diterima sebagai suatu percobaan yang benar untuk mengetahui bahasa film yang baik itu bahasa yang bagaimana. Kalau dalam kehidupan yang riil, "**diamput**" itu dipakai oleh manusia, kenapa dalam film mesti diributkan. Justru kita hendak mencari kewajaran. Jadi istilah-istilah "**diamput**", "**buset**", "**rodok**" dan sebagainya menjadi bahasa yang riil, yang kalau digunakan pada waktu yang tepat, ya bisa saja. Orang memaki itu,

saya kira tidak bisa memakai bahasa yang lain, kecuali kata makian juga seperti halnya "**diamput**"

Soal mengulang adegan dalam "**Atheis**" Yang dimaksud dengan sembahyang sampai dua kali. Adegan perang yang diulang-ulang. Dalam film "**Atheis**" ada dialog yang menunjukkan bahwa sesungguhnya untuk menonton pun diperlukan kebisaaan. Jadi bukan untuk membuat film saja diperlukan kebisaaan! Yang dimaksud adalah penonton harus bisa menangkap apa yang dia tonton! Jangan menonton hanya untuk menonton saja, nanti saudara tergelincir kepada hal-hal yang murah.

Mengenai dua kali adegan sembahyang dalam film "**Atheis**", kalau saudara lihat dari alur ceriteranya, maka jelas ada dua hal yang ingin ditekankan. Yang pertama, sembahyang biasa. Yang kedua, sesudah dia menerima ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran-ajaran agama, hatinya mulai terguncang, sehingga ketika menghadap Tuhan pun dia jadi terguncang. Dan keguncangan itu perlu dipertunjukkan.

Lagi pula pengulangan itu tidak selalu harus dianggap sebagai hal yang statis sehingga membosankan. Dalam musik saudara lihat melalui pengulangan itu kita malah mendapat kesan pengembangan. Bukan suatu yang mati. Dalam film pun hal itu bisa berarti demikian. Jadi tidak selalu pengulangan itu sesuatu yang mesti membosankan.

**Arifin C Noer.**

Soal adegan perang dalam film "**Atheis**" yang disajikan tidak begitu lengkap. Film "**Atheis**" bukanlah film perang. Adegan perang hanya untuk memberi kesan latar belakang peristiwa saja. Dan kalau mau betul-betul nonton film perang, di Indonesia sekarang sudah benar-benar mantap (terutama dari segi sound effectnya) tontonlah "**Pasukan Berani Mati**". Saudara akan menyaksikan suatu pertempuran yang seru sekali dengan teknik special effect yang juga sangat meyakinkan.

Sehubungan dengan kewajaran suatu peran dalam kaitannya dengan pemain yang cocok dalam usia, itu biasa dalam seni akting atau seni peran. Sebagai contoh, di Inggris seorang bintang bernama Lawrence Olivier dalam usia 50 tahun, dia pernah memerankan usia 20 tahun. Masalahnya bukan masalah umur, tetapi apakah dia cukup meyakinkan sebagai pemeran atau tidak. Itu saja! Maksudnya supaya jangan terjadi kesalahpahaman. Demikian juga sebaliknya.

Seorang pemain yang muda usia bisa memainkan peran yang tua dan kalau ia benar-benar mampu bermain, ia akan berhasil memerankan peran yang lebih tua dari usianya itu.

Lalu masalah "perdiamputan". Kalau diperhatikan ada tiga tokoh yang karikatural dalam "**Suci Sang Primadona**", yaitu tokoh yang diperankan oleh Alam Surawijaya, tokoh tuan yang dimainkan pak Awaluddin dan ketiga adalah tokoh Soekarno M. Noor. Kalau anda cukup tangkas dan dapat menangkap apa-apa yang tersirat, anda akan mengerti siapa mereka. Mereka merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang terhormat. Bagaimana bahasa yang diucapkan mereka? Makilah mereka, jangan maki saya. Juga bahasa "perdiamputan" ini, seperti disebut Pak Syumanjaya adalah suatu usaha untuk menghidupkan bahasa Indonesia dalam film kita.

Film "**Suci Sang Primadona**" memang untuk usia 17 tahun ke atas, suatu kriteria kedewasaan yang sudah bisa memisahkan mana yang baik ditiru dan mana yang tidak. Perlu barangkali anda semua ketahui bahwa saya pernah membuat film yang lebih seram dari itu dan sampai sekarang belum lulus dari Badan Sensor, Judulnya adalah "**Petualang-petualang**" yang semula diberi judul "**Koruptor-koruptor**". Film itu sejak tahun 1978 masuk BSF dan sampai hari ini belum keluar, karena dianggap memang sangat mengerikan.

Dalam film "**Petualang-petualang**" tidak ada satu pun tokoh yang baik, kecuali seekor anjing. Film itu meng-

gambarkan suatu kengerian (yang dalam istilah keseniannya: sangat surealistis) seperti mimpi buruk. Ditautkan, kalau film itu keluar akan ditiru oleh penonton. Saya sangsi terhadap sikap itu walaupun saya menghargai sikap demikian. Saya yakin bahwa BSF adalah suatu badan yang mewakili masyarakat. Dengan demikian, dalam hal "**Petualang-petualang**", untuk sementara saya memang belum cocok dengan masyarakat. Namun saya berpendapat bahwa sebuah film mengerikan yang sengaja saya buat semacam "shock therapy" dapat dibandingkan dengan sebuah film penerangan tentang penyakit kanker. Kalau misalnya saudara menonton film kanker dan dijelaskan bagaimana mengerikannya penyakit kanker itu bekerja dan sebagainya, saya yakin saudara akan merasa ngeri sekali. Saudara tidak akan bisa makan beberapa hari. Dan saya yakin setelah menonton film itu, saudara tidak akan ingin berbondong-bondong mendapatkan penyakit kanker. Ini logika saya. Tetapi mungkin juga terjadi kalau saudara menonton film-film yang ngeri sekali, saudara akan menolak. "Hal ini jelas bukan persepsi saya".

Kembali ke dalam soal bahasa. Saya berpendapat bahwa bahasa Indonesia sedang mencari dan sedang dalam proses. Kita tidak bisa mengatakan bahwa bahasa standar kita adalah bahasa Indonesia yang ada di Medan. Kita juga tidak bisa mengatakan yang ada di Jawa atau di Jakarta. Semuanya masih dalam proses. Dan film Indonesia sedang mencoba merefleksikan proses tersebut.

Ada memang film-film Indonesia yang menggunakan bahasa buku. Nah, bahasa buku itu barangkali memang digunakan oleh pengarang-pengarang yang baru belajar. Sayang sekali saudara tadi tidak menyebutkan dalam film apa. Saya ambil contoh. Dalam "**Suci Sang Primadona**", melalui tokoh Soekarno M. Noor: "Tak dikatakan tak terbilang". Itu adalah contoh bahasa buku. Itu adalah suatu gaya karikatur. Gaya ejekan. Lihatlah, semua penonton ketawa ketika Soekarno M.

Noor mengucapkan itu. Mengapa ketawa, siapa yang saudara-saudara ketawai. Yang diketawai adalah tokoh itu. Sampai demikian formalistis dia mengungkapkan dirinya. Dan sama sekali tidak riil, sama sekali tidak wajar. Ini suatu penjelasan yang barangkali bisa membikin anda bisa mengapresiasi film secara lebih baik. Lalu mengenai adegan kematian yang berkepanjangan, seperti halnya pada adegan kematian Pak Kunciung sebagaimana saya gambarkan dalam film "**Suci Sang Primadona**". Saya hampir menangis mendapat kritikan tajam, karena tokoh ini tokoh yang saya sukai. Karena tokoh ini menggambarkan masyarakat kita. Mayoritas masyarakat kita beli lotre. Masyarakat kita setiap hari merindukan kekayaan. Masyarakat kita yang kecil-kecil setiap hari menghitung-hitung angka lotre. Mereka dihibau oleh impian-impian yang tidak jelas. Dan saya bikin adegan yang tragis. Saya bikin tokoh itu mati. Adegan kematiannya berkepanjangan, itu adalah nyan-nyan. Dan referensi saya bukanlah film Mandarin dan film Barat. Sayang sekali penanya tadi rupanya hanya cocok dengan film Mandarin atau film Barat, bukan film Indonesia.

Perlu anda semua ketahui, kami dengan beberapa kawan di sini sedang mencoba, berproses bersama mencari bentuk-bentuk ekspresi film Indonesia dan itu berarti adalah berproses bersama masyarakat.

Metafor-metafornya atau ungkapan-ungkapannya itu sedang dicari. Sebagai ilustrasi saya ambil contoh, kita semua sudah dikondisioning oleh film Barat, sehingga misalnya untuk adegan horror maka rumusannya adalah pucuk-pucuk cemara di malam bulan purnama. Dan kemudian ada seorang perempuan berpakaian putih membawa tempat lilin di tengah-tengah lorong. Bila adegan itu terjadi, maka terjadilah horror!.

Begitu juga dalam hal mengungkapkan "saya cinta kepada kamu". Kita tidak punya kultur demikian sebenarnya dan sekarang masih dalam proses. Ayah saya

tidak mempunyai kultur itu.

Ketika ayah saya bertemu ibu saya dulu, barangkali hanya diam-diam saja dan jawil-jawil saja, tahu-tahu aneh, tiba-tiba tidur saja begitu. Dalam film Indonesia tiba-tiba ada ungkapan "saya cinta kepadamu". Kebudayaan dari mana itu? Saya kira masyarakat kita sampai ini hari pun belum terlalu verbal. Kalau merasa suka sekalipun mereka akan lebih banyak diam. Hal ini kalau menurut istilahnya Bapak Muchtar Lubis: **masyarakat kita munafik**. Saya agak mendukung pernyataan Bapak Muchtar Lubis. Kita buktikan di sini. Semua yang berdiri di podium tadi mengatakan: jangan cinta-cintaan, jangan ini dan jangan itu. Tapi mereka tetap nonton film-film seperti itu. Sedangkan beberapa film, seperti yang saya katakan tadi, misalnya "**November 1828**", "**Si Doel Anak Betawi**", "**Si Mamad**", dan "**Rembulan dan Matahari**", apakah saudara menontonnya? Itu bukan semata percintaan. "**Si Mamad**" menceritakan seorang pegawai rendahan yang jujur, rendah hati, sederhana, hidup dengan keluarganya yang begitu besar. Kemudian keadaan ekonomi yang luar biasa memberatinya telah menggodanya untuk tiba-tiba mencuri sesuatu dari kantornya, karena dia pegawai biasa saja sebagai opas. Dia korupsi. Dengan melakukan korupsi kecil-kecilan, rohaninya mulai terganggu dan dia dikungkung oleh rasa berdosa. Sayang penonton film itu tidak banyak. Termasuk saudara-saudara barangkali, belum menontonnya.

### **Teguh Karya:**

Bahasa Indonesia memang sedang dalam proses. Kita dulu punya kata "tuli", sekarang ada "tunarungu", "pelacur" sekarang disebut "tunasusila" dan macam-macam. Lalu bahasa lisan. Ini lapangan kerja baru. Bagi saudara-saudara yang masuk di bidang linguistik mungkin akan anda pelajari sosiolinguistik. Ini belum diutik-utik. Sosiolinguistik, bahasa yang hidup di tengah-tengah

masyarakat. Kita sedang berproses ke arah itu.

Peranan-peranan sosio dan etnik masih harus masuk ke dalam film kita. Saya tidak setuju sama sekali dengan penanya yang membandingkan film Indonesia dengan film Barat. Kondisinya sangat berbeda. Kebudayaan Barat tidak begitu majemuk seperti yang kita punyai. Tadi ada kata-kata yang membuat kita tertawa. "Di Balik Kelambu". Tapi andaikata itu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris "behind the mosquito net".

Barangkali saudara-saudara tidak tertawa. Sebab lain, bunyinya lain, artinya pun lain dan tidak ada unsur-unsur asosiasi. Saudara sendiri yang menjadikan kata "kelambu" sebagai suatu yang lucu, padahal kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris anda bisa mengiakan bahwa kata "kelambu" itu bukan sesuatu yang lucu.

Orang jaman dulu menyebut macan sebagai embah, kiyai, kebiasaan itu sekarang harus hapus. Lebih bahaya

kalau diterjemahkan ke dalam bahasa asing lantas kita terima begitu saja. Jangan kita mulai kebiasaan tersebut dengan generasi kita yang baru ini.

Pada akhirnya, **Nurhadi Irawan** sebagai moderator menilai bahwa pertanyaan-pertanyaan dari 10 penanya tersebut telah dijawab dengan baik oleh panelis. Lantas dia membuat suatu himbauan: "Agar memasukkan masalah Apresiasi Film ke dalam Sekolah-sekolah serta kegiatan-kegiatan kepemudaan lainnya, misalnya dalam Karang Taruna".

Kemudian **Drs. AS Nasution** yang membawahi pembinaan generasi muda dari Kanwil Departemen P dan K DKI Jaya menegaskan: Departemen P dan K dan juga FFI punya misi pendidikan. Karena misi kita sama, terutama dalam pembinaan generasi muda, maka pada masa-masa mendatang ada baiknya kalau dalam kegiatan-kegiatan seperti ini, dikembangkan kerjasama yang lebih baik. sehingga generasi muda akan lebih berperan.

## HASIL-HASIL FFI 1982

**D**alam FFI 1982 hadir suatu acara yang baru, yang sebenarnya selama ini menjadi harapan banyak kalangan, yaitu acara pemilihan Kritik Film Indonesia Terbaik. Hadirnya acara ini di samping acara-acara yang sudah rutin dilakukan selama ini seperti Film Terbaik, Aktor Terbaik, Sutradara Terbaik dan lain-lain, diharapkan usaha-usaha peningkatan dan pengembangan kreativitas di bidang perfilman Indonesia semakin komprehensif dan maju.

Sebelum pengumuman masing-masing hasil penilaian Dewan Juri atas banyak mata acara pemilihan kriteria terbaik dalam FFI 1982, lebih dulu masing-masing Dewan Juri menyampaikan laporan hasil pengamatan mereka atas bidang yang mereka nilai sebagai pertanggungjawaban pekerjaan yang mereka lakukan. Ini pun merupakan hal baru. Tapi sesungguhnya juga telah lama diharapkan oleh masyarakat perfilman. Bahkan ada kalangan yang seperti menuntut, bahwa laporan semacam itu memang wajib dilakukan oleh Dewan Juri.

Perlu diketahui bahwa laporan tersebut menyangkut tiga aspek penilaian, yakni:

1. Laporan Dewan Juri Pemilihan Kritik Film Terbaik
2. Laporan Dewan Juri Pemilihan Film Cerita Terbaik.
3. Laporan Dewan Juri Pemilihan Film Dokumenter Terbaik.

Laporan tersebut kami sajikan kembali, yang telah dibacakan oleh masing-masing Ketua Dewan Juri: Soemardjono (Kritik Film); Sjamsoe Soegito (Film Cerita) dan R.M. Soetarto (Film Dokumenter).

### LAPORAN DEWAN JURI PEMILIHAN KRITIK FILM TERBAIK FFI 1982.

#### Pendahuluan

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Harian Dewan Film Nasional No.23/KEP/DPH/1982, tanggal 31 Juli 1982, Dewan Juri Film Kritik Terbaik Film Indonesia 1982, yang keanggotaannya terdiri dari:

- Soemardjono : Ketua merangkap Anggota
- Drs. D. H. Assegaf : Anggota
- Paul L. Tobing : Anggota

telah menilai 65 naskah kritik film karya 29 orang kritikus dari wilayah Jakarta, Ujungpandang, Yogyakarta dan Bandung. Naskah-naskah tersebut pernah dimuat dalam media-media sebagai berikut: Pos Film, Angkatan Bersenjata, Antara Spektrum, Terbit, Ria Film, Merdeka, Suara Karya, Sinar Pagi Minggu, Variasi Putra, Bandung Pos, Kompas, Dialog, Harian Fajar, Gadis, Aktuil, Femina, Inti Jaya, Pos Kota, Pikiran Rakyat, Berita Nasional, Yudha Minggu, Tempo dan Singgalang Minggu.



Film-film yang dipermasalahkan berjudul:

1. **Sang Guru** ditanggapi oleh 15 kritikus
2. **Jaka Sembung** ditanggapi oleh 12 kritikus
3. **Serangan Fajar** ditanggapi oleh 12 kritikus
4. **Gadis Marathon** ditanggapi oleh 11 kritikus
5. **Kabut Sutra Ungu** ditanggapi oleh 9 kritikus
6. **Perempuan Dalam Pasungan** ditanggapi oleh 5 kritikus
7. **Para Perintis Kemerdekaan** ditanggapi oleh seorang kritikus film.

Berbeda dengan cara penjurian film peserta FFI yang dapat diketahui siapa pembuatnya (melalui credit titles), maka naskah kritik film sama sekali tidak mencantumkan siapa penulisnya, sehingga para Juri harus bekerja obyektif tanpa dipengaruhi oleh faktor lainnya yang berkaitan dengan pribadi kritikus atau penulisnya.

Begitu juga media yang pernah memuat naskah-naskah tersebut sama sekali tidak dapat dikenali, karena yang dinilai oleh para juri bukan artikel yang asli dari media, tetapi naskah-naskah yang telah diketik dengan rapi. Dengan cara demikian diharapkan "wibawa" mass media sama sekali tidak mempengaruhi obyektivitas penilaian juri.

Nama kritikus dan medianya baru diketahui oleh Dewan Juri setelah penghitungan angka nilai selesai dilaksanakan dan pemenang-pemenang telah ditentukan. Sebelum pemenang ditentukan, nama kritikus dan medianya dengan ketat dirahasiakan oleh Panitia.

### **Kriteria Penjurian**

Sebagai usaha perintisan dalam mencari metoda penjurian kritikus film terbaik, maka kriteria penjurian belum dapat dikukuhkan dengan mantap. Namun catatan-catatan yang paling fundamental telah diletakkan, yaitu meliputi penilaian atas **mutu tanggapan tematik** dan **teknik sinematik** dan **gaya penulisan**.

Mutu tanggapan tematik adalah ukuran sejauh mana obyektivitas kritikus terhadap tema dan alur ceritera sebuah film. Tanggapan tematik kritikus juga mencerminkan kadar penguasaan dan pengetahuan dramaturgi sebagai sarana analisa alur ceritera dan struktur dramatik.

Mutu persepsi sinematik mencerminkan kemampuan kritikus dalam menanggapi film sebagai media audio visual yang dibuat dengan azas sinematografi. Penguasaan bahasa film sebagai sarana membaca sebuah karya sinematik dinilai melalui ungkapan analitik kritikus tentang mutu penyajian sinematik sebuah film.

Penilaian atas gaya penulisan bersifat umum meliputi kadar penggunaan bahasa sebagai media komunikasi. Dalam hal ini penilaian ditekankan pada kemampuan kritikus menciptakan "daya pikat" perhatian pembaca. Apabila kritik film itu mampu membina penonton untuk lebih memahami kesan yang terkandung di dalam sebuah film, kritik itu akan memperoleh penilaian tinggi. Begitu juga apabila kritik itu mampu menyajikan tanggapan obyektif sedemikian rupa membuat sang sineas sebagai komunikator dapat mengetahui sejauh mana amanat/pesan yang terkandung di dalam film buah karyanya telah dipahami oleh khalayak sebagai komunikan.

### **Sistem Panilaian**

- Tiap-tiap naskah dinilai berdasarkan kadar tanggapan tematik, persepsi sinematik dan gaya penulisan.
- Nilai mutu dilambangkan dengan angka 40 s/d 100.
- Hasil rata-rata dari penjumlahan angka nilai tanggapan tematik, persepsi sinematik dan gaya penulisan menjadi angka nilai naskah.
- Hasil rata-rata dari penjumlahan nilai naskah tiap peserta menjadi angka nilai kritik. Kebijakan

menjumlahkan nilai naskah-naskah yang diikutsertakan oleh tiap peserta, dimaksudkan untuk mencerminkan konsistensi kreativitas tiap peserta.

- Angka yang diperoleh tiap peserta merupakan indeks prestasi yang ditentukan dengan menjumlahkan angka nilai konsistensi kreativitas yang diperoleh dari tiap anggota Dewan Juri.
- Tingkat prestasi yang tertinggi menentukan pemenang.

### **Tanggapan Dewan Juri Tentang Mutu Penulisan Kritik Film dalam FFI 1982.**

Tanggapan Dewan Juri tentang mutu penulisan kritik film terbatas pada penilaian atas naskah yang disertakan pada FFI 1982.

Dengan melalui diskusi yang mendalam Dewan Juri berpendapat:

1. Penulisan kritik film pada umumnya belum memenuhi persyaratan kriteria. Bahkan masih banyak yang cenderung menyajikan resensi dan mencampuradukkannya dengan kritik yang dangkal.
2. Kemungkinan besar masih banyak penulisan kritik film yang belum mengetahui bentuk kritik film yang tepat, sehingga reportase tentang pribadi produser, keadaan studio atau kegiatan pemotretan dan lain-lain hal bukan masalah langsung berkaitan dengan kreativitas sinematik dibaurkan dengan tinjauan tematik dan sinematik.
3. Dari penilaian atas tanggapan tematik penulis kritik film peserta, dapat ditarik kesimpulan bahwa umumnya penulis kritik film Indonesia belum sepenuhnya menguasai pengetahuan dramaturgi, sehingga dalam melakukan analisa atas tema dan alur cerita serta struktur dramatik tidak cukup obyektif dapat dijadikan tolok ukur pembuat film atas kualitas dramatik dan estetika buah karyanya.
4. Umumnya penulis kritik film (peserta FFI 1982) belum mampu membaca piktograf, sehingga persepsi

sinematografi terbatas pada permukaan gambar yang terlihat dan tidak mampu mendalami apa yang tersirat.

5. Gaya penulisan kritik film umumnya masih bersifat konvensional. Belum mampu menciptakan daya pikat perhatian pembaca sehingga penulisan kritik film yang bersifat khusus itu belum menjadi bacaan yang menarik, mengasyikkan dan menumbuhkan inspirasi. Umumnya kritik film Indonesia belum bisa membina penonton ke arah pemahaman yang lebih mantap atas esensi ceritera sinematik, sehingga masih terasa pentingnya pembinaan bahasa sebagai media bagi rata-rata kritikus film Indonesia.

### **Penutup**

Dewan Juri mengakui hasil kerjanya belum merupakan tolok ukur mutu penulisan kritik film Indonesia yang optimal, namun dari hasil yang pertama ini telah mencerminkan adanya usaha menciptakan sistem penjurian yang fundamental. Penyempurnaan sistem itu senantiasa harus dilakukan melalui studi khusus dan menggali nilai-nilai baik dari pengalaman penjurian selanjutnya.

Dewan Juri menyampaikan penghargaan khusus kepada pemrakarsa penyelenggaraan pemilihan kritik film Indonesia terbaik, karena kegiatan ini dapat dinilai sebagai promosi untuk menggalakkan penulisan kritik film dan mendorong penulisan itu ke arah kemajuan yang obyektif. Kritik Film amat dibutuhkan tidak sekedar untuk mengemukakan kelemahan-kelemahan sebuah karya sinematik, tetapi juga diperlukan sebagai media kultural edukatif bagi khalayak penonton film Indonesia.

**Pertama:** untuk membina penonton agar mampu menanggapi idiom-idiom sinematografi sedemikian rupa sehingga amanat komunikator yang terkandung di dalam sebuah film dapat dipahami seoptimal mungkin. Dan

sebaliknya dari pada itu, sementara tidak diharapkan hadirnya kritik film yang justru membangun antipati penonton terhadap film Indonesia.

**Kedua:** penulisan kritik film di negara berkembang juga sangat diharapkan mampu membina khalayak untuk meningkatkan selera ke arah pemilihan film yang pantas dan berfaedah untuk ditontonnya. Di samping itu juga secara tidak langsung mempertinggi kesiapan mental khalayak dalam menanggapi dampak buruk yang tersirat dari film yang disaksikannya.

**Ketiga:** Kritik film bagi kultur sinema Indonesia yang masih berkembang sangat dibutuhkan sebagai gema atau umpan balik, sejauh mana sebuah karya film sebagai media mampu mentransformasikan amanat atau pesan pembuatnya. Hal ini sangat erat hubungannya dengan pembinaan kreativitas insan film Indonesia, karena ke-trampilan dan pengetahuan sinematografi bagi seorang pembuat film sebagai komunikator masih perlu ditingkatkan daya gunanya melalui berbagai pengalaman. Dalam hal ini kritisi film Indonesia adalah partner yang amat obyektif bagi sineas yang terus menerus berusaha meningkatkan mutu karya dan kemampuan kreatif pribadinya.

Sebagai partner yang obyektif, seorang kritisi film tentunya boleh diharapkan memiliki potensi persepsional yang mendasar pada kawruh dramatik dan sinematik, paling sedikit sejajar dengan potensi yang dimiliki oleh sineas yang menjadi subyeknya.

Memperhatikan kondisi mutu kritik film Indonesia dewasa ini, maka Dewan Juri dengan penuh antusias menyarankan agar:

1. Pemilihan kritik film terbaik dalam rangka penyelenggaraan FFI dapat dilembagakan sebagai kegiatan yang patut dilaksanakan secara periodik setiap tahun.
2. Frekuensi penyelenggaraan penataran kritisi film Indonesia ditingkatkan dan disempurnakan.

3. Dapat diciptakan kurikula penataran yang tidak terbatas pada bentuk klasifikal yang menggunakan metoda ceramah saja, tetapi hendaknya juga dikembangkan metoda studi analitis, pratika penulisan kritik dan metoda diskusi sebagai sarana interaksi edukasi yang aktif dan korektif.
4. Pimpinan Redaksi setiap media lebih memperhatikan tulisan kritik yang obyektif dan membangun, dengan memberi kolom yang lebih luas dan penghargaan yang lebih tinggi sebagai perangsang kreativitas dan dorongan untuk kemajuan.
5. Kerjasama dengan lembaga-lembaga ilmiah dan perguruan tinggi publisistik serta sinematografi ditingkatkan untuk melahirkan bibit unggul kritisi film Indonesia.

Akhirulcata, para anggota Dewan Juri Pemilihan Kritik Film Indonesia Terbaik 1982, menyadari apa yang dihasilkan dapat menimbulkan rasa kecewa bagi mereka yang tidak diunggulkan, suatu hal yang lumrah terjadi pada tiap pemilihan serupa ini. Dan tanggapan Dewan Juri tentang mutu penulisan kritik film Indonesia hendaknya sekedar menjadi bahan introspeksi dan retrospeksi. Dan diharapkan tidak memancing tanggapan emosional yang picik, sehingga maksud baik dari semua kegiatan kita yang sudah dimulai ini tidak berakhir pada antiklimak yang mengecewakan.

Ungkapan tersebut diatas sekaligus merupakan pertanggungjawaban Dewan Juri Kritik Film Terbaik Indonesia dalam FFI Tahun 1982 kepada Pimpinan Dewan Harian Dewan Film Nasional sesuai dengan butir nomor dua SK Dewan Harian Film Nasional No.32/DPH/1982.

#### PENULISAN KRITIK FILM TERBAIK:

##### **Bambang Pitoyo**

dalam **Harian Suara Karya** memperoleh hadiah Piala Khusus Haji Usmar Ismail, dengan nilai 207.

### JUARA HARAPAN I

**Muh. Rustandi Kartakusumah**  
dalam harian **Pikiran Rakyat**,  
terbitan Bandung, dengan nilai 205.

### JUARA HARAPAN II

**Zainal AN.**  
dalam **Harian Terbit**, Jakarta  
dengan nilai 202½

### JUARA HARAPAN III

**Haryono**  
dalam **Harian Merdeka**,  
dengan nilai 197½

### JUARA HARAPAN IV

**Marselli**  
dalam **Harian Kompas**,  
dengan nilai 192.

---

# LAPORAN DEWAN JURI FILM DOKUMENTER FFI 1982

Dengan S.K. Menteri Penerangan RI. No.132/Kep/Menpen/1982 kami bertiga telah ditunjuk sebagai Dewan Juri Film Dokumenter dalam FFI 1982. Atas kepercayaan yang dilimpahkan kepada kami untuk melaksanakan tugas penjurian ini, pertama-tama kami ingin menyampaikan terima kasih kami, demikian juga kepada masyarakat perfilman Indonesia lewat Dewan Film Nasional.

Dengan segala kemampuan dan itikad baik serta kesadaran dan tanggung jawab, kami telah tunaikan tugas tersebut.

Sebanyak 23 film dokumenter dari 11 peserta (produser film) telah dinilai oleh Dewan Juri pada tanggal 15 Juli, 16 Juli, 19 Juli, 20 Juli, 26 Juli dan berakhir pada tanggal 27 Juli 1982 di Jakarta.

Sebelum menyampaikan hasil penilaian, terlebih dahulu Dewan Juri Film Dokumenter merasa perlu menyampaikan beberapa pendapat dan catatan mengenai "Buku Putih" PEDOMAN DAN KETENTUAN FESTIVAL FILM INDONESIA (1982) sebagaimana disampaikan oleh Panitia FFI 1982 kepada Dewan Juri Film Dokumenter.

## 1. Ketentuan mengenai film dokumenter

Dalam "Buku Putih" (Pedoman dan Ketentuan FFI) pasal VI, ayat (2), diterangkan apa yang dimaksud

dengan film bukan film cerita, antara lain:

- a. film dokumenter;
- b. film pendek (short feature);
- c. film ilmu pengetahuan/pendidikan;
- d. film kartun;
- e. film yang tidak dapat digolongkan sebagai film cerita

Tetapi dalam pasal XII (Festival Film Dokumenter dalam FFI) diterangkan: Yang dimaksud dengan **film dokumenter** adalah **semua film-bukan-cerita** seperti yang tercantum dalam pasal VI ayat (2) Pedoman dan Ketentuan FFI.

Berhubung dengan keterangan dalam pasal XII ayat (2) itu jelas bahwa: bukan film dokumenter seperti disebut dalam pasal VI ayat 2.a. juga dikategorikan sebagai film dokumenter. Hal ini menyulitkan penilaian Dewan Juri Film Dokumenter. Karena itu Dewan Juri terpaksa membatasi diri.

## 2. Penghargaan.

Dalam pasal XV (Penghargaan) ditentukan bahwa:

1. Penghargaan atas film dokumenter terbaik diberikan dalam bentuk Piala dan Surat Penghargaan.
2. Untuk penilaian khusus diberikan Piala Penghargaan khusus.

Tidak ada satu pasal atau kalimat yang menerangkan kemungkinan pemberian Piala Citra bagi film dokumenter, sedangkan menurut keterangan yang diberikan kepada Dewan Juri bahwa untuk film dokumenter terbaik diberikan hanya 1 (satu) Piala Citra.

Dalam pada itu menurut pasal XIV ayat (7) diterangkan:

Dalam melaksanakan penilaian Dewan Juri memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Pembagian menurut kelompok sifat-sifat utama film dokumenter, seperti :

- dokumenter penerangan,
- pendidikan,
- kebudayaan,
- sketsa sosial,
- sketsa pribadi/tokoh,
- industrial,
- animasi,
- eksperimental (subyective film),
- cerita pendek (short feature).

Juga cara pengelompokan ini bagi Dewan Juri menyulitkan untuk menentukan kepada siapa Piala Citra paling tepat harus diberikan. Dalam keadaan demikian, Dewan Juri memutuskan: **Tidak memberikan Piala Citra untuk Film Dokumenter.**

### Evaluasi Umum

Kemajuan dalam memproduksi film dokumenter kelihatan meningkat, walaupun sebagai akibat dari belum adanya ketentuan mengenai film dokumenter secara mantap ditemui kesimpang-siuran.

Bagi sang pembuat film dokumenter pada hakekatnya ia melakukan suatu "creative treatment of actua-

lity". Yang harus dipentingkan adalah tema atau misi dengan bahan-bahan yang ada. Ini semua harus disajikan sejelas dan sesingkat mungkin, dan cepat pula dapat ditangkap tanpa banyak komentar. Segi-segi lainnya betapapun menariknya secara filmis, bila akan dapat merusak tema utamanya, harus dihindari.

Demikian juga unsur dan sarana teknik, betapapun unggulnya tidak dibenarkan mengenyampingkan, tema film dokumenter.

Atas pertimbangan bahwa apa yang disajikan dalam film dokumenter itu harus jelas, tegas dan mengesankan, maka faktor panjang-pendeknya film dokumenter merupakan faktor yang penting. Sekiranya tema sudah jelas, yang paling ideal: Panjang film **tidak** lebih dari dari 10 -30 menit, atau dua-tiga reel.

### Ukuran Film

Ukuran film (film-gauge) 16 mm atau 35 mm, ditambah lagi dengan penggunaan lensa cinemascope, juga menyulitkan bagi penilaian yang obyektif. Berdasarkan alasan-alasan di atas, Dewan Juri Film Dokumenter telah mengambil keputusan sebagai berikut:

- Dewan Juri **tidak** memberikan Piala Citra kepada film dokumenter terbaik, karena tidak tercantum dalam pasal XV Pedoman dan Ketentuan FFI 1982 mengenai Penghargaan.
- Dewan Juri memberikan kepada **2 film dokumenter: Piala Khusus dan Surat Penghargaan.** sedangkan kepada **5 film dokumenter** lainnya diberikan: **Surat Penghargaan.**

**KEPUTUSAN DEWAN JURI FILM DOKUMENTER  
FESTIVAL FILM INDONESIA 1982**

**Piala khusus dan Surat Penghargaan.**

Diberikan kepada: I. P.T. GOLDEN TOPAZ FILM COMPANY.

Judul film : SEMEN INDONESIA  
Unsur film : **Industrial.**

II. P.T. AVISARTI CORPORATION  
Judul film : CORAL GARDEN OF  
THE BANDA SEA.

Unsur film : **Kebudayaan.**

**5 (lima) buah Surat Penghargaan.**

Diberikan kepada:

1. P.P.F.N.  
Judul film : LEMBAH WALLANAE  
Unsur film : **Kebudayaan.**
2. KOFINA  
Judul film : FAJAR DI SULAHAN  
Unsur film : **Sketsa sosial.**
3. P.T. PRATHIVI KARTIKA FILM  
Judul film : KELAHIRAN PESUT  
Unsur film : **Pendidikan.**

4. P.T. GOLDEN TOPAZ FILM COMPANY.

Judul film : DERAP INDUSTRI  
ALAM LESTARI.

Unsur film : **Sketsa sosial.**

5. P.T. AVISARTI CORPORATION.

Judul film : THE BIRD ISLAND

Unsur film : **Kebudayaan.**

**Jakarta, 11 Agustus 1982**

**DEWAN JURI FILM DOKUMENTER  
FESTIVAL FILM INDONESIA 1982**

ttd.

R. M. Soetarto

Ketua

ttd.

Soemarmo

Anggauta

ttd.

Ny. Maria Ulfah Soebandio, S.H.

Anggauta

**GABUNGAN PENGUSAHA BIOSKOP  
SELURUH INDONESIA  
(G.P.B.S.I.)**

**No.015/GPBSI/KPTS/1982**

Surat Keputusan tentang pemberian Piala Haji Antemas kepada Film Nasional yang berhasil meraih angka penonton tertinggi sepanjang tahun 1981.

Mengingat : Tradisi pemberian Piala Antemas dari GPBSI kepada Film Nasional yang berhasil meraih angka penonton tertinggi sepanjang tahun pada kesempatan diselenggarakannya FFI.

Menimbang : 1. Berdasarkan angka-angka penonton Film Nasional yang diberikan oleh P.T. Perfin Pusat, Film **Pinter-pinter Bodoh** menduduki urutan pertama, baik di Jakarta maupun di daerah-daerah.

2. Berdasarkan deteksi terhadap banyaknya film berjudul **Pinter-pinter Bodoh** dibicarakan oleh masyarakat ramai.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: Film Nasional berjudul: **PINTER-PINTER BODOH**  
Produksi: P.T. PARKIT FILM, Jakarta ditetapkan sebagai Film Nasional yang berhak menerima Piala H. Antemas untuk tahun 1981.

Jakarta, 14 Agustus 1982.

**GABUNGAN PENGUSAHA BIOSKOP  
SELURUH INDONESIA  
(G.P.B.S.I.)**

Stempel

ttd.

H.M. AHADIN  
Ketua Umum.

ttd.

M.J. TJASMADI  
Sekjen.



## LAPORAN DEWAN JURI FILM CERITA FFI TAHUN 1982

Dewan Juri Film Cerita Festival Film Indonesia 1982 mengucapkan terimakasih kepada dunia film Indonesia yang telah memberikan kepercayaan untuk melaksanakan tugas penjurian. Penunjukan Dewan Juri oleh Menteri Penerangan berdasarkan usul seluruh komponen perfilman nasional kita merupakan pegangan bagi Dewan Juri untuk menjalankan tugasnya yang hakekatnya merupakan tindak lanjut tugas yang telah diberikan kepada Komite Pengaju Unggulan yang telah menyeleksi 62 film untuk diunggulkan dari segi unsur film dan film secara utuh. Sesuai Surat Keputusan Menteri Penerangan mengenai penunjukan Dewan Juri Film Cerita dalam FFI 1982, maka Dewan Juri bertanggung jawab kepada Menteri Penerangan. Ditinjau dari sudut Dewan Juri Film Cerita dalam festival film ini mencakup unsur perfilman, pendidikan, jurnalistik, musik dan komunikasi sosial.

Tugas Dewan Juri kali ini berbeda dengan tugas Dewan-dewan Juri sebelumnya, ialah memilih satu unggulan terbaik dari sejumlah unggulan yang terdapat dalam 17 film yang telah diajukan oleh Komite Pengaju Unggulan dari sebanyak 62 film produksi tahun 1981-1982.

Berdasarkan dokumen yang telah diterima oleh Dewan Juri dari Badan Pelaksana FFI-1982 perincian unggulan tercatat sebagai berikut:

1. Penyuteradaraan : diunggulkan dalam lima film.
2. Penulisan skenario : diunggulkan dalam empat film.
3. Sinefotografi : diunggulkan dalam lima film.
4. Penyuntingan : diunggulkan dalam tiga film.
5. Penataan musik : diunggulkan dalam tiga film.
6. Penataan artistik : diunggulkan dalam lima film.
7. Teknik suara : tidak ada unggulan.
8. Peran Utama Pria : diunggulkan dalam tiga film.
9. Peran Utama Wanita : diunggulkan dalam empat film.
10. Peran Pembantu Pria : diunggulkan dalam lima film.
11. Peran Pembantu Wanita : diunggulkan dalam empat film.
12. Cerita asli untuk film : diunggulkan empat film.
13. Film secara utuh : diunggulkan empat film.

Seluruh unggulan tersebut terdapat dalam 17 film yang telah diajukan oleh Komite Pengaju Unggulan.

Selain memilih unsur film terbaik dan film secara utuh terbaik untuk memperoleh Piala Citra, maka Dewan Juri sesuai ketentuan tertulis berwenang pula memilih unsur terbaik untuk memperoleh Penghargaan khusus.

Demikianlah batas-batas pelaksanaan tugas Dewan Juri

Film Cerita dalam festival ini.

Ke-tujuhbelas film dengan unggulan-unggulan yang ditetapkan oleh Komite Pengaju Unggulan tersebut telah dinilai oleh Dewan Juri selama tiga minggu, meliputi masa menjelang akhir bulan Juli sampai menjelang pertengahan bulan Agustus ini.

Mengingat, bahwa Komite Pengaju Unggulan terdiri dari segenap unsur teknis dunia perfilman, maka Dewan Juri berpendapat bahwa hal-hal yang telah diunggulkan tidak perlu diragukan segi-segi teknis perfilmanya. Namun, disebabkan pengetahuan, pengamatan, pengalaman, pandangan, pertukaran pikiran dalam diskusi, maka para anggota Dewan Juri di dalam melakukan tugas ternyata tidak dapat menempatkan diri sebagai penonton semata-mata sehingga segi-segi teknis pun tidak luput dari pengamatan maupun penilaiannya.

Hasil pengamatan dan penilaian 17 film unggulan dimusyawarahkan oleh Dewan Juri dalam berbagai tahap melalui diskusi cukup mendalam. Meskipun diusahakan untuk berkonsensus sejauh mungkin, namun apabila perlu dilakukan penghitungan angka. Pada dasarnya pendekatan secara musyawarah dan pertanggungjawaban bersama (kolektif) mewarnai sidang-sidang Dewan Juri.

Dewan Juri pada umumnya menempuh pengamatan luas, dengan akal sehat yang dinamis, serta berusaha mewakili cita rasa yang tidak semata-mata melihat film secara teknis filmis belaka, melainkan juga sebagai sajian batiniah yang mengandung dan mampu mengetengahkan nilai-nilai luhur dan bahkan dapat pula memperkaya cita rasa itu sendiri.

Setelah menyaksikan 17 film yang telah diunggulkan Komite Pengaju Unggulan, Dewan Juri mencatat peningkatan tiga hal, yaitu:

— pertama : pengajian secara teknik-sinematografik dan penuturan secara filmis yang komunikatif.

— Kedua : kecenderungan lebih jelas ke arah pemilihan tema, penggarapan kedalaman isi cerita.

— Ketiga : orisinalitas cerita mulai dipersoalkan dan mendapat perhatian tersendiri.

Dalam hubungan ini Dewan Juri turut bergembira bersama dunia perfilman Indonesia, karena kini kita bersama mencatat adanya usaha-usaha pembaharuan pendekatan tema, isi, maupun cara penyajian mengarah kepada terwujudnya film nasional yang dijiwai nilai budaya dan pendidikan.

Di balik itu Dewan Juri berpendapat betapa telah cukup majunya kemampuan dalam cara mengungkapkan isi maupun dalam cara penyajian, namun kiranya masih perlu mendapat perhatian lebih mendalam lagi dari dunia perfilman kita kemampuan memilih hal-hal yang hendak disajikan.

Dewan Juri berharap agar tahap penguasaan ketrampilan yang cukup baik itu, diikuti tahap berikutnya, yaitu lebih menitikberatkan masalah kepada hal-hal yang ingin dituturkan. Selain tema, isi yang berbobot, logika, rasio, proporsi serta harmoni perlu memperoleh perhatian.

Selain itu pendekatan secara artistik tampak masih perlu dikembangkan, termasuk pendekatan di bidang musik.

Sebagai catatan tambahan dikemukakan, bahwa disana-sini masih tampak adanya dominasi komersialisme dalam beberapa film yang kita saksikan. Dengan menyadari sepenuhnya bahwa produksi film memerlukan modal tidak kecil, namun alangkah besar hati kita semua bilamana motif komersialisme itu dikelak kemudian hari dapat makin "diperhalus" dengan makin mampu kita memilih hal yang hendak kita sampaikan kepada penonton yang didukung oleh cara penyampaian terpertanggungjawabkan secara moral.

Demikianlah beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Dewan Juri.

Dewan Juri turut memberikan penghargaan kepada semua pihak yang telah ikut serta sebagai peserta dalam

Festival Film Indonesia tahun ini.  
Terima kasih.

Jakarta, 14 Agustus 1982.

Ketua

ttd

**SJAMSOE SOEGITO**

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN JURI  
FESTIVAL FILM INDONESIA TAHUN 1982  
No.: 01/KEP/DJ/FFI/1982**

tentang

**HASIL PENILAIAN FILM-FILM CERITA YANG  
DIKUTSERTAKAN DALAM FESTIVAL FILM INDONESIA  
TAHUN 1982 DI JAKARTA**

**DEWAN JURI  
FILM CERITA DALAM FESTIVAL FILM INDONESIA  
TAHUN 1982**

**Mengingat:**

1. Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No.131/KEP/MENPEN/1982, tentang PENUNJUKAN DEWAN JURI FILM CERITA DALAM FESTIVAL FILM INDONESIA TAHUN 1982 DI JAKARTA;
2. PEDOMAN DAN KETENTUAN Festival Film Indonesia 1982.

**Memperhatikan:**

1. Pertimbangan-pertimbangan yang telah disampaikan oleh Ketua Dewan Harian Dewan Film Nasional dalam sidang bersama DH. DFN, BAPEL – FFI dan Dewan Juri tanggal 27 Juli 1982.
2. Pertimbangan-pertimbangan yang telah disampaikan oleh para anggota dalam Sidang-sidang Dewan Juri;
3. Surat POKJATAP-FFI 1982 kepada Ketua BAPEL-FFI 1982 tanggal 10 Agustus 1982 No.525/DPH/

K/1982 dan Surat BAPEL-FFI kepada Ketua Dewan Juri Film Cerita tanggal 10 Agustus 1982 nomor: 16/YFI/VII/1982;

4. 17 (tujuh belas) film cerita yang diajukan oleh Komite Pengaju Unggulan yang disaksikan oleh Dewan Juri selama masa penilaian dari tanggal 28 Juli s/d 7 Agustus 1982.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan:**

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN JURI FILM CERITA  
DALAM FESTIVAL FILM INDONESIA TAHUN 1982  
TENTANG HASIL PENILAIAN FILM-FILM CERITA  
YANG DIKUTSERTAKAN DALAM FESTIVAL FILM  
INDONESIA TAHUN 1982 sebagai berikut:**

**Pertama:**

**Menentukan:**

1. Unsur film dan film terbaik yang dinyatakan memperoleh Hadiah Citra ialah unsur film dan film tersebut dalam Lampiran I, Surat Keputusan ini.

2. Unsur film yang dinyatakan memperoleh Penghargaan Khusus ialah unsur film tersebut dalam Lampiran II Surat Keputusan ini.

Kedua:

Menyerahkan Keputusan Dewan Juri kepada Menteri Penerangan untuk diumumkan dalam Festival Film Indonesia tahun 1982 di Jakarta sesuai ketentuan yang berlaku.

SJAMSOE SOEGITO

Ketua

ttd.

W. SILITONGA

Anggauta

ttd.

H. MISBACH YUSA BIRAN

Anggauta

ttd.

PROF. DR. WINARNO SURAKHMAD, MSc.Ed.

Anggauta

Ketiga:

Surat Keputusan ini tidak dapat diganggu-gugat.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A  
PADA TANGGAL : 14 AGUSTUS 1982

DEWAN JURI FILM CERITA DALAM  
FESTIVAL FILM INDONESIA TAHUN  
1982

ttd.

WINARTA ADISUBRATA

Sekretaris

ttd.

KI SURATMAN

Anggauta

ttd.

BINSAR SITOMPUL

Anggauta

**KEPUTUSAN DEWAN JURI FILM CERITA  
DALAM FESTIVAL FILM INDONESIA 1982**

**No. 01/KEP/DJ/FFI/1982**

**PARA PEMENANG CITRA UNTUK FILM CERITA FFI - 1982**

**Daftar Unsur Film dan Film terbaik:**

- |                   |  |                            |                            |
|-------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| 1. Penyutradaraan |  | Dalam Film                 | : "Serangan Fajar"         |
| Sutradara         | : Arifin C. Noer                         | Produksi                   | : PPFN.                    |
| Dalam Film        | : "Serangan Fajar"                       | 7. Teknik Rekaman Suara    |                            |
| Produksi          | : PPFN.                                  | Nihil                      |                            |
| 2. Skenario       |  | 8. Peran Utama Pria        |                            |
| Penulis Skenario  | : Asrul Sani                             | Nama                       | : Zainal Abidin            |
| Dalam Film        | : "Bawalah Aku Pergi"                    | Dalam Film                 | : "Putri Seorang Jenderal" |
| Produksi          | : Bola Dunia Film                        | Produksi                   | : Sanggar Film             |
| 3. Sinefotografi  |  | 9. Peran Utama Wanita      |                            |
| Juru Kamera       | : Akin                                   | Nama                       | : Jenny Rachman            |
| Dalam Film        | : "Jangan Ambil Nyawaku"                 | Dalam Film                 | : "Gadis Marathon"         |
| Produksi          | : Garuda Film                            | Produksi                   | : Tiga Sinar Mutiara Film  |
| 4. Penyuntingan   |  | 10. Peran Pembantu Pria    |                            |
| Penyunting        | : Norman Benny                           | Nama                       | : Maruli Sitompul          |
| Dalam Film        | : "Bukan Isteri Pilihan"                 | Dalam Film                 | : "Bawalah Aku Pergi"      |
| Produksi          | : Bola Dunia Film                        | Produksi                   | : Bola Dunia Film          |
| 5. Musik          |  | 11. Peran Pembantu Wanita  |                            |
| Penata Musik      | : Embie C. Noer                          | Nama                       | : Suparmi                  |
| Dalam Film        | : "Serangan Fajar"                       | Dalam Film                 | : "Serangan Fajar"         |
| Produksi          | : PPFN.                                  | Produksi                   | : PPFN.                    |
| 6. Tata Artistik  |  | 12. Cerita Asli Untuk Film |                            |
| Penata Artistik   | : Fred Wetik – Nahaly –<br>Farraz Efendy | Judul                      | : "Serangan Fajar"         |
|                   |  | Produksi                   | : PPFN.                    |

13. Film Secara Utuh  
Nama : "Serangan Fajar"  
Produksi : PPFN.

**PENGHARGAAN KHUSUS UNTUK FILM CERITA  
FFI-1982.**

Pemeran Anak-anak  
Nama : Dani Marsuni

Dalam Film : "Serangan Fajar"  
Produksi : PPFN.

Jakarta, 14 Agustus 1982

**K E T U A  
DEWAN JURI FILM CERITA  
DALAM FESTIVAL FILM INDONESIA 1982**

**SJAMSOE SOEGITO**

## PERLUNYA PERSIDANGAN MMPI TIAP TAHUN

**D**alam sambutannya pada acara pembukaan Sidang MMPI 1982, Sekjen MMPI, Mohammad Johan Tjasmadi melalui pertanyaannya sendiri mengemukakan; "apa perlunya Sidang-sidang Majelis Musyawarah Perfilman Indonesia diselenggarakan tiap tahun".

Tjasmadi menilai, sejalan dengan perkembangan jaman dan tumbuhnya berbagai macam ilmu pengetahuan dewasa ini, hubungan antar manusia dari tempat yang satu ke tempat yang lainnya sudah diperdekat melalui kemampuan teknologi mutakhir. Kemudahan hubungan itu sendiri membawa ke dalam lubuk bathin setiap manusia melalui berbagai cara.

Hal ini menurut Tjasmadi punya implikasi terhadap kehidupan antar bangsa, dimana ada kecenderungan masuknya bentuk "penjajahan" atas sikap-mental maupun ekonomi. Kalau pada abad yang lalu manusia tercekam oleh penjajahan fisik pada bangsa yang lemah oleh bangsa yang kuat. Hari ini justru tanpa disadari, penjajahan mental-sikap-ekonomi lebih berperan. Sesungguhnya ini jauh lebih berbahaya daripada penjajahan fisik, kata Tjasmadi.

Kita sudah memiliki usaha-usaha preventif untuk mencegah hal tersebut, tetapi usaha seperti itu tidaklah

cukup. Kita masih memerlukan sikap yang lebih realistik dan tidak semata bersifat verbal.

Sampai saat ini kita masih terpuak oleh anggapan bahwa usaha preventif lebih diperlukan demi menjaga menyelinapnya pengaruh bathiniah memasuki wilayah Republik Indonesia dengan cara antara lain: memagar betisi FILM melalui TAP II/MPRS/1960 yang menyatakan film bukan semata-mata barang dagangan dan seterusnya. Jadi usaha preventif ini baru dalam bentuk verbal.

Akibat daripadanya, maka film dibebani oleh tugas-tugas kultural edukatif dalam bentuk yang masih bersifat verbalisme, sementara bioskop yang menjadi tempat bertemunya film dengan penontonnya, juga masih dianggap sekedar tempat hiburan, yang oleh karenanya dianggap sampi perahan dimana segala macam dana boleh dan patut ditumpangkan ke dalam Harga Tanda Masuk.

Padahal berkali-kali Bapak Ali Moertopo mengingatkan, sifat kultural-edukatif yang melekat pada film itu bukan diartikan memberi beban kepada film untuk menerima tanggungjawab yang tidak terpikul, namun haruslah justru secara nonverbal disesuaikan dengan sifat hakiki "film" sebagai alat komunikasi yang menghibur



Artinya, menarik tetapi mempengaruhi ke arah yang baik. Dan jangan pula dilupakan kultur dalam arti kata yang luas, tentu saja justru memberi corak/warna ke-Indonesiaan dan barangkali juga sub kultur Indonesia yang berasal dari berbagai daerah untuk memberi dorongan terbentuknya kebudayaan nasional Indonesia yang bertolak dari berbagai sub kultur yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia.

Sebaliknya, tanpa film, bioskop juga tidak akan ada. Lalu bagaimana cara pengadaan film itu sendiri? Sudah wajar kalau pada kesempatan persidangan MMPI tahun ini, pikiran para peserta diharapkan terarah pada satu permasalahan yang sangat penting, yaitu film yang tidak sekedar barang dagangan, tetapi juga mempunyai bobot untuk dapat dimasukkan ke dalam GBHN.

Terakhir ditegaskan;

"Untuk itulah kita berkumpul pada hari ini dan hari-hari yang singkat dalam kurun waktu berlangsungnya FFI 1982, agar film tidak dilihat dari sudut glomornya yang mengundang orang mendakwa sebagai media hiburan saja, tetapi mari kita tengok intisari yang terkandung, untuk apa sebenarnya film dibuat dan apa manfaat film bagi penontonnya".

## **KONSEP TENTANG PERFILMAN INDONESIA UNTUK BAHAN GBHN 1983 – 1988**

### **I. PENDAHULUAN**

1. TAP MPRS No.II/MPRS/1960 lampiran A, angka I, Bidang Mental/Agama, Kerohanian/Penelitian, sub 16, adalah TAP MPRS RI pertama yang secara khusus menentukan politik pengarah dan perlindungan bagi perfilman Indonesia. TAP MPRS No.II tahun 1980 itu jelas telah menjuruskan arah pembinaan Perfilman Indonesia menjadi bagian dari kebijakan

pembinaan Pemerintah di bidang penerangan dan komunikasi massa. TAP MPRS tersebut juga telah mengantarkan Perfilman Indonesia pada jenjang kedudukan yang amat penting dalam perkembangan dan percaturan nasional.

2. TAP MPRS No. II/MPRS/1960 sebelum dicabut oleh TAP MPRS Nomor XXXVIII/MPRS/1968, telah melahirkan PENPRES No.1 tahun 1964, yang kemudian melalui Undang-undang No.5 tahun 1974 ditetapkan menjadi Undang-undang No.1/PNPS/1964.

Undang-undang No.1/PNPS/1964 menjadi satu-satunya induk dan dasar hukum berbagai kebijakan dan peraturan pemerintah Orde Baru di bidang pembinaan perfilman, meskipun belum sepenuhnya memenuhi aspirasi Orde Baru.

3. Pemerintah Orde Baru telah menempatkan perfilman nasional menjadi bagian integral dari perjuangan dan pembangunan nasional Bangsa Indonesia. Konsekuensinya ialah bahwa Pemerintah Orde Baru telah meleatakkan dan menentukan kebijakan pembinaannya pada asas kultural dan edukatif, sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No.115/KEP/MENPEN/1979 tanggal 17 Juli 1979 tentang Dewan Film Nasional.

4. Dari masa ke masa dalam proses kultural dan edukatif Bangsa Indonesia, kebutuhan sarana komunikasi massa yang bersifat audio visual ternyata terus menerus meningkat sesuai dengan tuntutan kiprah pembangunan nasional. Namun dalam kenyataan hidup sehari-hari, sarana komunikasi audio-visual itu di samping kemanfaatan yang positif, juga dapat menimbulkan berbagai dampak yang negatif.

5. Karena kemajuan teknologi, di samping film, sekarang sudah terdapat berbagai bentuk produk sinematografik dalam satu rumpun citra hidup (moving

image), di antaranya ialah televisi dan video. Oleh karena itu, maka dewasa ini film Indonesia tidak lagi menjadi sarana komunikasi massa audio-visual satu-satunya.

6. Film, televisi dan video, maupun bentuk-bentuk lain dari teknologi citra hidup yang dibuat dengan asas sinematografi, adalah potensi-potensi yang perlu ditangani secara terpadu.
7. Kehadiran serangkaian media komunikasi massa dari rumpun "citra hidup" di tengah masyarakat Indonesia, merupakan perkembangan mutakhir dalam kegiatan KOMUNIKASI SOSIAL, sehingga memerlukan ketentuan pengarah dan pembinaan yang berstrategi nasional untuk menghindarkan dampak negatifnya dan mempertinggi daya gunanya bagi Bangsa Indonesia yang sedang membangun MANUSIA INDONESIA seutuhnya.
8. Berdasarkan hal-hal tersebut dalam butir-butir di atas, maka Undang-undang No.1/PNPS/64 tidak lagi mampu menampung permasalahan Perfilman di Indonesia dewasa ini. Istilah Perfilman Indonesia tidak lagi memiliki pengertian yang sempit dalam ruang lingkup masalah Film saja, tetapi di dalam istilah itu sekaligus mencerminkan konotasi yang luas artinya untuk merangkum berbagai masalah sarana komunikasi massa audio-visual yang kini lazim disebut CITRA HIDUP di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

## II. ISI USUL DFN TENTANG PERFILMAN UNTUK BAHAN GBHN 1983 - 1988

Sesuai dengan perkembangan sarana komunikasi massa audio visual yang pesat serta peranannya yang makin penting dan memiliki dampak sosial budaya yang amat luas dalam kehidupan Bangsa Indonesia dari masa ke

masa, maka DEWAN FILM NASIONAL mengusulkan agar Perfilman Indonesia mendapatkan landasan baru dalam GBHN di bidang penerangan dan komunikasi sosial sebagai berikut:

1. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERFILMAN NASIONAL SEBAGAI KOMPONEN SISTEM KOMUNIKASI SOSIAL BERASAS KULTURAL EDUKATIF PERLU DITINGKATKAN SECARA SISTEMATIS DAN PRAGMATIS GUNA MENUNJANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT PANCASILA.
2. UNTUK MENJAMIN PERKEMBANGAN PERFILMAN NASIONAL SECARA KULTURAL EDUKATIF, DIPERLUKAN ADANYA UNDANG-UNDANG PERFILMAN INDONESIA YANG BARU.

## III. MOTIVASI USUL DEWAN FILM NASIONAL

Usul DFN tersebut pada Angka II, di samping memiliki latar belakang seperti yang teruraikan dalam PENDAHULUAN (tersebut pada Angka I) juga diperkuat dengan motivasi sebagai berikut:

### 1. Bidang Pendidikan

- a. Sebagai unsur teknologi komunikasi pendidikan, produk sinematografik yang bersifat audio visual memiliki kemampuan menampilkan atau menyajikan INFORMASI yang AUTENTIK dalam membentuk imajinasi pelajar, karena itu peranannya sebagai sarana pendidikan sangat tinggi daya gunanya untuk melengkapi dan menyempurnakan ke-manfaatan media pendidikan literer dan lisan.
- b. Program pendidikan seumur hidup, lebih-lebih yang bersifat massal di luar jalur pendidikan formal, dalam rangka mencapai tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa, memerlukan

media komunikasi pendidikan yang sanggup menjangkau massa yang luas. Dan dalam hal ini, sifat audio-visual dari teknologi sinematografi modern sangat berfaedah bagi massa yang belum mampu belajar dengan media literer (golongan masyarakat yang masih buta huruf).

## **2. Bidang Kebudayaan**

- a. Film, video, televisi dan lain-lain produk sinematografik, sebagai media komunikasi massa audio-visual bukan saja mengandung aspek teknologi dan ilmu pengetahuan, tetapi juga mengandung aspek budaya, sehingga sebagai produk budaya sangat potensial dalam menyajikan informasi dan menampilkan atau mencerminkan ciri-ciri kebudayaan bangsa, baik untuk kepentingan nasional maupun dalam komunikasi internasional.
- b. Sebagai unsur komunikasi nasional, kecuali sudah amat populer, film Indonesia dan produk sinematografik lainnya yang menggunakan bahasa Indonesia, penting artinya dalam rangka pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia.

## **3. Bidang Penerangan dan Komunikasi Sosial**

Pemanfaatan media komunikasi massa elektronika, terutama yang memiliki kapasitas audio-visual seperti film, televisi dan video, perlu ditingkatkan semaksimal mungkin. Terutama untuk memberikan informasi yang berbentuk konkret (tidak imajiner) bagi masyarakat yang tingkat kecerdasannya masih rendah.

Berkomunikasi dengan sarana audio-visual memudahkan kita untuk mencapai tingkat penghayatan informasi yang optimal, karena khalayak tidak perlu mereka-reka arti kalimat literer yang biasanya memerlukan pengetahuan tata bahasa tertulis.

## **4. Bidang Ekonomi**

Keberhasilan pengalakan ekspor di bidang perfilman, membuktikan film dan berbagai bentuk produk sinematografik Indonesia juga dapat dikembangkan menjadi komoditi ekspor non minyak bumi yang memiliki prospek ekonomi dan perspektif kultural yang jauh jangkauannya.

## **5. Bidang Politik Luar Negeri**

Ekspor dan penggunaan berbagai bentuk produk sinematografik Indonesia di dunia internasional, akan membantu menampilkan citra Indonesia yang baik sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, berharkat dan bermartabat. Oleh karena itu penggunaan berbagai bentuk produk sinematografik Indonesia di Luar Negeri sekaligus juga mendukung diplomasi perjuangan Bangsa Indonesia.

## **6. Bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Penelitian**

Sebagai sarana komunikasi dan ekspresi kebudayaan serta kesenian, film, video, televisi dan berbagai bentuk produk sinematografik dalam pembuatannya tidak hanya memerlukan kreatif yang bersifat informatif, artistik dan estetik, tetapi juga memerlukan dukungan sarana teknologi mutakhir dan ilmu pengetahuan yang luas. Oleh karena itu agar berbagai bentuk produk sinematografi Indonesia dapat berfungsi sebagaimana diharapkan, pengembangannya perlu ditingkatkan dan diselaraskan dengan perkembangan teknologi media elektronika lainnya.

Jakarta, 17 Juli 1982.

**Team Perumus USUL DFN  
UNTUK BAHAN GBHN/RANTAP MPR 1983  
DAN PERSIDANGAN MMPI 1982**

ttd.

Soemardjono  
Ketua Team.





*Menetri Dalam Negeri H. Amirmachmud menyampaikan sambutannya pada pembukaan Sidang MMPI 1982.*

*Kanan atas*

*Menteri Muda Abdul Gafur menjelaskan peranan film dalam rangka pembinaan generasi muda.*

*Kanan bawah*

*Rekjen MMPI H. Johan Tjasmadi menyampaikan pidato pembukaan pada Sidang MMPI.*







*Pekan diskusi apresiasi Film yang diselenggarakan dalam rangka FFI 1982.*

*Kiri tengah*

*Arifin C. Noer menjelaskan latar belakang pembuatan filmnya: "Suci Sang Primadona".*

*Kanan tengah*

*Syuman Jaya, Teguh Karya dan Hendrik Gozali pada forum diskusi.*

*Bawah :*

*Noerhadi Irawan, selaku moderator dalam acara diskusi tampak juga Arifin C. Noer.*



*Atas dari kiri ke kanan.*

*Tanda tangan Teguh Karya cukup laris.*

*Tanda tangan Tuty Soebadio, laku juga.*

*Arifin C. Noer diberondong pertanyaan seusainya diskusi.*



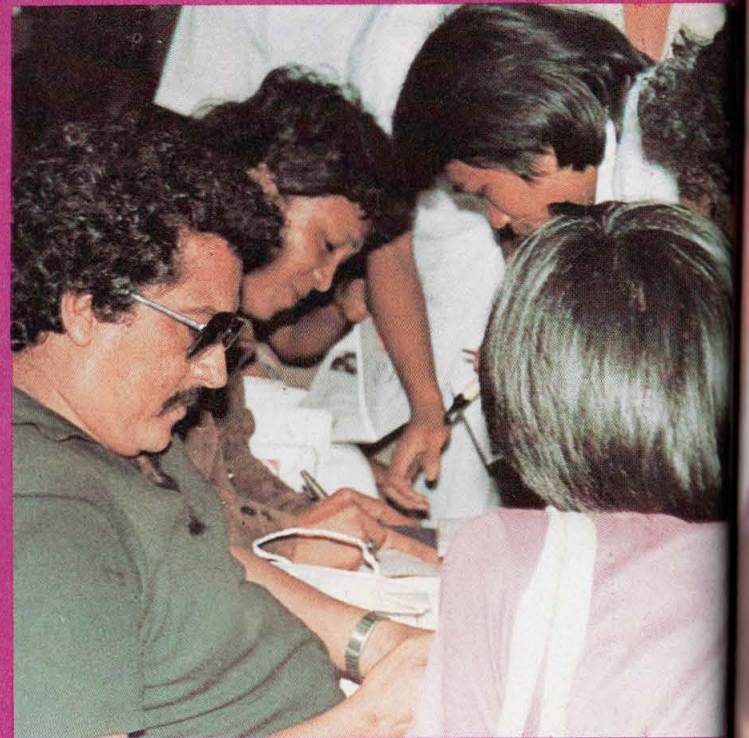
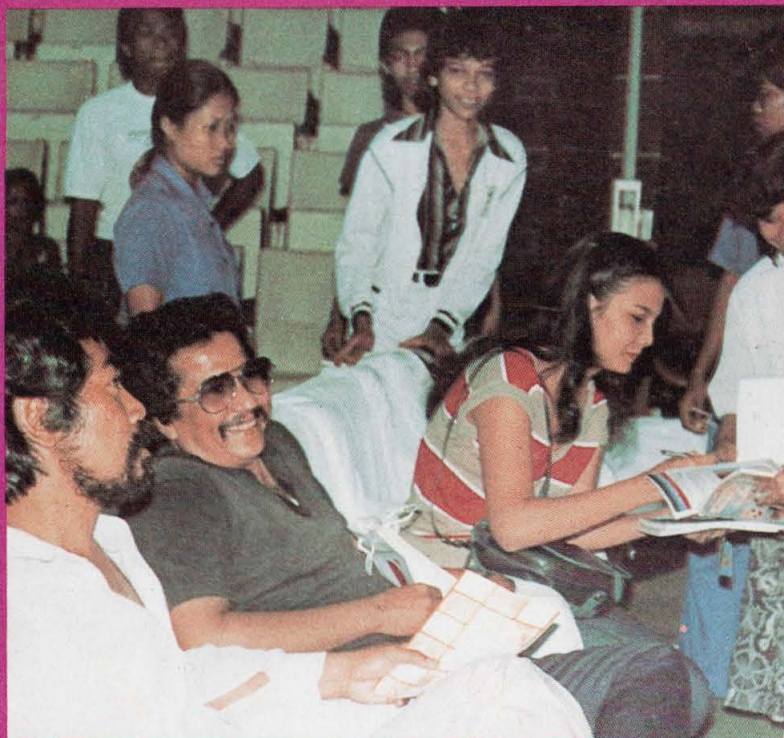
*Bawah dari kiri ke kanan.*

*Hajah Christin Hakim tak luput dari inceran penggemar tanda tangan.*

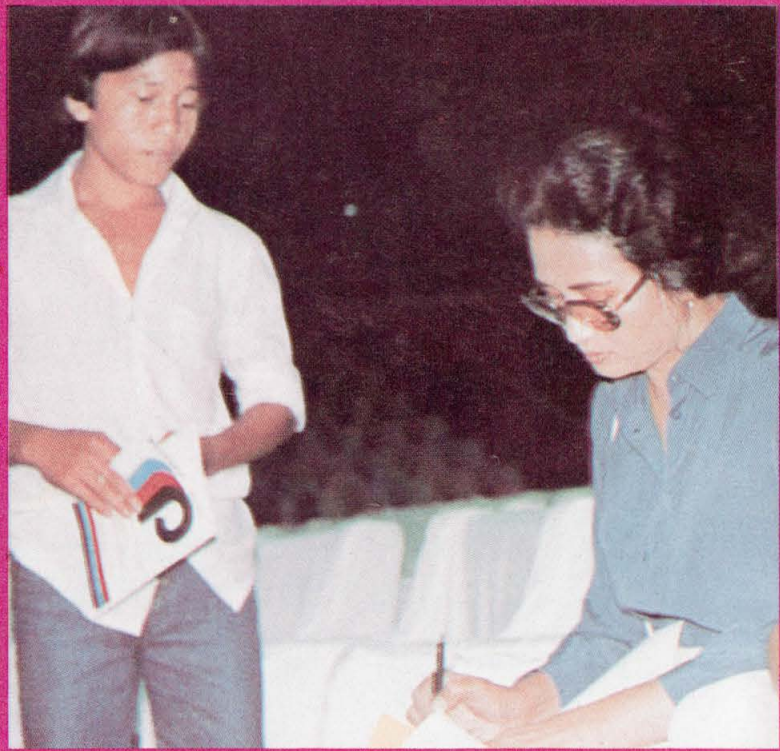
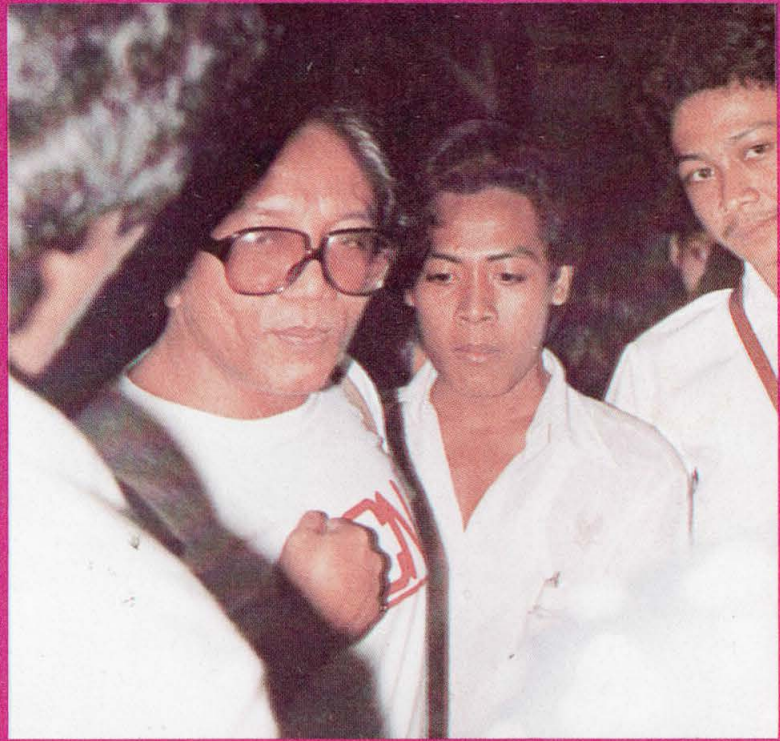
*Wahab Abdi dan Mangara Siahaan di serbu penggemarnya untuk tanda tangan.*

*Ike Soepomo, penulis novel yang hanya menjadi film "Kabut Sutra Ungu" diserbu peminatnya.*

*Ade Irawan, tanda tangannyapun digemari.*









*Direktur TV-RI Drs. H. Soebrata (ketiga dari kanan) hadir di antara para undangan pada acara Pembukaan MMPI di Gedung Dewan Pers, Jakarta, 9 Agustus 1982.*



*Ny. Maria Ulfah dan Sjae Soe Soegito hadir pada acara Pembukaan FFI 1982 di Balai Sidang Senayan Jakarta.*



*Menteri Penerangan Ali Moertopo dan Acub Zainal sebelum Bidang MMPI dimulai.*

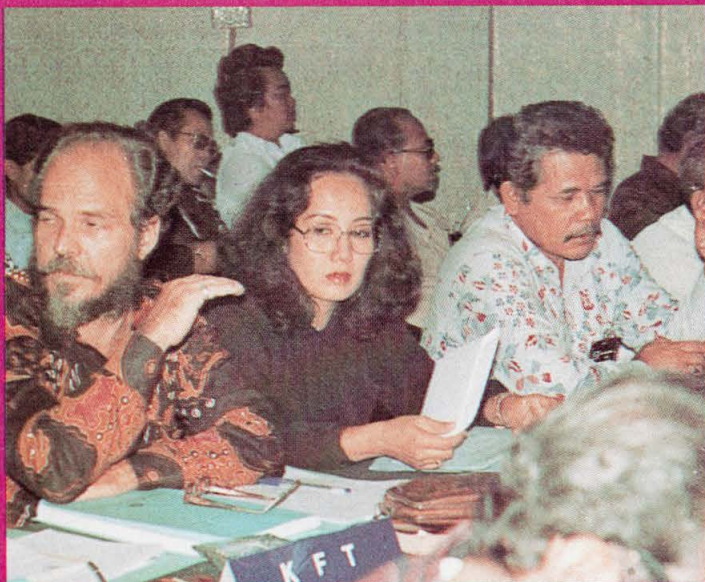
*Kanan atas*

*H. Johan Tjasmadi, Sekjen MMPI, Acub Zainal, Wakil Sekjen II, Prof. H. Amura, Wakil Sekjen I dan Soemardjono, bekas Sekjen MMPI dan anggota kehormatan MMPI satu-satunya.*

*Kanan bawah*

*Drs. Bumadi, Acub Zainal, H. Amura sedang mendengarkan penjelasan Drs. Asrul Sani, Ketua Dewan Harian Dewan Film Nasional tentang penyelenggaraan FFI 1982.*

*h Sjam  
pada  
1982  
enayan*



*Peserta Sidang MMPI dan unsur KFT dan PARFI.*



*Dirjen RTF Drs Sumadi menerima kenang-kenangan dari salah satu orang peserta Sidang MMPI.*

Aktres Yessy Gusman bersama Sutradara Film "Tali Merah Perkawinan."



Peserta Bidang MMPI dari unsur BAPFIDA



*Pekan Apresiasi Film mendapat perhatian besar dari kalangan pelajar dan mahasiswa*





*Yenny dengan Piala Citranya.*



*Kanan atas :*

*Yenny terharu dan tidak mampu menahan rasa bahagianya setelah meraih Piala Citra FFI 1982.*

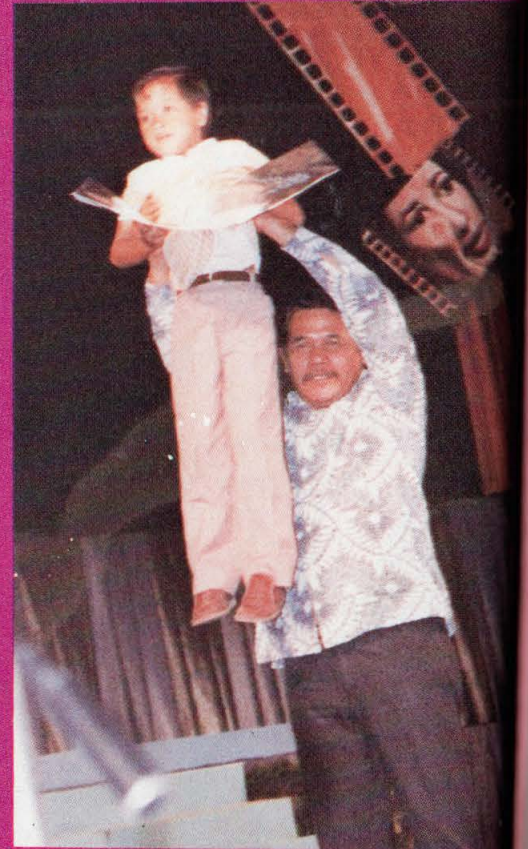
*Kanan bawah :*

*Yenny Rachman merenggut Piala Citra sebagai Pemeran Wanita Terbaik dalam FFI 1982.*





*G. Dwipayana diabadikan bersama Menper Ali Moertopo Ibu Ali Moertopo dan Toerino Djoenaidi*

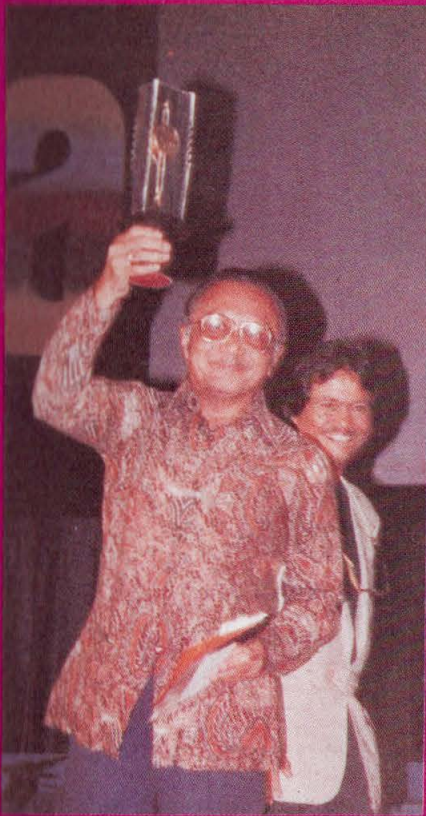


*Koesno mengangkat sang bocah sebagai luapan kegembiraannya.*



*Pemeran anak-anak terbaik dalam Film "Serangan Fajar" direnggut bocah Dani Marsuni di dampingi aktor Koesno Soedjarwadi.*





*Drs. Asrul Sani, memenangkan Piala Penulis Scenario Terbaik FFI 1982.*

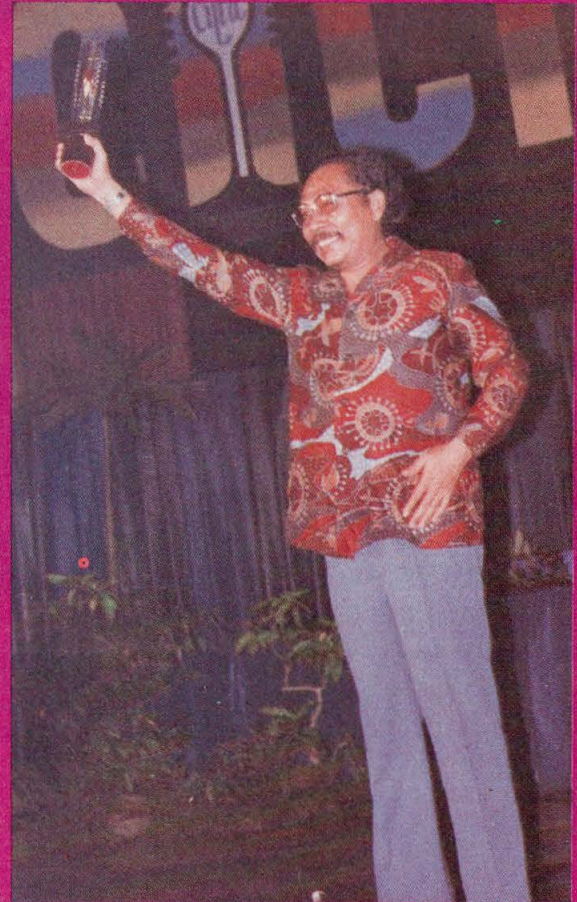


*Penyunting Terbaik diraih oleh Norman Benny pada FFI 1982.*

*Peraih Citra Peran Pembantu Pria Terbaik, Maruli Sitompul.*



*Pemeran Pembantu Wanita Terbaik dalam Film "Serangan Fajar", dimenangkan oleh Ny. Suparmi.*





*Produser Gatot dan Lenny Marlina hadir ditengah-tengah para undangan pada acara penutupan FFI 1982.*



*Para undangan pada acara Penutupan FFI 1982. Di-antaranya tampak hadir Direktur Publikasi Willy Laluyan beserta Nyonya (keempat dan ketiga) dari kanan.*



*Sejumlah aktor/aktris serta perwakilan negara-negara sahabat di Jakarta turut hadir pada acara Penutupan FFI 1982.*





*Wakil Presiden Adam Malik memukul gong sebagai tanda dimulainya Festival Film Indonesia di Balai Sidang Senayan, 9 Agustus 1982.*

*Inset*

*Menteri Penerangan Ali Moertopo menjabat tangan Wakil Presiden setelah acara pembukaan FFI 1982.*



*Ketua Dewan Juri FFI 1982 Sjamsoe Soegito membacakan keputusan Dewan Juri tentang para pemenang FFI 1982 pada acara penutupan FFI 1982.*



*Ketua Dewan Juri menyampaikan Surat Keputusan hasil-hasil Penilaian Dewan Juri FFI 1982 kepada Menpen Ali Moertopo.*



*Menpen menyampaikan sambutannya pada acara Penutupan FFI 1982.*

*Ibu Ali Moertopo menyerahkan Piala Citra kepada G. Dwipayana, mewakili Arifin C. Noer sutradara Film "Serangan Fajar" yang meraih sebagai sutradara Terbaik FFI 1982.*

*Bawah kanan :  
Menpen Ali Moertopo menyerahkan Piala Citra kepada G. Dwipayana Produser Film "Serangan Fajar" dalam FFI 1982.*

*M.C. mempersilahkan para pemenang untuk tampil ke atas pentas untuk menerima Piala FFI 1982.*





*Kelompok koor yang melambangkan Keaneka ragaman Nusantara tampil dengan busana daerah masing-masing.*



*Koor pelajar ibu kota yang turut memeriahkan acara Penutupan FFI 1982.*

*Kelompok koor Nusantara dengan pakaian daerah masing-masing menyumbangkan lagu pada acara Penutupan FFI 1982.*





Jakarta, 3 Agustus 1982

No. : 515/DPH/K/82.  
Hal. : Term of Reference  
Sidang MMPI 1982.  
Lamp. : 1 (satu) berkas.

Kepada Yth:  
Sekretaris Jenderal MMPI  
di  
J a k a r t a .

Dengan hormat,

Sesuai dengan permufakatan kita sebelumnya, **terlampir** kami sampaikan naskah "USUL DEWAN FILM NASIONAL TENTANG PERFILMAN INDONESIA UNTUK BAHAN GBHN 1983-1988" untuk dapat dijadikan sebagai Term of Reference (TOR) dalam persidangan MMPI 1982.

Dalam meneruskan TOR tersebut kepada para peserta Sidang MMPI 1982 hendaknya dijelaskan bahwa naskah itu merupakan hasil Team Perumus Garis-garis Besar Pembinaan dan Pengembangan Perfilman Nasional/Komisi Idiil, Dewan Film Nasional.

Demikian agar Saudara maklum dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

DEWAN HARIAN  
DEWAN FILM NASIONAL  
Sekretaris,

ttd.  
( H. Johardin )

Tembusan: Kepada Yth.

1. Bapak Ketua Dewan Film Nasional (sebagai laporan).
2. Bapak Dirjen RTF;
3. Sdr. Ketua Komisi Idiil DFN;
4. Sdr. Ketua Team Perumus GBPPN;
5. Para Anggota Dewan Harian DFN;
6. Sdr. Direktur Pembinaan Film;
7. A r s i p .

**SURAT KEPUTUSAN DEWAN HARIAN  
DEWAN FILM NASIONAL  
No. 31/KEP/DPH/1982**

tentang

**PEMBENTUKAN TEAM PERUMUS  
GARIS-GARIS BESAR PEMBINAAN PERFILMAN NASIONAL  
SEBAGAI BAHAN UNTUK SIDANG MMPI 1982 DAN RANTAP MPR 1983**

PIMPINAN DEWAN HARIAN  
DEWAN FILM NASIONAL,

**Menimbang:**

- a. bahwa perfilman nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, dan oleh karenanya pembinaan serta pengembangannya harus sesuai dengan arah, strategi dan tujuan pembangunan;
- b. bahwa pembinaan dan pengembangan perfilman nasional harus diarahkan kepada terwujudnya film Indonesia yang kultural edukatif, sehingga dapat memenuhi fungsinya sebagai alat hiburan, penerangan dan pendidikan dalam rangka pembangunan nasional;
- c. bahwa sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan perfilman nasional, dipandang perlu untuk merumuskan Garis-garis Besar Pembinaan Perfilman Nasional untuk dibahas dalam Sidang MMPI 1982 dan disusun sebagai bahan RANTAP MPR 1983, agar pembangunan perfilman nasional benar-benar tidak terpisahkan dari pembangunan nasional;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut c, dipandang perlu untuk membentuk Team Perumus Garis-garis Besar Pembinaan Perfilman Nasional sebagai Bahan Untuk Sidang MMPI 1982 Dan RANTAP MPR 1983.

**Mengingat:**

1. Undang-undang No.1/Pnps/1964;;
2. Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No.11/KEP/MENPEN/1979;
3. Surat Keputusan Menteri Penerangan No.20/KEP/MENPEN/1979;
4. Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No.70/KEP/MENPEN/1979.

**Memperhatikan:**

Saran dan pendapat Komisi Idiil, Dewan Film Nasional

## MEMUTUSKAN :

### Menetapkan:

SURAT KEPUTUSAN DEWAN HARIAN DEWAN FILM NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TEAM PERUMUS GARIS-GARIS BESAR PEMBINAAN PER-FILMAN NASIONAL SEBAGAI BAHAN UNTUK SIDANG MMPI 1982 DAN RANTAP MPR 1983, sebagai berikut:

### Pertama:

Membentuk Team Perumus Garis-garis Besar Pembinaan Perfilman Nasional, selanjutnya disebut Team Perumus GBPPN, dengan susunan keanggotaan yang namanya tersebut dalam kolom 2, dengan jabatan sebagaimana tersebut dalam kolom 3 pada Lampiran Surat Keputusan ini.

### Kedua:

Team Perumus tersebut dalam diktum pertama bertugas menyusun/merumuskan:

1. Term of Reference (TOR) yang menampung berbagai masalah perfilman nasional sebagai bahan masukan yang akan dibahas lebih lanjut pada Sidang MMPI 1982 di Jakarta.
2. Materi mengenai berbagai tugas dan usaha pembinaan serta pengembangan perfilman nasional secara ringkas dan padat untuk diusulkan kepada Badan Pekerja MPR sebagai bahan pertimbangan untuk dapat dimasukkan dalam RANTAP MPR 1983.

### Ketiga:

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas kerja Team Perumus tersebut diktum kedua dibebankan pada Anggaran Dewan Film Nasional.

### Keempat:

Dalam pelaksanaan tugasnya Team Perumus bertanggung jawab kepada Dewan Harian Dewan Film Nasional.

### Kelima:

Apabila dipandang perlu, Team Perumus dapat dilengkapi dengan tenaga konsultan ahli.

### Keenam:

Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 22 Juni 1982

## DEWAN HARIAN DEWAN FILM NASIONAL:

K e t u a,

ttd.

(Drs. Asrul Sani)

Sekretaris,

ttd.

(H. Johardin)

**Tembusan:** Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Penerangan RI selaku Ketua Dewan Film Nasional;
2. Direktur Jenderal Radio-TV-Film;
3. Para Anggota Dewan Film Nasional;
4. Direktur Pembinaan Film;
5. Sekretaris Jenderal MMPI;
6. A r s i p.

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN DEWAN HARIAN  
DEWAN FILM NASIONAL

NOMOR : 31/KEP/DPH/1982

TANGGAL: 22 JUNI 1982

SUSUNAN TEAM PERUMUS MENGENAI PERFILMAN  
NASIONAL SEBAGAI BAHAN UNTUK SIDANG MMPI  
DAN RANTAP MPR 1983

No.	NAMA	JABATAN
1.	Soemardjono	K e t u a
2.	B.M. Said	Sekretaris bukan Anggota
3.	Sjamsoe Soegito	Anggota
4.	Prof. DR. Winarno Surakhmad M.Sc.	Anggota
5.	Ny. Aisyah Amini, SH.	Anggota
6.	Krissantono	Anggota

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 22 JUNI 1982

DEWAN HARIAN  
DEWAN FILM NASIONAL

Ketua,

Sekretaris,

( Drs. Asrul Sani )

( H. Johardin )

# PANDANGAN PARA PEJABAT TENTANG PERFILMAN INDONESIA

## LIMA TAHUN BERSAMA MASYARAKAT FILM INDONESIA

Menteri Penerangan, Ali Moertopo

### Pengantar :

**S**elama lima tahun menjabat Menteri Penerangan banyak sudah suka duka yang dialami Ali Moertopo dalam membina perfilman di Indonesia. Untuk mengungkapkan kesan-kesannya, saat memberi sambutan pada acara penutupan Sidang Majelis Musyawarah Perfilman Indonesia di Jakarta, beliau membagi pembicaraan dalam lima bagian sesuai dengan urutan tahun tiap kali FFI diselenggarakan.

*"Karena ini tahun terakhir masa jabatan saya sebagai Menteri Penerangan pada Kabinet Pembangunan III, pada tempatnya bila pada kesempatan ini saya melakukan semacam ballancy atau laporan sebagai pertanggung jawaban atas apa yang saya lakukan dalam tugas saya untuk mengembangkan perfilman di Indonesia", kata Ali Moertopo.*

*Berikut ini kami sajikan sambutan beliau sesuai dengan urutan tahun diselenggarakannya FESTIVAL FILM INDONESIA.*

### I. FFI 1978 di Ujungpandang

Kita semua berkumpul di Gedung Dewan Pers ini untuk menjadi saksi, mengadakan pengamatan atas perkembangan kegiatan bangsa Indonesia dalam rangka membangun salah satu sarana kebudayaan kita, yaitu

perfilman. Perfilman yang juga sebagai sarana perjuangan dan pembangunan bangsa.

Semenjak saya diangkat menjadi Menteri Penerangan, saya telah menggabungkan diri dengan masyarakat perfilman. Yang pertama saya kenal dalam sidang MMPI di Ujungpandang dalam rangka FFI 1977. Dengan jumlah yang sangat sederhana dan dengan pemikiran yang juga sederhana, masyarakat film berkumpul dalam suasana dan tempat yang sederhana pula.

Dari sanalah saya tergugah tentang bagaimana saya dapat menyumbangkan pikiran dan jasa-jasa saya untuk bisa turut serta dalam mengembangkan perfilman di Indonesia. Menyumbang pada masyarakat yang waktu itu saya sebut sebagai masyarakat selluloid (Celluloid Society).

Banyak ide, banyak gagasan atau fikiran, konsepsi serta alternatif yang perlu saya bicarakan dengan saudara-saudara masyarakat perfilman. Dan ternyata, saya masih ingat dalam benak saya bahwa pada waktu itulah kita semua menerima suatu konsep MMPI tentang **"Perfilman sebagai sarana komunikasi yang ampuh demi pembangunan nasional"**, meskipun belum jelas, apa dan bagaimana perfilman harus bisa menempatkan diri dalam barisan pembangunan. Juga kita lihat bahwa pada waktu itu, baik secara mandiri dalam penampilannya, film

Indonesia belum bisa mantap di tanah airnya sendiri.

Begitulah keadaannya ketika pertama kali saya berhadapan langsung dengan masyarakat film Indonesia. Di situ juga saya pertama kali memperoleh banyak kesan terutama dari pembicaraan dengan Prof. Amura di salah sebuah restroan di Ujungpandang. Juga saya banyak kenal dengan bintang-bintang film kita, penyanyi dan artis-artis kita. Dan dari sanalah saya berfikir, apa film itu sebenarnya. Dan bagaimana kira-kira kelak masa depannya dan masyarakatnya. Juga itu yang menjadi problem dalam pembicaraan Sidang-sidang MMPI yang pertama saya terjun langsung dan ditambah informasi-informasi sebelumnya, saya anggap semua itu merupakan tantangan serta pengalaman yang belakangan ternyata cukup berharga. Dengan segala keluh kesah tentang kenyataan bahwa untuk mengadakan festival saja bukan main beratnya masalah yang harus dihadapi, terutama yang menyangkut bagaimana caranya menghimpun dana sebanyak Rp. 125 juta setiap tahun. Satu-satunya cara hanyalah dengan menggeser-geser mata anggaran di Deppen, memohon sana-sini serta meminta-minta belas kasihan para Gubernur yang kemudian menjadi bagian penentu.

Waktu itu juga saya mulai sadar akan banyaknya masalah-masalah ruwet yang harus saya hadapi, terutama dalam hal bahwa di antara orang-orang perfilman sendiri kurang adanya kesatuan pandangan dalam rangka pengembangan perfilman nasional untuk bisa keluar dari masalah-masalahnya sendiri. Tetapi saya juga sadar bahwa masalah film adalah masalah selera. Film sebagai faktor budaya tidak lain dan tidak bukan adalah faktor selera juga.

Jadi kalau selera yang kita konsolidasikan, kalau seleranya kita mobilisasikan, kalau selera yang kita kordinasikan dan kita persatuan untuk bisa menarik suatu kesimpulan sebagai dasar konsepsi, memang tidak gampang.

Inilah penutup bab pertama dari pengalaman saya dalam perfilman.

## II. FFI 1979 di Palembang

Dengan penuh persiapan dan dibekali oleh pengalaman yang pertama, maka FFI 1979 di Palembang diselenggarakan secara lebih mantap dan lebih memasyarakat. Saya langsung memberikan petunjuk. Di samping memasyarakatkan film, kita juga ingin lebih mengembangkan MMPI yang waktu itu baru ada lima kordinatornya, dua peninjau dan satu sebagai tamu.

Dengan lingkungan sekecil itu masyarakat perfilman ingin membangun film Indonesia yang mempunyai falsafah perjuangan bangsa. Di situ kita telah menemukan konsep, dimana kita bersama-sama menerima dan menyetujui **the basic philosophy of development** dari Film Indonesia. Waktu itu saya tekankan agar film Indonesia harus "**cultural-educative**".

Barulah di sini keluar konsep film Indonesia. Banyak kritik sesudah FFI selesai di Palembang, bahkan seminar demi seminar, pembicaraan hangat antara satu dengan tidak setuju. Itulah citranya masyarakat perfilman. Yang bebas dan yang mengabdikan kepada sekelompok golongan. Apakah untuk kepentingan pribadi kelompoknya, kebudayaannya maupun sampai kepada materi interest-nya, sehingga sulit untuk dipisahkan mana yang idiil, mana yang materiil. Tetapi kita berterus! Akhirnya konsep film yang kultural-educative tersebut kita jadikan watak Film Indonesia. **Kultural-educative, behaviour** film Indonesia, adalah nilai film Indonesia dan merupakan **basic philosophy** dari film Indonesia untuk dikembangkan dan ditumbuhkan dengan tujuan menempatkan film Indonesia menjadi rumah di tanah airnya sendiri. Inilah konsepnya. Inilah programnya. Inilah yang menjadi **program of action**

rencana kerjanya Indonesia di bidang perfilman. Oleh sebab itu, kita harus mampu memberikan warna terhadap film Indonesia. Fungsi dalam perfilman Indonesia harus mengandung karakteristik :

- a. Memberikan isi komunikasi kepada masyarakat
- b. Pendidikan kepada masyarakat
- c. Memberikan penerangan pada masyarakat.

"Ini lho film Indonesia yang kultural—edukatif ingin menjadi tuan rumah di tanah airnya sendiri".

Keadaan perfilman Indonesia yang sangat menyedihkan bagi saya lebih terasa lagi ketika dalam kesempatan ke Luar Negeri dan bertemu dengan beberapa rekan di Singapura. Baru ketemu sudah diberi peringatan; "Sorry, filmu tidak bisa masuk di Singapura".

"Why; Kan kita punya hubungan baik dalam ASEAN. Kita bertetangga dan punya ikatan dalam kegiatan ekonomi perdagangan. We are very close. Why don't you give me the door to let the Indonesian films visit your nation here?"

Jawabnya; "Filmmu sangat pornografis. Filmmu sangat tidak mendidik masyarakat. Filmmu sangat sadistis".

Mendengar itu kepala saya mau pecah. Saya merasa, begitu tuh film saya. Apa yang bisa saya buat, sedangkan biaya tidak ada.

Begitu juga di negara-negara ASEAN lainnya. Apalagi untuk negara-negara luar ASEAN! Waktu saya bertemu dalam suatu seminar dengan orang-orang Amerika yang diprakarsai oleh masyarakat Asia di New York. Waktu itu ada John Rockefeller III dengan Senator Youth Scott: Saya juga diberi tahu mengenai film Indonesia yang sangat jelek itu. Jika ingin mempromosi film Indonesia di Amerika, maka image yang buruk itu harus diperbaiki.

Itulah harapan pertama saya untuk membawa film Indonesia kalau toh belum laku, cukup mengunjungi

bangsa-bangsa di luar bangsanya sendiri. Just to visit. Tidak apa-apa. **Just to introduce.** Saya minta pada Pak Soemadi, Dirjen RTF, adakan komunikasi dengan pemain-pemain film, dengan pengusaha-pengusaha film, dengan pemikir-pemikir film, dengan kritisi-kritisi film; "kenapa filmnya begitu dan bagaimana perasaan mereka". Jawaban pada umumnya membuat saya benar-benar prihatin dan tersentuh. Saya sebagai Menteri Penerangan merasa ditantang. Tetapi saya tidak menyerah. Saya harus konsekwen. Kalau saya menyerah dalam membina film, sayapun harus menyerah sebagai Menteri Penerangan. Dan saya tidak mau mundur karena sudah dipercaya oleh Presiden sebagai pembantunya di bidang penerangan, termasuk membenahi film. Apa gunanya diberi mobil Volvo pakai bendera?

Saya pernah juga dianjurkan melihat potongan-potongan film di BSF. Terus terang saya katakan bahwa sampai detik ini saya belum pernah melihatnya. Buat apa? Dari faktor segi, dan gejala-gejala lain, saya sudah tahu keadaan perfilman secara menyeluruh. Tidak hanya dari segi BSF. Dan saya memang tidak perlu melihatnya. Karena bagi saya yang penting adalah bagaimana cara mengatasi seluruh masalah perfilman. Untuk itu saya memang harus mengambil langkah-langkah penuh resiko. Pertama, adalah masalah dana. Dana dimana atau dari mana saya harus ambil.

Waktu itu, saya masih ingat, saya mengadakan konprensi pers. Dalam kesempatan tersebut saya menjelaskan betapa perlunya dana bagi pengembangan perfilman di Indonesia. Dan saya jelaskan beberapa alasan, di antaranya agar menyediakan dana Rp. 200.000.000,- per tahun bagi keperluan rapat-rapat Dewan Film. Jangan hanya karena uang sebanyak itu tidak ada, rapat-rapat tidak jadi. Syukur-syukur kalau bisa membantu lebih dari sekedar uang, yaitu di bidang pemikiran dan konsep-konsep.

Untuk inilah saya coba menertibkan Asosiasi-asosiasi perfilman, terutama para pengusaha importir film. Dan saya meminta agar mereka turut memikirkan dan membantu usaha-usaha pengembangan perfilman nasional.

Saya katakan, saya ingin uang. Saya ingin film tidak hanya membantu dirinya sendiri untuk berkembang, saya ingin tunjukkan, bahwa masyarakat juga turut membantu. Dari pihak pers waktu itu mengeritik paling hebat. Waktu itu saya katakan; "nanti kalian akan dibantu oleh masyarakat film, akan diberi gedung Dewan Pers". Sekarang kita telah memiliki Gedung Dewan Pers itu, toch!

### III. FFI 1980 di Semarang

Sikap dalam membina perfilman nasional saya tegaskan lagi, dengan misi untuk membawa film Indonesia keluar dari kesulitan-kesulitannya. Saya sadar itu memerlukan "keberanian", sebab meskipun sudah tahun ketiga, saya melihat keadaannya belum banyak berubah. Terutama sekali yang paling saya rasakan adalah sikap mental orang-orang film. Dan saya melihat, ada 2 hal yang perlu dibenahi :

1. Meletakkan pengorganisasiannya secara profesional, supaya punya kesatuan bahasa (intern),
2. Menciptakan pandangan (ekstern) masyarakat di luar masyarakat perfilman yang mendukung pertumbuhan kondisi dan situasi film di Indonesia, seperti Pers. Kita mengharapkan agar Pers Indonesia juga mengerti tujuan film Indonesia. Jagi tidak sekedar membandingkan film-film yang dibuat oleh Hollywood, Hongkong, Eropah dengan film yang dibuat di Indonesia. Jadi kalau ingin membuat sesuatu perbandingan nilai (**comparation of value**), itu benar, memang berbeda.

Sama-sama mangganya, yang satu mangga Indramayu,

satu mangga Probolinggo atau mangga golek. Film Indonesia juga mempunyai macam-macam rasa dan karakter. Dan kita ingin menempatkan spesifikasi film Indonesia di tengah-tengah masyarakat film internasional. Nilai watak dan film internasional memang ada ukuran-ukuran. Film sebagai **national value** ada ukurannya tersendiri.

Dalam rangka inilah, maka dalam FFI di Semarang saya mencoba apakah orang-orang film betul-betul bisa diajak memasyarakat. Sebaliknya melalui pers, saya juga mencoba memberi pengertian terutama tentang kebijaksanaan dalam menertibkan Asosiasi-asosiasi Importir Film. Pada waktu itu, malah saya ingat lebih dari 3 kali saya dikerumuni wartawan, yang kemudian mengeritik paling pedas.

Dalam FFI di Semarang saya membawa rombongan masyarakat film dari Jakarta naik kereta api. Saya tahu banyak yang rikuh dan tidak sedikit yang merasa lebih elit dari rakyatnya. Dan di sinilah pertamakalinya juga diselenggarakan Pameran Perfilman Indonesia. Dan dalam masa ini pula kita telah menemukan konsep-konsep serta program-program yang lebih maju.

Kemudian sebagai intermezo, pada tahun 1977 kita melaksanakan FFA (Festival Film Asia) dengan mengambil lokasi di dua tempat, yakni Yogyakarta dan Bali sebagai daerah wisata nasional yang penting. Kita melaksanakan FFA secara lebih meriah untuk berbagai macam tujuan, yang ternyata dikemudian hari banyak manfaatnya. Di sinilah saya sekali lagi membicarakan ambisi saya mengenai film, terutama mengenai rencana saya untuk melaksanakan FFA di Indonesia. Banyak orang khawatir dan bahkan ada yang bilang **impossible**.

Tetapi saya katakan, kita harus berani coba! Memang saya punya ambisi supaya negara Asia lain tidak bisa mengimbangi Festival Film yang kita adakan. Saya diingatkan oleh Pak Soemadi. Berapa kita ha



bayar kalau ide ini dilakukan? Kalau perlu jual Deppen, kata saya waktu itu. Saya minta pembukaannya diadakan di Yogyakarta dan penutupannya di Bali. Apakah mungkin? Hanya orang besar punya jiwa besar dalam menghadapi resiko.

"Kamu kecil keberaniannya?"

"Besar, Pak!"

"Kalau besar, jalan!", saya katakan.

Memang berat mentransfer kurang lebih 438 orang melalui udara dari Yogya ke Bali dengan pesawat udara.

Yang penting, jalan! Kalau bisa negara lain yang dapat giliran melaksanakan FFA berikutnya jangan sampai mampu. Supaya ada kenangan di setiap masyarakat film di Asia. Itu yang saya inginkan. Saya membangun citra dunia melalui FFA tentang film Indonesia. Adapun filmnya masih jelek, kita akui. Memang tidak gampang membuat film dari jelek sekaligus jadi baik. Meskipun di Indonesia, secara pribadi insan-insan film itu mengatakan superstar semua, pemalannya superstar, sutradaranya superstar, penulis skenarionya superstar, semua superstar. Sehingga karena semua merasa superstar, akhirnya berubah jadi **"very small stars"**. Dengan FFA Yogya – Bali, rasa superstarnya jadi turun. Ee, ternyata saya bukan superstar. Sadar semua. Yang tadinya **flying** dan mimpi di menara gading, toh sadar **go earth**, turun ke bumi. Baru dari situ saya merasa bahwa masyarakat film Indonesia bisa diajak berfikir menurut kenyataan. Baru masyarakat film di Indonesia mempunyai satu irama dengan saya. Satu suara dengan saya. Tadinya tidak. Tiiinggi sekali! Seperti saya main layang-layang. Bagaimana saya bisa mengajaknya dialog. Jaraknya saja sudah jauh. Saya di darat, mereka di udara. Kalau saya biarkan, kesangsang di pohon, mati!

Inilah resikonya menjadi Menteri Penerangan yang juga punya tugas bidang perfilman. Belum lagi sukarnya hubungan antara masyarakat film dengan Departemen

Penerangan. Yang di Departemen merasa majikan, jadi bukan merasa pengabdian rakyat atau masyarakat film. **"I'm the boss, come here and pay me!"** Bagaimana film Indonesia bisa maju, kalau sikapnya kayak begitu. Tapi dengan FFA serentak **down to earth**. Semua sudah di tanah.

Bayangkan saudara-saudara tiga tahun kita buang percuma hanya untuk menghilangkan perasaan yang keliru saja. Hanya untuk membuang perasaan yang keliru, kok perlu waktu sampai tiga tahun.

Mau dikatakan orangnya tidak waras, ngakunya superstar. Mau dikatakan waras, kok lama tidak bangun-bangun? Mimpi apa ini? **Why you dream so long?** Jadi saya ngajak masyarakat film untuk bangun dan tidak mimpi, perlu waktu tiga tahun lebih. Andaikata tahun pertama sudah sama-sama bangun barangkali kita sudah lebih maju lagi. Tapi memang masyarakat film Indonesia tidak bisa diganti. Andaikata boleh, kita tidak perlu berprinsip, bahwa film Indonesia adalah kultural edukatif, bahwa rencana dan program kerjanya membuat film Indonesia menjadi tuan rumah di tanah air sendiri. Go to death! Singkirkan itu semua! Saya ambil saja masyarakat film dari luar negeri. Saya kontrakkan pada Run-Run Shaw, atau saya datangkan dari Hollywood, malah lebih gampang. Kalau sampai begitu, matilah masyarakat film Indonesia, warganegara Indonesia, pejuang-pejuang Indonesia dan kebudayaan Indonesia.

Jadi saudara mengerti berapa mahalnya kita membangun film? **Just to change the image, we have to pay so much!** Merobah pandangan saja harganya sudah begitu mahal.

Kenapa tidak dari dulu semua ini saya terangkan. Karena kalau saya terangkan dari dulu, nanti dikira saya ini melebihi superstarnya bintang film Indonesia. Karena ini tahun terakhir masa jabatan saya sebagai Menteri Penerangan di Kabinet Pembangunan III, saya berani

mengatakan ini untuk mengadakan ballancies. Untuk melakukan pertanggung jawaban, apa yang saya lakukan di dalam tugas saya mengembangkan film di Indonesia agar menjadi tuan rumah di tanah airnya sendiri yang berkarakter dan berkelakuan kultural edukatif.

Setelah image seperti ini diciptakan, maka semua tamu dari luar negeri yang datang ke Indonesia, termasuk orang-orang awam di bidang film pun akhirnya mengerti juga.

"Kenapa kok poster-poster filmnya begini. Lain dari film yang di Hollywood".

Jadi, dari poster itu saja tamu yang datang mulai bisa memisahkan, mana film Indonesia dan mana film Amerika. Dari pakaian lebih jelas lagi. Kalau sama-sama pakai bikini tidak bisa dipisahkan, mana yang Indonesia mana yang Hollywood. Akhirnya orang yang masuk ke gedung bioskop punya kesan penilaian terhadap film yang ditampilkan, masih Hollywood-sentris. Jadi belum film Indonesia. Film yang dibikin modal Indonesia, teknisi Indonesia, karakternya masih Hollywood-sentris.

Inilah macamnya film yang belum laku di luar negeri sampai hari ini. Tapi film yang sudah Indonesia, meskipun orang di Indonesia banyak yang tidak senang, malah ingin merobek posternya, ternyata "**Sundel Bolong**"-nya Rapi Film laku di luar negeri.

Tapi demi membela masyarakat Film Indonesia, membela dinas saya, yaitu RTF yang memberi ijin, saya katakan : "Tidak! Ini adalah **living reality!** Ini adalah legenda Indonesia. Memang kalau didengar tidak enak di telinga. Apa boleh buat! Ingin menyampaikan kenyataan Indonesia, hanya kebetulan yang dipilih itu, ya apa boleh buat!" Di hati pun saya sebetulnya marah. Tapi bagaimana, ya, wong RTF sudah memberi ijin. Marah terus berarti memarahi diri saya sendiri.

Dipikir, bodoh saya, mengapa tidak ngontrol RTF.

— Ibu Tien pernah nanya saya : "Kok ada film judulnya sejeorok itu?" Saya jawab, itu kenyataan hidup di Indonesia. Itu legenda Indonesia.

— "Ah, namanya kan ndak baik".

Tapi dalam hati, OK deh, mudah-mudahan inilah kesalahan yang terakhir. Seharusnya Dewan Film yang saya tegur. Kenapa Dewan Film yang punya Komisi Idiil, kok, idiil-nya yang begini? Dewan Filmnya nggak merasa salah, ya bagaimana? Saya ketuanya lagi.

Tapi karena saya tidak merasa superstar dalam perfilman, saya percaya sekali kepada Dewan Haria beserta segala slagordenya.

— Waktu saya tanya pak Asrul, "Mengapa ko bagini amat sih judulnya?"

— Ah, itu hanya senang sansasi saja, pak!

— "Lho, rupanya orang ini ikut mendukung, pik saya.

— Tapi ini jangan sampai terjadi lagi, dong".

Tapi tokh itu laku di Luar Negeri. Film "**Sundel Bolong**", itu film Indonesia. Meskipun harganya hanya cukup ke restoran semalam, tapi sudah mulai laku.

Jadi mengarahkan film Indonesia ke pasaran luar negeri, sekarang baru taraf laku. Nanti tentu Dewan Film dengan Pokjatap Prosar-nya Pak Rosihan Anwar akan menjadi Duta keliling masyarakat film Indonesia seluruh dunia, bagaimana caranya film Indonesia benar benar menjadi "commercial commodity". Sekarang baru nunut saja.

Memang sedikit kita sudah bisa gembira dan bangga itu tingkat prestasi film Indonesia, namun sudah mulai punya nilai integral. Film Indonesia tidak hanya merupakan luxurious, tapi film Indonesia sudah menjadi film kultural di mana bangsa-bangsa lain mengerti kultur Indonesia melalui film. Film Indonesia merupakan **means of introducing the nation**, memperkenalkan Indonesia

nesia di forum-forum Internasional. Film Indonesia mendukung keberhasilan politik luar negeri bangsa Indonesia, film mempunyai nilai diplomatik, film Indonesia akhirnya juga akan menempati lingkungan komoditi ekspor.

Kalau ini kita kembangkan terus dan kita ambil pengalaman India, Hongkong dan Taiwan yang telah mampu membuat film menjadi sarana perdagangan (**Trade commodity**), mengapa Indonesia tidak mampu. Inilah seharusnya menjadi bahan pemikiran kita. MMPI dalam hal ini harus benar-benar memilih satu bidang, bagaimana bisa membuat film Indonesia mempunyai harga di pasaran internasional. Itulah satu hal yang patut diperhitungkan dalam membuat film.

Pak Sultan sampai terharu waktu itu melihat masyarakat diikut sertakan. Menurut Pak Sultan, di Yogya dalam sejarah belum pernah berkumpul lebih dari satu juta orang. Tamu-tamu asing juga lebih tidak mengerti. Ini apa, sampai kok begini rame. Saya pura-pura tidak ngerti saja. Untuk mendukung **surprise feeling** para tamu, saya bilang; "Saya sendiri tidak mengerti, mengapa film Indonesia sudah menyatu betul sampai dengan masyarakat yang terkecil sekalipun". Sebetulnya, ini pura-pura! Supaya mereka mengerti kalau film Indonesia sudah bisa menjadi tuan rumah di tanah airnya sendiri, tidak hanya dalam arti kata kultural, tidak hanya dalam kata *luxurious*, tetapi juga dalam arti kata komersial dan dalam arti kata ekonomi. Kita bisa mengatakan; "our market is no problem". Ini maksudnya supaya jangan ada kesan seakan-akan kita mengemis-ngemis cari pasaran. Ini film kita, "**if you like, you have to pay for**". Inilah gagasannya, kebijaksanaan saya untuk bagaimana caranya mengembangkan film Indonesia agar juga mempunyai pasaran di Luar Negeri.

Jadi jangan sampai seperti yang sudah-sudah. Untuk diputar saja kita harus minta-minta. Hanya untuk mutar, malah kita disuruh bayar. Tapi setelah FFA,

masyarakat perfilman Asia tahu bahwa sebenarnya Indonesia tidak memerlukan marketing di luar negeri. Di dalam negeri saja sudah berkelebihan. Jadi kalau kamu mau mutar film Indonesia, kamu harus bayar. Meskipun belum memuaskan, tapi sudah tampak bahwa film Indonesia mulai dibayar.

Sejak FFA Yogya – Bali, saya selalu melakukan evaluasi. Dari Jakarta ke seluruh penjuru tempat-tempat film Indonesia mulai dipasarkan, terutama Manila.

"bagaimana?"

"Laku, Pak"

"Ada kontrak?"

"Ada, Pak"

Sudah, saya tidak perlu tanya-tanya harganya. Saya katakan : "Yang punya film jangan cengeng. Anggap saja sebagai perkenalan. Jadi berapa saja terima dulu. Yang penting supaya harga itu ada dulu. Berapa? Soal kedua".

Dan akhirnya di Berlin, laku lagi. Dan saya sudah melihat bahwa film Indonesia sudah punya stand di pasaran Internasional. Ini yang penting. Berapa harganya, soal kedua, karena itu tergantung pada kita untuk bagaimana unjuk promosi. Saya selalu mengajukan kepada Dewan Film : "Usahakan supaya film Indonesia benar-benar punya market Internasional. Meskipun tidak seratus persen, tetapi dengan FFA yang kita bayar dengan begitu mahal, sasaran seluruhnya kena".

Di dalam negeri kita tunjukkan bahwa perfilman bukan anak kecil. Jadi masyarakat di luar perfilman supaya tahu bahwa film Indonesia sudah mulai bangun. Inilah film Indonesia.

#### IV. FFI 1981 di Surabaya

FFI Surabaya dengan segala persiapan dan perencanaan yang matang, kordinasi yang akrab antara berbagai pihak; mulai dari Dewan Film, Deppen, Parfi,

Yayasan FFI, Pemda Tk I Propinsi Jawa Timur dan beberapa Pemda Tingkat II serta seluruh slagorde masyarakat kita libatkan, sehingga FFI betul-betul menjadi satu "Pesta Masyarakat". Dengan beranjak dari thema **"Memfilmkan masyarakat dan memasyarakatkan film"**, acara-acara FFI di Surabaya dibuat semeriah mungkin sehingga setiap lapisan masyarakat mengetahui kemajuan yang telah dicapai di bidang perfilman Indonesia. Pertama kali pula kita mengundang masyarakat film internasional dalam rangka FFI. Waktu itu juga banyak kritik. Kenapa harus mewah, kenapa harus glamour dan seterusnya. Tapi kita sudah mulai. Dan andaikata pun tidak ada orang mau bayar, Deppen bayar sendiri.

Waktu itu Pak Acub Zainal (Wakil Ketua Pelaksana FFI 1981) datang melapor.

"Pak, kalau ada tambahan uang, rencana Bapak bisa kita laksanakan".

"Soal uang tidak usah sebut, saya bayar. Jadi itu betul dibutuhkan?"

"Perlu, Pak".

"Saya bayar".

Untuk angkutan rombongan dari Jakarta sudah saya pesan khusus. Tidak lagi kereta api, tapi BOEING 747. Biar mahal, tidak apa. Kita memang harus tahu persis kapan kita bayar murah, kapan kita harus bayar mahal, sebab pemikiran di bidang perfilman tidak semudah orang jual tempe. Kalau menjual film memang ada nilai tersendiri. Untuk mendukung market film, memang kita harus bayar. Untuk menempatkan film sebagai elemen tersendiri, kita harus bayar untuk mengamankannya. Pasaran dalam negeri, itulah sasaran FFI 1981.

Malahan untuk merealisir keinginan membangun Gedung Dewan Film, belum terlaksana. Mudah-mudahan, dalam Pelita IV nanti kita akan membangun Gedung Dewan Film yang lengkap dengan sarana bursa

film nasionalnya. Tapi kalau yang kecil-kecilan, saya rasa lebih baik tidak usah. Jadi kalau betul-betul mau bikin, bikinlah yang mempunyai standing, bikinlah yang betul-betul merupakan Pusat Perfilman Indonesia. Inilah idenya kalau kita membuat Gedung Dewan Film nanti. Sekarang kita sudah mampu mengajak masyarakat film berdiri di atas kakinya, sudah tumbuh menjadi manfaat bagi bangsa Indonesia yang berarti : **"Film bagian integral perjuangan dan pembangunan bangsa Indonesia"**.

Jadi dari Surabaya, saya mempunyai harapan besar bahwa masyarakat film akan mampu meningkatkan FFI-nya.

## V. FFI 1982 di Jakarta (Penutup)

Dengan mengingat apa yang telah dijanjikan di Surabaya, maka terhadap FFI 1982 di Jakarta, terus terang saya menyatakan kekecewaan. Demi membangun citra film Indonesia, berbagai faktor dan perjuangan telah kita laksanakan dengan banyak memakan biaya, tetapi dengan FFI 1982 saya anggap masyarakat film menurun lagi. **We have already paid so much!** Dengan kelengahan beberapa orang, penyelenggaraan FFI 1982 kurang memuaskan. (Kekecewaan Pak Ali terutama pada waktu acara malam pembukaan di Balai Sidang Senayan - Red).

Hal itu saya singgung lagi justru karena saya sesungguhnya ingin dapat merasakan kenikmatan dari masyarakat film, yaitu melihat masyarakat film bangun dan mengembangkan film Indonesia yang kultural edukatif dan dapat menjadi tuan rumah di tanah airnya sendiri. Berapa saja harganya, saya turut bayar untuk itu. Hanya sayangnya, tidak happy ending!

Jadi yang saya harapkan dalam Festival yang nanti akan saudara lakukan dalam Kabinet Pembangunan yang keempat, tidak hanya baik, tetapi harus lebih maju.

Untuk ini, sebagai Menteri Penerangan, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama yang sangat baik dalam membangun film Indonesia dalam rangka pembangunan bangsa dan pembangunan nasional, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berbudaya, yang mampu menempatkan film yang memiliki nilai integral,

menciptakan **cultural integrity of the nation**. Pesan saya kepada masyarakat perfilman Indonesia, saya minta pada saudara untuk mengizinkan saya mengakhiri pimpinan FFI sampai di sini dan mudah-mudahan FFI tahun depan di Medan dan pembangunan film Indonesia di masa depan akan lebih baik daripada hari ini.

# FILM DAN PEMBANGUNAN BANGSA

Amirmachmud

## Pendahuluan

Di dalam proses Pembangunan Bangsa Indonesia, untuk membangun Manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh rakyat Indonesia, dunia film nasional tidak dapat ditinggalkan untuk menggenapi segi-segi kehidupan bangsa yang bergerak maju serentak menuju terwujudnya masyarakat Pancasila yang kita cita-citakan.

Film merupakan media massa yang besar peranannya sekarang ini, baik berdiri sendiri, maupun bersama-sama dan bekerja sama dengan teknisi yang semakin luas jangkauannya, ditunjang dengan teknologi yang semakin maju. Sifat audio visualnya juga dapat menimbulkan kesan-kesan bagi masyarakat yang menerimanya, sehingga oleh karenanya juga membawa pengaruh-pengaruh yang dapat diperkirakan, tetapi ada kalanya juga tidak dapat diperkirakan akibat kelanjutannya, khususnya yang berhubungan dengan perkembangan kejiwaan manusia, individual ataupun kelompok.

Di dalam Pembangunan Nasional yang menyeluruh sekarang ini, setiap warga bangsa Indonesia selayaknya merasa bertanggungjawab untuk berupaya dengan sungguh-sungguh, benar-benar selalu menunjang ke arah berhasilnya Pembangunan Nasional tersebut, demikian pula halnya dengan dunia perfilman nasional.

Sehubungan dengan itu pada akhir-akhir ini seringkali terdengar keinginan kuat di kalangan perfilman nasional untuk memperjuangkan, agar perfilman nasional dapat menjadi tuan di negeri sendiri. Alhamdulillah, bahwa menguatnya aspirasi demikian muncul tidak terlalu terlambat, sebagai kesadaran yang mendalam untuk mengisi makna Kemerdekaan, khususnya di dunia perfilman menegaskan kemandiriannya sebagai kelengkapan suatu bangsa yang merdeka.

Aspirasi itu hendaknya semakin mewujudkan menjadi tekad untuk berupaya lebih sungguh-sungguh, untuk menjadi tuan di negeri sendiri dalam bidang teknologi, produksi serta pemasarannya. Dengan tekad yang sungguh-sungguh itu berarti juga mengembangkan sikap perjuangan untuk mencapai cita-cita yang luhur.

## Segi Pengaruh film

Sidang ini bermaksud terutama untuk membicarakan peranan film sebagai media komunikasi, baik untuk tujuan budaya dan pendidikan, penerangan, penggerak semangat pembangunan para remaja dan pemuda, serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan nilai-nilai ekonomis lainnya.

Dengan memahami pengaruh film terhadap masyarakat sebagaimana telah saya kemukakan tadi, tentulah dapat dipahami beban tanggungjawab yang didasarkan

atas kepentingan pembangunan nasional, yang terpikul di kalangan perfilman nasional, baik dalam rangka pembangunan ideologi dan politik, pembangunan sosial budaya pembangunan ekonomi dan pembangunan ketentraman ketertiban.

Hal itu berarti, bahwa:

- dalam hubungan dengan pembangunan ideologi dan politik membawakan nilai-nilai Kepribadian bangsa yang telah tertuang dalam Ekaprasetia Pancakarsa, serta tata Demokrasi Pancasila;
- dalam hubungan dengan pembangunan sosial budaya membawakan nilai-nilai sosial budaya nasional;
- dalam hubungan dengan pembangunan ekonomi, didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang makin memantapkan kesadaran ekonomi nasional yang menegakkan kepentingan bangsa, baik dalam ruang lingkup nasional, maupun dalam ruang lingkup wilayah;
- dalam hubungan dengan pembangunan ketentraman dan ketertiban, membawakan nilai-nilai yang memantapkan kesadaran untuk memantapkan upaya untuk membina dan mewujudkan suasana tentram dan tertib, dengan daya tangkal yang kuat terhadap unsur-unsur yang menggoyahkannya, baik yang bersumber dari luar, maupun yang bersumber dari dalam negeri sendiri.

### **Pembinaan Politik Dalam Negeri**

Di dalam ruang lingkup tugas dan wewenang Departemen Dalam Negeri yang membina kehidupan politik dalam negeri, khususnya mengenai pembinaan ideologi dan kesatuan bangsa, pembinaan sosial politik, pemerintahan umum dan otonomi daerah, pembangunan desa, pembangunan daerah, keagrariaan dan sebagainya, yang berkaitan dengan itu, maka perfilman nasional

diharapkan dapat lebih menguatkan pancaran budaya bangsa yang berPancasila, sehingga merupakan suluh penerangan pendidikan ke arah jalan terjelmanya tata kehidupan bangsa yang kita cita-citakan. Hal itu mencakup cara-cara penyajian dan pengungkapan seni yang secara nyata menuju ke arah itu. Sehubungan dengan itu, makna yang terkandung dalam Ekaprasetia Pancakarsa serta Wawasan Nusantara (dalam GBHN, Ketetapan MPR No.IV/MPR/1978) merupakan pedoman arah yang bersifat umum dan jelas.

Dilihat dari tugas dan fungsi Departemen Dalam Negeri, maka keberhasilan pembangunan oleh Orde Baru sekarang ini tidak dapat dilepaskan dari pembangunan struktur dan kultur politik; prosedur dan tata cara pelaksanaan kehidupan politik; kapabilitas penyelenggara pemerintahan yang makin meningkat; sistem kehidupan politik yang semakin mantap atas dasar Demokrasi Pancasila, dan oleh karena itu juga semakin mengejawantahkan tingkah laku politik Pancasila. Di dalam pelaksanaannya, perjuangan demikian itu dilaksanakan secara konstitusional, demokratik dan berdasarkan hukum, secara konsekuen melaksanakan aspirasi rakyat yang tertuang di dalam GBHN. Sehubungan dengan itu pula, cara pembinaan dan pelaksanaan pemerintahan juga semakin memPancasila, baik dalam dekon-sentrasi, desentralisasi dan tugas pembantuan.

Berkenaan dengan itu pula, disebabkan karena adanya pengaruh timbal balik di lingkungan dunia perfilman nasional sebagaimana telah saya kemukakan tadi, harus dapat diciptakan tingkah laku manusia Indonesia yang semakin membudayakan Pancasila di segala bidang kehidupan. Dunia perfilman nasional secara makro dan konsepsional harus dapat mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, meneguhkan keutuhan bangsa dan negara, memantapkan stabilitas nasional, meningkatkan Pembangunan Nasional dan Ketahanan Nasional, yang kesemuanya itu hanya dapat

dicapai, jika ideologi Pancasila dan sistem politik Demokrasi Pancasila dapat dilaksanakan secara terus-menerus. Dalam hal demikian, tingkah laku bangsa Indonesia yang dicitrakan dalam dunia perfilman nasional adalah tingkah lakunya bangsa Indonesia yang mempunyai identitasnya sendiri. Identitas itu tergambar dalam ideologi Pancasila, tujuan dan arah yang berupa masyarakat Pancasila, serta dengan tata cara yang bersifat Pancasila pula.

Dengan demikian para pendukung dunia perfilman merupakan Pejuang Pancasila dan Pancasila pejuang; yang secara militan, dinamik, dan patriotik memancarkan semangat kebangsaan yang cepat bergerak maju memelopori kemajuan masyarakatnya, dan oleh karena itu secara idealnya akan berani mati untuk Pancasila.

#### **Sebagai sumber penghasilan Daerah**

Dalam ruang lingkup pelaksanaan tugas Departemen Dalam Negeri yang membina penyelenggaraan otonomi daerah yang nyata, dinamik dan bertanggung-jawab, antara lain membina usaha peningkatan pendapatan asli Daerah. Salah satu sumber yang merupakan pendapatan Daerah adalah Pajak Tontonan. Dalam memungut Pajak Tontonan ini Pemerintah Daerah berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Penerangan, yang mengatur tentang ketentuan-ketentuan perfilman nasional, yang terhadap setiap karcis tanda masuk bioskop diperhitungkan sebagai berikut:

- 33 1/3 % untuk pemilik film.
- 33 1/3 % untuk pengusaha bioskop.
- 33 1/3 % untuk pajak tontonan.

Berdasarkan hasil Keputusan MUKERNAS ke III Gabungan Pengusaha Bioskop tahun 1979 telah dise-

pakati untuk secara sukarela mengadakan Iuran bagi Pengusaha Bioskop yang disingkat IPEBI. IPEBI tersebut sebagai sumbangan sukarela yang diperhitungkan dari sebagian kecil dari tarip jasa yang merupakan bagian untuk pengusaha bioskop dalam jalur harga tanda masuk.

Perlu Saudara-saudara ketahui, bahwa pajak-pajak Daerah dipungut berdasarkan Peraturan Daerah dan khusus terhadap pajak tontonan yang sekaligus akan mengumpulkan IPEBI dimaksud diperlukan dasar hukum yang akan dijadikan pedoman di dalam merubah peraturan Daerah tentang pajak tontonan tersebut dalam bentuk Surat Keputusan Bersama antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Penerangan dan Menteri Keuangan. Surat Keputusan Bersama dimaksud masih dalam proses penyelesaian di masing-masing departemen.

Dengan gambaran demikian itu perfilman nasional mendapatkan daya hidup dari para penonton di daerah-daerah, dan oleh sebab itu hendaknya semakin mampu menemukan kekuatannya untuk menjelmakan ideal yang diperjuangkan sebagaimana telah saya kemukakan tadi.

Kekuatan itu akan berjalan seiring dengan makin meningkatnya kesejahteraan rakyat sebagai hasil Pembangunan Nasional yang dilaksanakan atas landasan Trilogi Pembangunan, yaitu pemerataan, kemajuan ekonomi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, sehingga oleh karenanya karya-karya perfilman nasional juga harus dapat membawa pengaruh yang menstabilkan seluruh kehidupan bangsa, memacu laju pembangunan, mendorong dinamika rakyat dan mengobarkan semangat perjuangan untuk mengisi kemerdekaan yang bulat dan utuh, yang menjadi idaman bangsa Indonesia, yaitu masyarakat Pancasila.



# KONSEP KEPEMUDAAN DAN PERFILMAN

## FILM SEBAGAI SALAH SATU LINGKUNGAN PEMUDA

Abdul Gafur

Dipandang dari segi pengembangan generasi muda, musyawarah ini sudah barang tentu tidak dapat melepaskan tanggung jawabnya untuk merumuskan keputusan-keputusan yang nantinya langsung atau tidak langsung, dalam rangka pengembangan film nasional, akan mempengaruhi perkembangan generasi muda bangsa kita.

Pengembangan generasi muda sejak tahun 1978, dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat meletakkan strategi dasar pengembangan kepemudaan itu sampai sekarang telah kita selenggarakan dengan sebaik-baiknya dan telah meletakkan dasar-dasarnya yang kuat. Sudah barang tentu dasar-dasar yang kita letakkan ini tidak dapat kita selenggarakan, apabila dari pihak-pihak yang lain tidak ikut menunjangnya. Karena sebagaimana halnya pendidikan, pengembangan generasi muda adalah tanggung jawab semua pihak. Oleh karena itu menurut pemahaman saya, Majelis inipun mempunyai tanggung jawab yang besar karena generasi muda kita yang tumbuh dan berkembang di dalam satu fase siklus kehidupan manusia, akan menemui hambatan-hambatan yang datang secara internal maupun external.

Faktor-faktor yang ikut mempengaruhi ini adalah tidak lain lingkungan-lingkungan yang ada di sekitarnya yang merupakan satu faktor external. Antara lain di sini film sebagai satu medium, sebagai

suatu lingkungan sungguh mempunyai pengaruh yang besar.

### Sebagai Konsep

Kita melihat bahwa kepemudaan sebagai konsep apabila kita tinjau dari berbagai dimensi, ada 3 (tiga) dimensi yang penting kita perhatikan. Yang **pertama** adalah dimensi pembangunan nasional, yang **kedua** adalah dimensi kebutuhan pembangunan dan yang **ketiga** dari dimensi re-generasi.

Kalau kita kaji selanjutnya tentang dimensi-dimensi ini kita akan tarik kesimpulan bahwa kepemudaan sebagai konsep, dia akan menyentuh konsep politik dan sebagai konsep budaya. Kita melihat, misalnya kalau melihat dari dimensi-dimensi pembangunan nasional dimana hakekatnya pembangunan nasional ini adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia. Seluruh masyarakat Indonesia itu di dalamnya ada satu lapisan yang terbesar, yaitu lapisan generasi muda ini yang ingin kita bangun, yang ingin kita kebangkan sebagai kader penerus perjuangan bangsa.

Maka di dalam kita mengembangkan dengan menggunakan atau melihat generasi muda dari sudut dimensi pembangunan nasional, hakekatnya manusia Indonesia

seutuhnya itu adalah pengembangan generasi muda yang kita letakkan pada satu jalur yang jelas untuk menuju perwujudan kader-kader bangsa yang utuh.

Kualifikasi kader bangsa yang utuh ini secara jelas dirumuskan di dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, dalam pasal pendidikan maupun di dalam pasal generasi muda.

Di dalam pasal pendidikan dirumuskan di sana bahwa pendidikan nasional berdasarkan atas Pancasila, bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mencerdaskan dan memberikan ketrampilan, memperkokoh kepribadian, mempertinggi budipekerti dan mempertebal semangat kebangsaan.

Di dalam pasal generasi muda kembali diulangi elemen-elemen yang penting ini, bahwa pengembangan generasi muda diarahkan untuk mempersiapkan kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional, dengan memberikan bekal kepemimpinan, ketrampilan, idealisme dan patriotisme, kesegaran jasmani dan daya kreasi, kepribadian dan budipekerti luhur.

Dari dimensi pembangunan nasional inilah ingin kita memberikan bekal seperti yang saya sebutkan tadi. Maka di sinilah, bahwa hubungan antara film sebagai satu medium yang amat ampuh di dalam pengembangan, kiranya elemen-elemen tadi melalui medium ini diberikan kepada generasi muda kita. Oleh karena itu amatlah tepat apabila dikatakan tadi, salah satu fungsi dari pada film, fungsi edukatif kultural amatlah tepat dan serasi dengan konsep kepemudaan kita apabila kita melihat kepemudaan itu sebagai satu konsep kultural.

Pada waktu MMPI di Ujung Pandang, kita baru saja mau meletakkan kerangka dasar dari pada konsep kepemudaan itu dan setelah empat tahun kita menyelenggarakan kebijaksanaan kepemudaan ini kita telah rampung untuk menegakkan satu konsep yang jelas.

Maka pada kesempatan ini ingin saya menyampaikan terutama kepada peserta Musyawarah, agar masalah kepemudaan yang kita lihat sebagai satu konsep kultural, kiranya film sebagai satu medium yang ampuh ini dapat memberikan andilnya.

Kita amat bergembira melihat perkembangan film nasional sejak tahun-tahun terakhir ini dan mudah-mudahan dengan makin mantapnya perkembangan perfilman nasional akan dapat mewujudkan kader-kader bangsa yang utuh dengan menyandang nilai-nilai yang elementer seperti yang diberi petunjuk oleh GBHN.

### **Film Menggali Kenyataan-kenyataan**

Kalau kita kaitkan lagi dengan dimensi re-organisasi, di mana film dapat memainkan peranannya yang ampuh, karena di sini elemen-elemen patriotisme, idealisme, tebal semangat kebangsaan, kemudian masalah-masalah transformasi nilai budaya bangsa dari dimensi re-organisasi, maka akan tampak secara jelas kerangka apa yang hendaki kita tegakkan.

Dari konsep kepemudaan, dari dimensi ini kita melihat bahwa re-organisasi bangsa bukan persoalan yang mudah, cepat-cepat ganti yang tua, tetapi yang harus kita perhatikan secara terus-menerus adalah bagaimana transformasi nilai-nilai budaya bangsa, Pancasila dan UUD 1945 yang dirangkum dari nilai budaya bangsa kita. Apakah generasi yang akan datang mempunyai kemampuan, mempunyai kesanggupan untuk melestarikan sendi-sendi dasar bangsa dan negara yang telah diletakkan oleh satu generasi yang berjasa besar, yaitu generasi 1945 yang di dalam kurun waktu yang akan datang, dasawarsa-dasawarsa yang akan datang, tidak lama lagi mereka akan mundur dari panggung pengabdian yang formal, bukan karena apa-apa tetapi karena usia.

Nilai budaya yang kita gali dari akar budaya bangsa kita ini harus tetap lestari. Nah, oleh karenanya dari dimensi re-organisasi ini film pun dapat memainkan peranannya yang penting, bagaimana usaha kita untuk menanamkan tebal semangat kebangsaan, idealisme dan patriotisme.

Di sinilah apabila film pandai menggarap kenyataan-kenyataan yang ada di dalam masyarakat, kenyataan-kenyataan alami maupun kenyataan-kenyataan manusiawi, pasti akan memberikan sumbangan yang besar, agar kader-kader bangsa kita pada waktu yang akan datang benar-benar merupakan patriot pembela bangsa yang mempunyai kemampuan sebagai transformator, mentransformasikan nilai-nilai budaya bangsa kita yang kita agungkan ini supaya tidak terputus di tengah perjalanan sejarah bangsa kita. Sebagaimana sejarah telah memberikan palajaran pada kita, jatuh bangunnya suatu

bangsa karena lalai untuk memberikan warisan-warisan nilai budaya dari pada bangsanya sendiri.

Film sungguh dapat memainkan peranannya apabila kenyataan-kenyataan alami dan kenyataan-kenyataan manusiawi Indonesia dapat diungkapkan secara trampil di dalam medium yang amat ampuh ini.

Akhirnya saya kembali menghimbau, supaya film benar-benar dimanfaatkan sebagai satu medium dengan fungsi edukatif kultural seperti disebut dalam GBHN, (sebagaimana kita akan juga merumuskan kembali bagaimana masalah pengembangan generasi muda) kedua-duanya mempunyai kaitan yang erat karena tanggung jawab kita adalah satu, bagaimana agar the survival of the nation dengan segala nilai budaya yang ada di dalamnya tetap lestari dan kokoh.

## KEPUTUSAN PERSIDANGAN MMPI TAHUN 1982

### 1 MEMPERHATIKAN:

- a. Pidato Pengarahan Menteri Dalam Negeri RI.
- b. Pidato Pengarahan Menteri Muda Urusan Pemuda.
- c. Pidato Pengarahan Dirjen RTF, Depen.
- d. Pidato Pengarahan Ketua Dewan Harian DFN.

### 2. MENINGAT:

- a. Keputusan-keputusan Komisi-komisi dalam persidangan MMPI tahun 1982;
- b. Rekomendasi persidangann MMPI tahun 1982;
- c. TOR yang diperoleh dari DFN mengenai usulan materi GBHN tentang Perfilman.

### 3. MEMUTUSKAN:

- a. Mengesahkan tata tertib persidangan MMPI tahun 1982;

- b. Menetapkan Prof. Drs. H. Amura sebagai Wakil Sekjen II periode tahun 1981 – 1984;
- c. Menerima hasil-hasil dari:
  1. Komisi A tentang ORGANISASI;
  2. Komisi B tentang G B H N;
  3. Komisi C tentang PROGRAM.
 sebagai hasil Keputusan Sidang MMPI 1982 yang harus dilaksanakan melalui kebijaksanaan Sekjen MMPI.

### 4. Keputusan ini dilampiri dengan:

- a. Berkas Keputusan Komisi A, B dan C;
  - b. Surat-surat Rekomendasi.
5. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Agustus 1982 bertempat di Hotel KEMANG.

Pimpinan Sidang,

1. ttd : – Prof.Drs. H.Amura (Ketua Sidang).
2. ttd : –Soelistiadi (Wakil Sidang).
3. ttd : – H.Ibrahim Sinnik, BA (Wakil Ketua Sidang).

## **TATA TERTIB** **PERSIDANGAN MMPI 1982**

### **PERSIDANGAN MMPI 1982**

#### **Pasal 1**

#### **Waktu dan Tempat**

Persidangan MMPI yang bersamaan dengan F F I dilangsungkan pada tanggal 10 sampai dengan 13 Agustus 1982 di Jakarta, dengan jadwal dan tempat yang telah ditentukan.

#### **Pasal 2**

#### **T u j u a n**

Sidang MMPI 1982 bertujuan: mengumpulkan sebanyak mungkin pendapat dan informasi mengenai perfilman Nasional dan membahas materi TERM OF REFERENCE (TOR) untuk disumbangkan kepada Pemerintah melalui Dewan Film Nasional.

#### **Pasal 3**

#### **Pimpinan Sidang**

Sebelum Sidang MMPI 1982 dimulai, terlebih dahulu dilakukan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua yang akan memimpin Sidang-sidang MMPI. Ketua Sidang dipilih dari anggota Delegasi Pelaksana FFI 1982, sedangkan Wakil-wakil Ketua dipilih dari anggota Delegasi Pelaksana FFI 1981 dan 1983.

#### **Pasal 4**

#### **Peserta Sidang**

Peserta Sidang MMPI terdiri dari:

- a. **Peserta penuh**, yang terdiri dari anggota-anggota delegasi resmi dari daerah-daerah pelaksana FFI dan dari induk-induk organisasi perfilman serta komponen Pemerintah Pusat dan Daerah, sesuai dengan sub ayat 1 dan 2 pasal 6 Pedoman Anggaran Dasar MMPI;
- b. **Peserta khusus**, yang terdiri dari wakil-wakil Perguruan Tinggi dan Lembaga-lembaga yang diundang;  
**Para peninjau**, yang terdiri dari mereka yang tidak termasuk dalam ayat a dan b di atas.

#### **Pasal 5**

#### **P e r s i d a n g a n**

Sidang-sidang MMPI terdiri dari:

- a. Sidang Pleno, yang dihadiri oleh seluruh peserta Sidang MMPI;
- b. Sidang Komisi, yang dihadiri oleh peserta yang dipilih/menyatakan diri turut dalam salah satu Komisi.

Pasal 6  
Jalannya Persidangan

Berdasarkan jadwal yang telah disepakati, Ketua/Wakil Ketua Sidang MMPI mengatur jalannya persidangan serta pembicara-pembicara yang akan tampil dalam tiap-tiap persidangan. Ketua/Wakil Ketua berhak menegur pembicara yang menyimpang dari topik dan pokok pembicaraan yang sedang dibahas atau tidak menggunakan waktu yang telah disediakan.

Pasal 7  
Hak Bicara dan Suara

- a. Para peserta Sidang MMPI yang termasuk kategori a dalam pasal 4, sesuai pasal 7 Anggaran Dasar MMPI, berhak berbicara dan memberikan suara.
- b. Para **peserta khusus** berhak berbicara dan tidak berhak memberikan suara.
- c. Para **peninjau** tidak berhak berbicara dan memberikan suara, tetapi berhak mengajukan pendapat/usul secara tertulis.

Pasal 8  
Keputusan

- a. Tiap-tiap keputusan Sidang MMPI diambil melalui

musyawarah, dan kalau tidak terdapat kata sepakat secara aklamasi, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

- b. Dalam hal terdapat suara yang sama sampai dua kali pemungutan suara, keputusan diserahkan kepada pimpinan sidang.

Pasal 9  
Penutup

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada tanggal: 10 Agustus 1982.

Pimpinan Sidang,

1. ttd : – Prof. Drs. H. Amura (Ketua Sidang).
2. ttd : – SOELISTIADI (Wakil Ketua Sidang).
3. ttd : – H. Ibrahim Sinnik, BA (Wakil Ketua Sidang).

## HASIL PERUMUSAN SIDANG KOMISI A BIDANG ORGANISASI MMPI – 1982

Sidang Komisi A Bidang Organisasi MMPI – 1982 tentang Peninjauan Pedoman Dasar MMPI dan fungsi Korda-korda/Hak-hak kewajibannya telah diselenggarakan pada:

Hari : Kami  
Tanggal : 12 Agustus 1982  
Jam : 09.00 – 19.30  
Tempat : Hotel Kemang, Jakarta.  
Acara : – Peninjau Pedoman Dasar MMPI.  
– Fungsi-fungsi Korda-korda/Hak-hak dan kewajibannya.

Sidang Komis A (Organisasi) MMPI – 1982 setelah memperhatikan para peserta sidang membahas dan memberikan tanggapannya terhadap Pedoman Dasar MMPI, termasuk pula fungsi-fungsi Korda-korda/Hak-hak dan kewajiban, maka telah dibentuk Team Perumus yang terdiri:

1. Prof. Drs. H. Amura – DKI

2. Moh. Farid, SH – JATIM  
3. Moh. Sadikin Natadipura – PFI  
4. R. Soemitro – AMPI-  
5. Aspar Parturusi – UJUNG PANDANG

Team Perumus setelah meneliti dengan seksama dan mendalami permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Pedoman Dasar MMPI telah mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat menyempurnakan seperti tersebut dalam naskah **terlampir**

Sidang Pleno Komisi A (Organisasi) dapat menerima hasil kerja Team Perumus.

Jakarta, 12 Agustus 1982.  
Komisi A Bidang Organisasi  
MMPI – 1982

Ketua,

ttd.

Koesoemo Atmoko

Sekretaris,

ttd.

Kusno Sudjarwadi

## MUKADIMAH

Bahwa Perfilman Nasional sebagai komponen sistem komunikasi sosial merupakan bagian integral dari perjuangan dan pembangunan Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga pembinaan dan pengembangannya perlu dilaksanakan secara sistimatis dan pragmatis.

Bahwa sejarah dan perkembangan perfilman Nasional mengalami pasang surut dalam banyak segi, sehingga menjadi penting untuk senantiasa membina dan mengembangkannya pada keinginan dan arah yang sesuai dengan tujuan pembangunan nasional seperti tertuang dalam GBHN.

Bahwa komponen dan eksponen perfilman Nasional meliputi kelompok pembina, profesi, pengamat dan pemakai jasa perfilman, baik Pusat maupun Daerah, sehingga dalam rangka pembinaan dan pengembangannya perlu memantapkan kegiatan yang berbentuk Musyawarah semua komponen dan eksponen tersebut dalam suatu wadah kordinasi berbentuk **Majelis Musyawarah Perfilman Indonesia** disingkat MMPI, yang sejarah perkembangannya tercantum dalam **Dokumenta Historika** sebagai lampiran yang tak terpisahkan dari Pedoman Dasar MMPI.

Bahwa dalam melaksanakan kegiatannya untuk menjadi wadah penuangan semua aspirasi di bidang perfilman Nasional dalam rangka menunjang pembangunan Nasional, Majelis perlu memperhatikan pedoman sebagai terperinci dalam ketentuan sebagai berikut:

### B A B I NAMA DAN KEDUDUKAN

#### Pasal 1

Nama wadah kordinasi **Majelis Musyawarah Perfilman Indonesia** disepakati pertama kalinya di Bandung pada tanggal 29 Maret 1976, kemudian perlengkapan organisasinya dibentuk di Jakarta pada tahun 1977, yang karenanya kedudukan MMPI, ditetapkan di ibukota Negara Republik Indonesia untuk di tingkat Pusat dan di masing-masing ibukota Propinsi untuk di tingkat Daerah.

### B A B II AZAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

MMPI berasaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.



### Pasal 3

MMPI bertujuan secara aktif membantu dan mengusahakan dengan terpadu pembangunan dan pengembangan perfilman nasional di seluruh kawasan Nusantara dan merupakan sarana untuk mewujudkan salah satu alat perjuangan bangsa yang tak terpisahkan dengan pembangunan nasional.

## B A B III STATUS DAN FUNGSI

### Pasal 4

MMPI adalah sebuah Majelis Permusyawaratan segenap komponen dan eksponen potensi perfilman nasional, berstatus sebagai lembaga yang berfungsi memasyarakatkan film Indonesia, menampung berbagai aspirasi dan transpirasi di bidang pembinaan dan pengembangan perfilman nasional, serta merupakan forum komunikasi yang memadukan dan memanunggalkan hubungan Pusat dan Daerah.

### Pasal 5

MMPI sebagai Majelis Permusyawaratan diakui dan dikukuhkan Pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.

## B A B IV TUGAS DAN KEWAJIBAN

### Pasal 6

MMPI bertugas:

- (a) Turut serta secara aktif meningkatkan fungsi film sebagai media komunikasi massa yang mengandung unsur penerangan, pendidikan dan hiburan yang sehat serta sebagai sarana pengembangan generasi muda.
- (b) Turut serta secara aktif meningkatkan fungsi film sebagai alat perekonomian nasional dan alat untuk

lebih mengokohkan ketahanan nasional.

- (c) Menjalin hubungan antar insan perfilman yang berasal dari organisasi dan lembaga perfilman peserta persidangan MMPI dalam menegakkan eksistensinya sebagai wadah masukan dan sarana umpan balik Dewan Film Nasional.

### Pasal 7

MMPI berkewajiban:

- a. Menampung, memecahkan serta menyelesaikan secara terpadu segala masalah perfilman nasional, terutama yang bersumber pada aspirasi Daerah sesuai dengan Wawasan Nusantara di bidang perfilman nasional.
- b. Mengusahakan agar tetap adanya kerjasama yang baik di antara para peserta persidangan MMPI, dengan selalu mengindahkan dan menghormati eksistensi masing-masing organisasi dan lembaga yang tergabung di dalam MMPI.

## B A B V STRUKTUR DAN KEPENGURUSAN

### Pasal 8

- (a) MMPI mempunyai struktur organisasi di Pusat berupa Sekretariat Jenderal, yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan dibantu oleh 2 (dua) orang Wakil Sekretaris Jenderal. MMPI di tingkat Propinsi dipimpin oleh Sekretaris Daerah MMPI dan dibantu oleh seorang Wakil Sekretaris.
- (b) Sekretaris Jenderal dan Sekretaris Daerah MMPI diberi wewenang untuk melengkapi aparat Sekretariat sesuai dengan kebutuhan.

### Pasal 9

## KEPENGURUSAN

- (a) Kepengurusan MMPI di tingkat Pusat sehari-hari dikelola oleh Sekretariat Jenderal dan di tingkat

Propinsi dikelola oleh Sekretariat Daerah.

- (b) Sekretaris Jenderal ditunjuk dan diangkat oleh Sidang Umum MMPI untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, dengan ketentuan bilamana Sekretaris Jenderal karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya, maka Wakil Sekretaris Jenderal yang tertua akan memimpin Sekretariat Jenderal sampai habis masa jabatannya.
- (c) Sekretaris Daerah MMPI ditunjuk dan diangkat oleh Sidang MMPI Daerah untuk masa jabatan yang sama dengan Sekretaris Jenderal, dengan ketentuan bilamana Sekretaris Daerah karena sesuatu hal tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya, maka Wakil Sekretaris Daerah akan memimpin Sekretariat Daerah sampai habis masa jabatannya.
- (d) MMPI di Pusat maupun di Daerah berkewajiban menampung masalah-masalah perfilman yang berkembang di wilayahnya masing-masing untuk diajukan dalam Sidang-sidang MMPI.
- (e) Sekretaris Jenderal MMPI berkewajiban mengadakan sistimasi masalah-masalah perfilman nasional yang diketahui dan semua aspirasi yang diterima serta mempelajari dan mengkaji laporan-laporan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah MMPI untuk dilaporkan dan disampaikan pada Sidang MMPI.
- (f) Sekretaris Jenderal MMPI berkewajiban memonitor dan mengonformasikan pelaksanaan keputusan yang telah disepakati oleh Sidang MMPI, baik secara periodik dan atau sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
- (g) Sekretaris Daerah MMPI berkewajiban menyampaikan laporan sekurang-kurangnya sekali dalam 6

(enam) bulan kepada Sekretaris Jenderal MMPI, dengan tembusan kepada instansi yang berwenang membidangi perfilman di daerahnya, mengenai permasalahan atau kegiatannya di Daerah, termasuk penyampaian pertimbangan dan saran yang menyangkut pembinaan dan pengembangan perfilman di Daerahnya.

- (h) Sekretaris Daerah MMPI disahkan oleh Pemerintah Daerah masing-masing dengan rekomendasi Kepala Kanwil Deppen setempat dan bertugas sebagai berikut:
  1. Menjalin hubungan antar insan perfilman di Daerah, baik yang fungsional maupun profesional.
  2. Mengadakan hubungan tetap dengan Sekretaris Jenderal MMPI mengenai perkembangan perfilman di Daerahnya.
  3. Menyelenggarakan Musyawarah-musyawarah perfilman di Daerah.
  4. Mengkordinasikan pembentukan delegasi daerah untuk menghadiri Sidang MMPI.
- (i) Susunan Kepengurusan Sekretariat Jenderal dan Sekretariat Daerah MMPI harus mencerminkan unsur instansi pembina, unsur profesi dan unsur generasi muda.

## B A B VI

### SIDANG – SIDANG

#### Pasal 10

- a. Sidang-sidang MMPI terdiri dari : **Sidang Umum, Sidang Tahunan** dan **Sidang Luar Biasa**.
- b. **Sidang Umum** MMPI dilaksanakan 3 (tiga) tahun sekali dan **Sidang Tahunan** dilaksanakan setiap tahun, dengan ketentuan kedua jenis sidang tersebut dilaksanakan bertepatan dengan pelaksanaan FFI.

- c. **Sidang Luar Biasa** MMPI dilaksanakan sewaktu-waktu bila dipandang perlu atas permintaan lebih dari separo jumlah Sekretaris Daerah MMPI atau atas permintaan Sekjen MMPI untuk membahas masalah-masalah per-filman yang mendesak.

#### Pasal 11

Persidangan MMPI di Daerah diselenggarakan oleh Sekretaris Daerah MMPI setiap saat bilamana dipandang perlu.

### B A B VII PESERTA SIDANG MMPI

#### Pasal 12

- a. Peserta **Sidang Umum** maupun **Sidang Tahunan** MMPI terdiri dari:

— **Peserta:**

1. Semua komponen dan eksponen organisasi per-filman nasional, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah, yang telah mendapat pengakuan dan pengukuhan resmi dari Pemerintah.
2. Semua komponen dan eksponen Pemerintah Pusat dan Daerah yang fungsi dan tugasnya berhubungan langsung dengan pembinaan per-filman Nasional sesuai dengan struktur organisasinya.
3. Lembaga-lembaga pendidikan, kebudayaan, kemasyarakatan dan Pers Film Pusat maupun Daerah serta lembaga-lembaga Pemerintah maupun swasta yang kegiatannya berkaitan dengan masalah komunikasi massa.
4. Pihak-pihak yang dianggap perlu oleh MMPI melalui suatu **penilaian khusus** oleh Sekretaris Jenderal.

— **Peserta Kehormatan:**

Perorangan yang dianggap berjasa dalam memajukan Lembaga MMPI serta dunia perfilman nasional

pada umumnya, dengan ketentuan bahwa kesertaannya melalui proses **penilaian khusus** dalam musyawarah persidangan MMPI.

- b. Peserta **Sidang Luar Biasa** MMPI terdiri dari lebih separo jumlah Sekretaris Daerah MMPI ditambah pihak yang **dipandang perlu** oleh Sekretaris Jenderal MMPI.

### B A B VIII HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA SIDANG MMPI

#### Pasal 13

- a. Setiap Peserta Sidang MMPI berhak mengajukan usul berbicara dan memiliki hak suara dalam sidang MMPI.
- b. **Peserta Kehormatan** dapat memberikan pandangan umum, saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan obyektif, baik secara lisan maupun tertulis, diminta atau tidak diminta.
- c. Setiap Peserta dan Peserta Kehormatan Sidang MMPI berkewajiban mentaati Pedoman Dasar MMPI dan petunjuk pelaksanaan seluruh keputusan MMPI.

### B A B IX PENCABUTAN HAK

#### Pasal 14

Pencabutan hak untuk menghadiri Persidangan MMPI berlaku apabila tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana termaktub dalam Bab VII Pedoman Dasar MMPI ini.

### B A B X PIMPINAN SIDANG

#### Pasal 15

- a. Ketua Sidang MMPI dipilih dari Delegasi Daerah Penyelenggara FFI.

- b. Wakil Ketua I adalah Ketua Sidang MMPI pada masa persidangan tahun sebelumnya.
- c. Wakil Ketua II dipilih dari Delegasi Daerah Penyelenggara FFI tahun berikutnya.
- d. Ketua bersama Wakil-wakil Ketua bertugas memimpin Sidang-sidang MMPI
- e. Sekretaris Jenderal MMPI memimpin Sidang Luar Biasa MMPI.

Pasal 16

Tiap Keputusan Sidang MMPI diambil melalui asas musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak diperoleh kesepakatan, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

**BAB XI**

**KEUANGAN**

Pasal 17

Sumber Keuangan MMPI diperoleh dari sumbangan-sumbangan hasil usaha lain yang sah dan tidak mengikat.

**B A B XII**  
**PERUBAHAN PEDOMAN DASAR**

Pasal 18

Perubahan atau Penyempurnaan Pedoman Dasar MMPI hanya dapat dilakukan oleh Sidang Umum MMPI.

**B A B XIII**  
**PENUTUP**

Pasal 19

Pedoman Dasar MMPI ini disahkan oleh Sidang Pleno MMPI ke-VII pada tanggal 12 Agustus 1982 sebagai penyempurnaan Pedoman Dasar MMPI tahun 1980 yang disahkan di Semarang pada tanggal 25 April 1980

Jakarta, 12 Agustus 1982.

**KOMISI "A"**  
**TEAM PERUMUS:**

Ketua : Prof. Drs. H. Amura.

Sekretaris: Moh. Faried, SH.

Anggota : 1. Moh. Sadikin Natadipura.

2. R. Soemitro.

3. Aspar Patutusi.

## LAMPIRAN PEDOMAN DASAR MMPI

### DOKUMENTA HISTORIKA MAJELIS MUSYAWARAH PERFILMAN INDONESIA

Dengan terjadinya peristiwa G 30 S/PKI pada penghujung tahun 1965 telah menggoncangkan berbagai bidang dalam masyarakat Republik Indonesia, termasuk bidang perfilman. Dunia perfilman di Indonesia yang baru saja memperoleh pedoman dengan lahirnya Penpres 1/1964, menjelang akhir tahun 1965 mengalami masa kesuraman, karena digerogoti oleh kegiatan Panitia Aksi Pemboikotan Film Imperialis Amerika Serikat (PAP-FIAS) yang didalangi oleh LEKRA/PKI, sehingga sejak permulaan tahun 1966 perfilman Indonesia praktis mengalami kemunduran.

Dengan dikeluarkannya S.K. Menteri Penerangan No.71 tahun 1967, perfilman Indonesia mulai kembali membenahi diri dengan berangsur-angsur melakukan produksi. Keadaan ini dapat membantu pulihnya kembali kegiatan produksi film Indonesia. Namun demikian sangat dirasakan bahwa produksi film yang sudah mulai bertumbuh itu, kurang mendapat perhatian dari masyarakat Indonesia sendiri.

Untuk menimbulkan perhatian masyarakat Indonesia terhadap film-film yang diproduksi oleh bangsanya sendiri, pada penghujung tahun 1972 timbullah fikiran dari organisasi-organisasi film Indonesia untuk membentuk Yayasan Nasional Festival Film Indonesia (YFI) Penyelenggaraan FFI dalam masa Orde Baru dilangsungkan pertama kali di Jakarta pada tahun 1973.

Kemudian pada tahun berikutnya, 1974 diadakan di Surabaya dan pada tahun 1975 diadakan di Medan.

Selama tiga kali FFI itu telah turut hadir utusan-utusan dari daerah-daerah yang tercantum dalam S.K. Menteri Penerangan No. 09/B tahun 1973, yang terdiri dari DKI Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Ujung Pandang, Medan dan Palembang. Kehadiran mereka dalam ketiga FFI itu telah menimbulkan rasa kekosongan dalam masalah komunikasi antara sesama mereka, karena tidak adanya suatu wadah yang menampung mereka. Meskipun satu sama lain sempat saling bertemu, tetapi dalam pertemuan itu tidak dapat dilangsungkan pembicaraan-pembicaraan yang terarah, terutama dalam rangka mendiskusikan masalah perfilman Indonesia yang semakin hari semakin berkembang.

Ketika dilangsungkan FFI 1976 di Bandung, kekosongan yang dirasakan oleh para utusan itu telah mendorong mereka untuk membentuk sebuah wadah komunikasi. Dengan kesepakatan bersama telah disepakati membentuk wadah yang diberi nama MAJELIS MUSYAWARAH PERFILMAN INDONESIA (MMPI) Namun karena sangat terbatasnya waktu, maka yang diperoleh dalam FFI di Bandung 1976 itu barulah nama dan piagam pembentukan wadah tersebut.

Pada saat berlangsungnya FFI 1977 di Jakarta yang kebetulan waktunya bersamaan dengan Pemilu

1977, maka kesempatan itu dapat digunakan untuk merealisasikan bentuk MMPI dengan kelengkapan Pedoman Dasar dan pemilihan Sekretaris Jenderal serta dua orang Wakil Sekretaris Jenderal. Dengan demikian MMPI telah mempunyai bentuk sebagai forum komunikasi antar eksponen dan komponen potensi perfilman nasional.

Dengan adanya wadah komunikasi MMPI, terbukalah kesempatan bagi daerah-daerah yang bukan saja tercantum di dalam S.K. Menteri Penerangan No,09/B tahun 1973, melainkan juga daerah-daerah yang mempunyai perhatian terhadap perfilman Indonesia dengan status mula pertama sebagai peninjau. Begitu pula unsur-unsur lain dalam masyarakat, seperti lembaga-lembaga masyarakat dan beberapa Perguruan Tinggi.

Persidangan MMPI 1978, yang bersamaan dengan FFI di Ujung Pandang, telah dapat menyempurnakan Pedoman Dasar MMPI dan membicarakan berbagai masalah, termasuk Rancangan Undang-Undang Perfilman. Dalam persidangan MMPI 1978 di Ujung Pandang itu pula dikukuhkan Pedoman Dasar MMPI dan pemilihan Sekjen dan Wakil-wakil Sekjen.

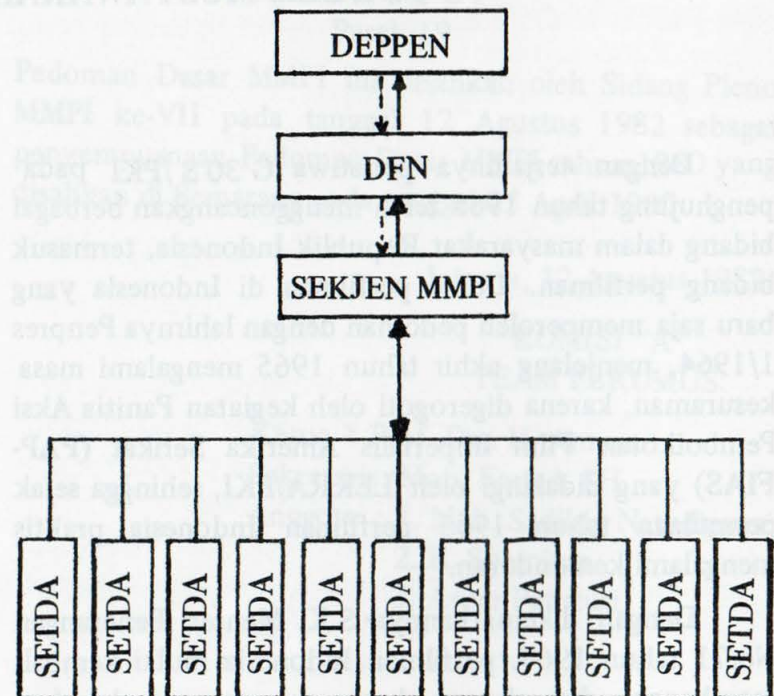
Pada tahun 1979 bersamaan dengan FFI telah dilangsungkan pula persidangan MMPI di Palembang. Tetapi dalam persidangan itu Pedoman Dasar MMPI tidak ditinjau. Barulah pada persidangan MMPI 1980 di Semarang, Pedoman Dasar MMPI disempurnakan lagi. Dalam persidangan MMPI 1981 di Surabaya juga tidak dilakukan peninjauan terhadap Pedoman Dasar MMPI.

Persidangan MMPI 1982 di Jakarta yang dihadiri oleh delegasi-delegasi dari 13 Daerah (DKI Jakarta, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan dan Bali) dan unsur-unsur lain yang menaruh minat terhadap perkembangan perfilman Nasional merasakan bahwa ada beberapa kelemahan dalam

Pedoman Dasar MMPI yang telah disempurnakan. Oleh karena itu persidangan MMPI bersepakat untuk meninjau beberapa bagian dari Pedoman Dasar MMPI.

Jakarta, 12 Agustus 1982.

### BAGAN ORGANISASI



#### KETERANGAN:

DEPPEN = Departemen Penerangan  
 DFN = Dewan Film Nasional  
 SETJEN = Sekretariat Jenderal  
 SETDA = Sekretariat Daerah.

### MEMORANDUM

#### Menimbang:

1. bahwa MMPI dalam sidang tahunannya selalu mencatatata setiap titik keber-

hasilannya, di samping juga mengadakan inventarisasi terhadap titik-titik kekurangan.

2. bahwa keberanian memandang kekurangan dan kelemahan adalah sikap positif, yang mampu menjamin tegaknya harga diri, karena melalui introspeksi dan retrospeksi, telah terkandung niat untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan.

**Mengingat:**

1. Pedoman Dasar MMPI
2. Usul, tanggapan dalam persidangan MMPI-1982 di Jakarta.

**MEMUTUSKAN**

Untuk menyampaikan **memorandum** sebagai berikut:

Berpangkal pada pentingnya kedudukan dan peranan MMPI, maka hal-hal yang perlu segera mendapat perhatian sepenuhnya adalah:

1. Tradisi bijaksana yang telah ditegakkan dalam penyelenggaraan FFI setiap tahun, yang selain menampilkan Festival Filmnya, juga diikuti oleh persidangan MMPI, harus dilestarikan terus sehingga terwujud kemanunggalan pelaksanaannya, yang dengan demikian berarti akan terpeliharanya kesinambungan aspirasi kultural.
2. MMPI perlu segera mendapatkan pengakuan dan penguatan resmi dari Pemerintah, baik di tingkat Pusat maupun di Daerah.
3. Gerak kegiatan MMPI sesuai dengan fungsinya lebih banyak dilakukan di Daerah-daerah dan kenyataan ini mengharuskan aktifnya Sekretaris-sekretaris Daerah MMPI.

**DAFTAR ANGGOTA MUSYAWARAH  
SIDANG KOMISI A BIDANG ORGANISASI  
TANGGAL 11 AGUSTUS 1982**

**JAM 20.00**

No.	N a m a	Utusan	Jabatan dalam Komisi
1.	Koesoemo Atmoko	D.I.Yogya	Ketua Komisi A
2.	Kusno Sudjarwadi	Parfi	Sekretaris Komisi A
3.	R. Soemitro	AMPI	Juru bicara Komisi A
4.	Abdul Latief Makka	Sulsel	Anggota
5.	Aspar	Sulsel	Anggota
6.	A.R. Qamar	Sumut	Anggota
7.	Drs.J.S.G.Sitohang,SH.	D.H.N.	Anggota
8.	Krisdial	Sumsel	Anggota
9.	Drs. M. Ardin	Kaltim	Anggota
10.	Achmad Zaini AR,SH.	Sulsel	Anggota
11.	Sih Wiyadi	Jateng	Anggota
12.	N. Suharso, BA.	Jateng	Anggota
13.	H. Radjulis Madjid	D.K.I.	Anggota
14.	Tatang Isya Iskandar	Jabar	Anggota
15.	Baryoen Hermawan	Jabar	Anggota
16.	Syukri Batubara	Humas Deppen	Anggota
17.	B. Alit Sudarma	Bali	Anggota
18.	Moch. Faried, SH.	Jatim	Anggota
19.	Soepratomo	D.I.Yogya	Anggota
20.	Arief Mulyadi	Jatim	Anggota
21.	Soedjito, BA.	Jatim	Anggota
22.	Moh. Sadikin Natadipura	PPFI	Anggota
23.	Drs. Soetrisno	Jabar	Anggota

**HASIL PERUMUSAN SIDANG KOMISI B  
BIDANG GBHN MAJELIS MUSYAWARAH PERFILMAN  
INDONESIA 1982**

Sidang Komisi B Bidang GBHN dalam sidang-sidangnya setelah:

MEMPELAJARI: Naskah kerja usulan Dewan Film Nasional untuk bahan GBHN 1983 – 1988.

II. MEMPERHATIKAN<sup>2</sup> Pidato-pidato pengarah:

1. Bapak Wakil Presiden RI pada Pembukaan Festival Film Indonesia 1982 tanggal 9 Agustus 1982.
2. Bapak Menteri Dalam Negeri pada Pembukaan Majelis Musyawarah Perfilman Indonesia 1982 tanggal 1 Agustus 1982.
3. Bapak Menteri Muda Urusan Pemuda pada Pembukaan Majelis Musyawarah Perfilman Indonesia 1982 tanggal 10 Agustus 1982.
4. Bapak Direktur Jenderal Radio-Televisi-Film pada Pembukaan Majelis Musyawarah Perfilman Indonesia 1982 tanggal 10 Agustus 1982.
5. Bapak Sekretaris Jenderal Majelis Musyawarah Perfilman Indonesia pada Pembukaan MMPI 1982 tanggal 10 Agustus 1982.
6. Bapak Ketua Dewan Harian Dewan Film Nasional pada Sidang Pleno IV tanggal 11 Agustus 1982.

III. MENGINGAT: Usul-usul serta saran dan tanggapan para peserta Sidang MMPI 1982.

IV. MEMUTUSKAN HASIL MUSYAWARAH KOMISI B SEBAGAI BERIKUT DALAM BAB DI BAWAH INI:

**A. PENDAHULUAN**

- a. Tujuan dari seluruh pengusul dan penanggap pada prinsipnya tidak banyak berbeda, hanya dalam berbagai ungkapan kalimat dan tekanan maksud perlu ada penyempumaan-penyempumaan.
- b. Komisi B berpendapat bahwa dalam rangkaian tahap perjuangan peletakan dasar perundang-undangan, target utama adalah adanya amanah rakyat Indonesia tentang perfilman sebagai bagian alat perjuangan bangsa yang tak terpisahkan dari pembangunan manusia seutuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
- c. Oleh karenanya dalam menyusun NASKAH KERJA dalam mengantarkan isi pokok kalimat dalam GBHN hendaknya disusun dalam sistematika Pendahuluan, Motivasi, baru terakhir usulan penuangan kalimat GBHN.

**B. PERMASALAHAN**

- a. Setelah mendengar Team Perumus Komisi B yang dalam hal ini meng-inventarisir seluruh



usulan tertulis, sementara dapat disimpulkan berbagai permasalahan yang dapat dikompilasikan sebagai berikut:

(1) Perlu adanya ketelitian dalam penggunaan istilah **produk sinematografik**, karena bentuk sinematografik adalah bagian dari citra hidup.

Dengan demikian perumusan yang dikutip dari definisi UNESCO tentang "MOVING IMAGE" dari Buku Hasil Seminar Teknologi Video Untuk Pembangunan, perlu diterapkan dalam berbagai pergantian istilah sesuai dengan kalimat-kalimat yang dimaksud.

(2) Dirasakan pula, perlu adanya butir-butir tambahan dalam motivasi usulan, dengan dasar pandangan bahwa pada GBHN perlu terbaca kepentingannya secara nasional, sebagaimana pengantar pendahuluan menyebutkan, bahwa film sekarang sudah bukan lagi satu-satunya media komunikasi massa yang bersifat audio visual.

(3) Pembetulan redaksional dalam tata-kalimat.

(4) Adanya kecenderungan untuk merumuskan segala usulan rumusan dalam kepadatan isi, membedakan mana yang memang merupakan isian bagi kalimat GBHN, dan mana yang merupakan isian untuk dituangkan dalam perundang-undangan yang akan datang.

### C. KESIMPULAN

**Pertama:** Hasil musyawarah Komisi B membutuhkan penyempurnaan **NASKAH KERJA USULAN GBHN** sebagaimana terlampir dalam keputusan ini (**Lampiran Kesatu**).

**Kedua :** Hasil musyawarah Komisi B perlu menambahkan beberapa addendum memo Komisi B sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini yang perlu menjadi pertimbangan pemikiran guna dimanfaatkan (**Lampiran Kedua**).

### D. PENUTUP

- a. Demikian musyawarah Komisi B yang telah dilangsungkan, dengan susunan anggota Komisi dan Team Perumus sebagai terlampir (**Lampiran Ketiga**).
- b. Berdasarkan hasil maksimal yang telah dicapai, Komisi B perlu menyampaikan penghargaan kepada seluruh nara sumber, yang melengkapi kepustakaan dan perbendaharaan Komisi B.

Jakarta, 12 Agustus 1982.

Ketua,

ttd.

(Drg. INDIARTO)

A.n. KOMISI B  
Sekretaris,

ttd.

(NURHAINA BURHAN, SH.)

## RANCANGAN NASKAH USULAN MMPI 1982 UNTUK BAHAN GBHN 1983 – 1988

### I. PENDAHULUAN

1. TAP MPRS No. II/MPRS/1960 lampiran A, angka I, Bidang Mental/Agama, Kerohanian/Penelitian sub 16, adalah TAP MPRS-RI pertama yang secara khusus menentukan politik pengarah dan perlindungan bagi perfilman Indonesia. TAP MPRS No. II tahun 1960 itu jelas telah menjuruskan arah pembinaan Perfilman Indonesia menjadi bagian dari kebijakan pembinaan Pemerintah di bidang penerangan dan komunikasi massa. TAP MPRS tersebut juga telah mengantarkan Perfilman Indonesia pada jenjang kedudukan yang amat penting dalam perkembangan dan percaturan nasional.
2. TAP MPRS No. II/MPRS/1960 sebelum dicabut oleh TAP MPRS Nomor XXXVIII/MPRS/1968, telah melahirkan PENETAPAN PRESIDEN No. 1 tahun 1964, yang kemudian melalui Undang-undang No. 5 tahun 1969 ditetapkan menjadi Undang-undang No. I/Pnps/1964. Undang-undang No. I/Pnps/1964 menjadi satu-satunya induk dan dasar hukum berbagai kebijakan dan peraturan pemerintah Orde Baru di bidang perfilman nasional, meskipun belum sepenuhnya memenuhi aspirasi Orde Baru.
3. Pemerintah Orde Baru dengan TAP MPR No. IV/MPR/1978 yang dijabarkan dalam Repelita III telah menempatkan perfilman nasional menjadi bagian integral dari perjuangan dan pembangunan nasional Bangsa Indonesia. Konsekuensinya ialah bahwa Pemerintah Orde Baru telah meletakkan dan menentukan kebijakan pembinaannya pada asas kultural edukatif, sebagaimana telah dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No. 115/KEP/MENPEN/1979 tanggal 17 Juli 1979 tentang Dewan Film Nasional.
4. Dari masa ke masa dalam proses kultural edukatif Bangsa Indonesia, kebutuhan sarana komunikasi massa yang bersifat audio visual ternyata terus menerus meningkat sesuai dengan tuntutan kiprah pembangunan nasional. Namun dalam kenyataan hidup sehari-hari, sarana komunikasi audio visual itu di samping memberikan kemanfaatan yang positif, juga dapat menimbulkan berbagai dampak yang negatif.
5. Karena kemajuan ilmu dan teknologi, di samping film sebagai produk sinematografik, sekarang ini sudah terdapat berbagai bentuk lain dalam satu rumpun citra hidup (moving image), di antaranya televisi dan video. Oleh karena itu, maka dewasa ini

produk film Indonesia tidak lagi menjadi satu-satunya sarana komunikasi massa audio visual.

6. Film, televisi dan video, maupun bentuk-bentuk lain dari teknologi citra hidup yang dibuat dengan asas sinematografi, adalah potensi-potensi yang perlu ditangani secara terpadu.
7. Kehadiran serangkaian media komunikasi massa dari rumpun citra hidup di tengah masyarakat Indonesia, merupakan perkembangan mutakhir dalam kegiatan KOMUNIKASI SOSIAL, sehingga memerlukan ketentuan pengarah dan pembinaan yang berstrategi nasional untuk menghindarkan dampak negatif dan mempertinggi daya gunanya bagi bangsa Indonesia yang sedang membangun MANUSIA INDONESIA seutuhnya.
8. Berdasarkan hal-hal tersebut dalam butir-butir di atas, maka Undang-undang No. 1/Pnps/1964 tidak lagi mampu menampung permasalahan Perfilman di Indonesia dewasa ini.

Istilah **Perfilman Indonesia** tidak lagi memiliki pengertian yang sempit dalam ruang lingkup masalah Film saja, tetapi di dalam istilah itu sekaligus mencerminkan konotasi yang luas artinya untuk merangkum berbagai masalah sarana komunikasi massa audio visual yang kini lazim disebut CITRA HIDUP di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

## II. MOTIVASI USULAN

Di samping latar belakang seperti yang teruraikan dalam PENDAHULUAN, juga diperkuat dengan motivasi sebagai berikut :

### 1. Bidang Pendidikan

- a. Sebagai unsur teknologi komunikasi pendidikan, produk dari rumpun citra hidup sinematografi yang bersifat audio visual memiliki kemampuan menampilkan atau menyajikan INFORMASI yang **AUTENTIK** dalam membentuk imajinasi pelajar,

karena itu peranannya sebagai sarana pendidikan sangat tinggi daya gunanya untuk melengkapi dan menyempurnakan kemanfaatan media pendidikan literer dan lisan.

- b. Dalam rangka mencapai tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa terdapat juga jalur pendidikan non formal (pendidikan seumur hidup). Untuk itu diperlukan media komunikasi pendidikan yang sanggup menjangkau massa yang luas. Dalam hal ini, sifat audio visual dari teknologi citra hidup sangat berfaedah bagi massa yang belum mampu belajar dengan media literer (golongan masyarakat yang masih buta huruf).

### 2. Bidang Kebudayaan

- a. Film, video, televisi dan lain-lain produk dari rumpun citra hidup sebagai media komunikasi massa bukan saja mengandung aspek teknologi dan ilmu pengetahuan, tetapi juga mengandung aspek budaya yang sangat potensial dalam menyajikan informasi dan menampilkan atau mencerminkan ciri-ciri budaya bangsa. Di samping itu dapat pula memperluas cakrawala budaya, baik untuk kepentingan nasional maupun dalam komunikasi internasional.
- b. Sebagai unsur komunikasi sosial, film dan bentuk citra hidup lainnya yang menggunakan bahasa Indonesia penting artinya dalam rangka pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia.

### 3. Bidang Penerangan dan Komunikasi Sosial

Pemanfaatan media komunikasi massa yang bersifat audio visual, perlu ditingkatkan semaksimal mungkin, terutama untuk memberikan informasi yang berbentuk kongkrit bagi masyarakat yang tingkat kecerdasannya masih rendah. Berkomunikasi dengan menggunakan sarana audio visual memudahkan untuk mencapai tingkat penghayatan informasi yang optimal, karena khalayak tidak perlu meraka-reka

arti kalimat literer yang biasanya memerlukan pengetahuan tata bahasa tertulis.

#### 4. Bidang Ekonomi

Keberhasilan penggalakan ekspor di bidang perfilman, membuktikan film dan berbagai produk bentuk citra hidup Indonesia juga dapat dikembangkan menjadi komoditi ekspor non minyak bumi, yang memiliki prospek ekonomi dan perspektif kultural yang jauh jangkauannya.

#### 5. Bidang Politik Dalam Negeri

Produk dari rumpun citra hidup sebagai media komunikasi massa mampu mendukung program pembangunan di bidang politik dalam rangka pendidikan politik rakyat, sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 untuk meningkatkan Ketahanan Nasional.

#### 6. Bidang Politik Luar Negeri

Penggunaan berbagai produk dari rumpun citra hidup Indonesia di dunia internasional akan membantu menampilkan citra Indonesia yang baik sebagai bangsa yang merdeka, berdaulat, berharkat dan bermartabat, sekaligus juga mendukung diplomasi perjuangan bangsa Indonesia di luar negeri.

#### 7. Bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Penelitian

Sebagai sarana komunikasi dan ekspresi kebudayaan, berbagai produk dari rumpun citra hidup dalam pembuatannya tidak hanya memerlukan metoda kreatif yang bersifat informatif, artistik dan estetik, tetapi juga memerlukan dukungan sarana teknik dan pengetahuan yang luas, sehingga produk dari rumpun citra hidup Indonesia perlu ditingkatkan dan diselaraskan dengan perkembangan ilmu dan teknologi mutakhir.

#### 8. Bidang Pembinaan Generasi Muda

Produk dari rumpun citra hidup sebagai media ko-

munikasi massa yang bersifat kultural edukatif ikut berperan aktif dalam pengembangan dan pembinaan generasi muda agar menjadi kader bangsa yang mempunyai semangat patriotisme untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa demi kelestarian nilai-nilai budaya bangsa yang berdasarkan Pancasila.

### III. ISI USULAN TENTANG PERFILMAN UNTUK BAHAN G.B.H.N. 1983 – 1988

Sesuai dengan perkembangan sarana komunikasi massa audio visual yang pesat serta peranannya yang makin penting dan memiliki dampak sosial budaya yang amat luas dalam kehidupan bangsa Indonesia dari masa ke masa maka Majelis Musyawarah Perfilman Indonesia mengusulkan agar perfilman Indonesia mendapatkan landasan baru dalam GBHN sebagai berikut :

1. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERFILMAN NASIONAL SEBAGAI KOMPONEN KOMUNIKASI SOSIAL BERASAS KULTURAL EDUKATIF PERLU DITINGKATKAN SECARA SISTEMATIS DAN PRAGMATIS GUNA MENUNJANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN MASYARAKAT INDONESIA SEUTUHNYA YANG BERDASARKAN PANCASILA DAN UUD 1945.
2. UNTUK MENJAMIN PERKEMBANGAN PERFILMAN NASIONAL YANG BERSIFAT KULTURAL EDUKATIF DAN BERFUNGSI SEBAGAI BAGIAN TAK TERPISAHKAN DARI PERJUANGAN DAN PEMBANGUNAN BANGSA, DIPERLUKAN ADANYA UNNDANG—UNDANG PERFILMAN INDONESIA YANG BARU.

Jakarta, 12 Agustus 1982.

A.n. KOMISI B

K e t u a,

Sekretaris,

( Drg. INDIARTO ) ( NURHAINA BURHAN, SH. )

Lampiran kedua  
Hasil Keputusan Musyawarah  
Komisi B tentang

ADDENDUM/MEMO KOMISI B

Setelah mendengar hasil Team Perumus Komisi B, musyawarah Komisi B berpendapat perlu adanya catatan tambahan bahan pemikiran guna melengkapi berbagai aspirasi usulan yang dapat melengkapi hasil keputusan Komisi B.

1. Dalam Motivasi Usulan Dewan Film Nasional memang disadari bahwa kegiatan produktivitas perfilman di Indonesia telah mendorong kegiatan di sektor industri dan tenaga kerja sebagai bagian pertumbuhan ekonomi dalam mendukung pembangunan nasional.
2. Produk dari rumpun citra hidup sebagai media komunikasi massa, yang di dalamnya menyangkut seluruh aspirasi masyarakat dalam mewujudkan keadilan sosial, tidak dapat dipisahkan dari permasalahan hukum. Oleh karenanya, perfilman harus mampu meningkatkan pola kesadaran dan ketertiban hukum, baik dalam kalangan masyarakat maupun badan-badan hukum yang didasarkan pada landasan tertib hukum seperti yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945.

3. Sebagai implementasi arah pengembangan Koperasi di berbagai sektor perfilman, hendaknya pertumbuhan ekonomi perfilman dapat meningkatkan pembinaan kesejahteraan hidup dan pemerataan pendapatan insan-insan perfilman.
4. Dengan kenyataan kemajuan pengetahuan dan teknologi dalam dunia pendidikan, baik formal maupun non-formal, telah berkembang bentuk kegiatan belajar-mengajar yang cenderung ke arah penggunaan produk-produk audio-visual, antara lain **produk-produk videografik**. Karenanya dalam menanggapi perkembangan-perkembangan ini, yang mempunyai kelebihan dan kekurangannya, perlu adanya kemandapan lingkup perencanaan di berbagai sektor guna mencegah timbulnya efek-efek negatif. Hal ini pun berlaku bagi produk-produk videografik untuk hiburan.

Jakarta, 12 Agustus 1982.

A.n. KOMISI B

K e t u a,

Sekretaris,

( Drg. INDIARTO ) ( NURHAINA BURHAN, SH. )

Lampiran Ketiga

**Daftar Anggota Musyawarah  
KOMISI B**

No.	N a m a	Jabatan
1.	drg. Indiarto	Ketua/Anggota
2.	Nurhaina Burhan, SH.	Sekretaris/anggota
3.	Nani Widjaya	Pelapor merangkap anggota
4.	Gatot Kusumo	Anggota
5.	Abdul Azis, SH.	Anggota
6.	Yunarsih Kusdarmanto	Anggota
7.	Drs. H.M. Riza	Anggota
8.	Drs. Hamdan Zainusi	Anggota
9.	Drs. Poerwadi H.A.	Anggota
10.	I Gusti Ngurah Pindha, BA.	Anggota
11.	Dra. I Gusti Ayu Tista	Anggota
12.	F. Punduh	Anggota
13.	Drs. Usman Pasaribu	Anggota
14.	Syafri Ali Kadir, SH.	Anggota
15.	Drs. Syarkawi Machudum	Anggota
16.	L. Novaris Arifidiatmo	Anggota
17.	Drs. H.A. Zainal Abidin	Anggota
18.	Garin Nugroho R.	Anggota
19.	Anwar Habib	Anggota
20.	M. Alex Paath	Anggota
21.	Indrawadi Tamin	Anggota
22.	Bambang Soeharto	Anggota
23.	A.N. Ramachtan	Anggota
24.	Kusumo Hastuti, SH.	Anggota
25.	Arisuko Pakpahan, SH.	Anggota
26.	Drs. A. Latif Aziz	Anggota
27.	S u y a d i	Anggota
28.	Mastulen Hasanuddin	Anggota
29.	Drs. Sinansari Ecip	Anggota
30.	H. Mas'ud SA	Anggota
31.	R. Ramali	Anggota

No	N a m a	Jabatan
32.	Drs. Sutardja	Anggota
33.	Drs. Onong Uchjana Effendy, MA	Anggota
34.	Kusworo	Anggota
35.	Drs. Soegiyo Sapoetro	Anggota
36.	Fiam Mustamin	Anggota
37.	Nurlaila Ali Huaisy	Anggota
38.	Hartawi A.M., SH.	Anggota
39.	Soekojo Goenodosoemarto	Anggota
40.	Frits G. Schadt	Anggota
41.	M.D. Aliff	Anggota
42.	Adityawarman	Anggota
43.	Drs. Soehedi	Anggota
44.	Srie Atmarno, BA.	Anggota

**Team Perumus Komisi B**

No.	N a m a	Jabatan
1.	drg. Indiarto	Ketua/anggota
2.	Nurhaina Burhan, SH.	Sekretaris merangkap Anggota
3.	Yunarsih Kusdarmanto, MSc.	Anggota
4.	Dra. I Gusti Ayu Tista	Anggota
5.	Fritz G. Schadt	Anggota
6.	Bambang Soeharto	Anggota
7.	Hartawi A.M., SH.	Anggota
8.	Drs. Syarkawi Machudum	Anggota
9.	Drs. Sinansari Ecip	Anggota

**Team Pendamping**

1.	Arisuko Pakpahan, SH.	(Biro Hukum DEPPEN)
2.	S u y a d i	(Dit. Bina Film DEPPEN)
3.	Drs. A. Latif Aziz	(Badan Sensor Film)

**HASIL PERUMUSAN SIDANG  
KOMISI C – BIDANG PROGRAM  
MAJELIS MUSYAWARAH PERFILMAN INDONESIA 1982**

Sidang Komisi C Bidang Program dalam sidang-sidang setelah :

1. Mendengar Pemandangan Umum dari anggota Komisi mengenai masalah Perbioskopian dengan segala aspeknya.

**II. Memperhatikan Pidato-pidato Pengarahan :**

1. Bapak Wakil Presiden RI pada pembukaan Festival Film Indonesia 1982 tanggal 9 Agustus 1982.
2. Bapak Menteri Dalam Negeri pada pembukaan Sidang Majelis Musyawarah Perfilman Indonesia 1982 tanggal 10 Agustus 1982.
3. Bapak Menteri Muda Urusan Pemuda pada pembukaan Sidang Majelis Musyawarah Perfilman Indonesia 1982 tanggal 10 Agustus 1982.
4. Bapak Direktur Jenderal Radio-Televisi-Film pada pembukaan Sidang Majelis Musyawarah Perfilman Indonesia 1982 tanggal 10 Agustus 1982.
5. Bapak Sekretaris Jenderal Majelis Musyawarah Perfilman Indonesia pada pembukaan Sidang MMPI 1982 tanggal 10 Agustus 1982.
6. Bapak Ketua Dewan Harian Dewan Film Nasional pada Sidang Pleno IV tanggal 11 Agustus 1982.

**III. Mempertimbangkan:**

1. Usul-usul serta saran dan tanggapan para peserta sidang Komisi C Bidang Program MMPI 1982.

2. Mandat dari Ketua dan Sekretaris Komisi C kepada Sekjen MMPI.

**IV. MEMUTUSKAN: PERUMUSAN SIDANG KOMISI C BIDANG PROGRAM sebagai berikut :**

**A. PENDAHULUAN**

1. Bahwa perfilman nasional harus dipikirkan, direncanakan dan dibina secara terpadu, dengan kesadaran bahwa tidak ada satu sektor yang bisa berdiri sendiri dan tidak bisa dikatakan bahwa yang terpenting hanya sektor produksi saja, juga tidak bisa dikatakan bahwa yang terpenting sektor peredaran saja, tetapi ternyata bahwa yang satu hidup dari yang lain dan saling mengisi. Dalam pemikiran terpadu ini terdapat 4 (empat) sektor yang harus digarap : *pertama*, sektor produksi, *kedua*, sektor distribusi dan pemasaran, *ketiga*, sektor ekshibisi yaitu Bioskop, *keempat*, sektor penonton, di mana keempat sektor ini harus dibina sekaligus dan harus berkembang sebagai suatu syarat untuk memperoleh film Indonesia yang secara kuantitatif memadai, dan secara kualitatif menarik bagi masyarakat banyak, tidak saja di dalam negeri tetapi juga di luar negeri.

2. Bahwa Bioskop, merupakan mata rantai terakhir atau sebagai muara akhir dalam **penyajian** karya seni budaya perfilman kepada masyarakat dan oleh karenanya merupakan **sawah ladang** bagi kehidupan perfilman; sedangkan **film** sendiri tidak saja merupakan sarana penerangan, pendidikan dan hiburan. tetapi lebih dari itu, bahwa terutama sekali film merupakan bagian **integral dari Perjuangan dan Pembangunan Bangsa**.
3. Bahwa Bioskop merupakan sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah setempat, sehingga keberhasilan usaha perbioskopian juga akan meningkatkan pendapatan Pemerintah Daerah setempat.
4. Berdasarkan mandat yang diberikan oleh Ketua dan Sekretaris Komisi C Bidang Program kepada Sekretaris Jenderal MMPI tertanggal 13 Agustus 1982, maka Sekjen MMPI berusaha mengadakan penyempurnaan atas hasil Keputusan Komisi C sesuai dengan pokok pembahasan Komisi C Bidang Program berikut ini :

#### B. PERMASALAHAN :

Bioskop, sebagai terminal terakhir dari film, selalu dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan :

1. Tidak terdapat perimbangan yang memadai antara beban biaya rutin eksploitasi pengelolaan gedung bioskop dengan pembagian jasa yang diperoleh pengusaha bioskop dari penjualan Harga Tanda Masuk (HTM).
2. Sistem penyaluran film dari pemilik film ke gedung bioskop dirasakan masih mengalami perjalanan yang cukup panjang.
3. Peredaran film di daerah dirasakan belum lancar karena terdapat persaingan yang tidak

sehat di antara pengedar-pengedar film dengan pihak bioskop.

#### C. PEMBAHASAN

1. Permasalahan yang timbul dan menjadi beban dalam pengelolaan gedung bioskop adalah :
  - 1.1. Adanya Pembagian Harga Tanda Masuk (HTM) dengan perincian :
    - 1/3 bagian dari HTM untuk pemilik film
    - 1/3 bagian dari HTM untuk pajak tononan
    - 1/3 bagian dari HTM untuk jasa bioskop **tanpa** melihat kondisi dan lokasi gedung bioskop. Hal ini memberatkan pengusaha gedung bioskop dalam mengelola kehidupan bioskop secara sempurna.
  - 1.2. Adanya jenis-jenis pungutan dan dana yang dibebankan melalui Harga Tanda Masuk Bioskop yang menyebabkan HTM bioskop menjadi mahal. Akibatnya, masyarakat yang terbatas kemampuan ekonominya tidak dapat menikmati hiburan film melalui bioskop.
  - 1.3. Di beberapa daerah masih terdapat pembagian share film yang tidak berimbang antara share untuk bioskop dengan share untuk Darfida/pemilik film, di mana pengusaha bioskop hanya memperoleh 12% dari Harga Tanda Masuk.
2. Dalam hal penyaluran film dari pemilik film kepada bioskop perlu diadakan penyederhanaan sistem melalui :
  - 2.1. Pelaksanaan dari Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (Menteri Penerangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri P & K) tahun 1975, di mana bioskop supaya melaksana-



kan wajib putar dan produser/Kuasa Pemilik Film melaksanakan wajib edar film melalui PT. PERFIN, sehingga bioskop tidak mengalami keterlambatan menerima supply film.

2.2. Penertiban Darfipus agar sistem distribusi film nasional ke daerah-daerah lebih lancar sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri.

3. Menurut kenyataan yang dijumpai di beberapa daerah terdapat persaingan yang tidak sehat antara pengedar film dengan pihak bioskop. Hal ini diakibatkan oleh :

3.1. Bioskop tertentu sudah terikat kerjasama dagang dengan group DARFIDA tertentu; Adanya keterlibatan langsung Pengusaha Bioskop dalam niaga pengadaan film.

4. Guna menjamin pemerataan bagi khalayak untuk menikmati hiburan melalui film dan menjamin kelancaran peredaran film impor, maka di dalam suatu wilayah edar hanya dibenarkan mendapat supply (jatah) **tidak lebih** dari 2 (dua) copy film impor, terkecuali di DKI Jakarta dijatahkan sebanyak 3 (tiga) copy film impor.

## KESIMPULAN

1. Mekanisme peredaran film Indonesia yang dilakukan oleh PT. PERFIN maupun mekanisme peredaran film impor yang dilaksanakan oleh DARFIDA Perwakilan Asosiasi Impor Film di daerah-daerah perlu disempurnakan.
2. Untuk kelancaran peredaran film Indonesia, kepada produser diminta supaya mentaati ketentuan Pasal 2 Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (Menteri

Penerangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri P & K) tahun 1975 tentang wajib edar, sedangkan share film Indonesia harus secara konsekuen dilaksanakan menurut Pasal 7 Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri tahun 1975.

3. Mengenai share film, Komisi C berpendapat agar disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan share film secara borongan (flat system) dapat dimungkinkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha bioskop dan pemilik film melalui PT. PERFIN atau Perwakilan/DARFIDA, Asosiasi Film Impor. Tetapi apabila tidak dapat dicapai kesepakatan harus kembali pada ketentuan yang telah ditetapkan.

## SARAN DAN USUL

1. Antar anggota GPBSI supaya membentuk koperasi guna menunjang perkembangan film Indonesia. Hal ini berarti GPBSI turut serta menunjang perkembangan perbioskopian di pedesaan dalam lingkup pembangunan Nasional.
2. Sekretaris Daerah MMPI di daerahnya masing-masing mengadakan pendekatan dengan Kepala Daerah untuk meninjau kembali sistim pembagian share film berdasarkan klasifikasi bioskop dan tingkatan daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan setinggi-tingginya 30% dari jasa untuk film impor dan 20% untuk film Indonesia. Sedangkan Sekjen MMPI supaya memperjuangkan di tingkat nasional melalui Dewan Film Nasional.
3. Melarang Video kaset dipertunjukkan di tempat-tempat umum seperti stasiun-stasiun bus dan atau tempat-tempat lain dengan atau tanpa memungut bayaran, terkecuali atas rekomendasi dan kerjasama dengan GPBSI.

4. Film Indonesia maupun film impor yang sudah melampaui jangka waktu lima tahun dapat diberikan izin untuk divideo-kasetkan secara komersial di Indonesia. Hal ini perlu untuk menghindari persaingan yang tidak sehat terhadap bioskop yang sudah merupakan suatu bagian integral dari pembangunan.
5. Hak mem-video-kasetkan film Indonesia diharapkan hanya dapat diberikan kepada PT PERFIN sesuai dengan Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, di mana hak peredaran film Indonesia hanya ada pada PT PERFIN.
6. Untuk membangkitkan kembali "movie going habit" (minat untuk menonton) hendaknya para importir film memasukkan film-film bermutu sesuai dengan kuota impor film yang ditetapkan oleh Pemerintah. Sedangkan bagi produser film nasional supaya mem-

produksi film-film yang bersifat kultural—edukatif.

7. Dalam rangka perluasan pemasaran film Indonesia dan pemerataan hak memperoleh hiburan bagi masyarakat di pedesaan, kiranya Dewan Film Nasional memperjuangkan kepada Gubernur Bank Sentral untuk dapat membuka **Kredit Investasi**, jangka panjang bagi usaha perbioskopian.

Jakarta, 13 Agustus 1982.

A.n. KOMISI C BIDANG PROGRAM  
MAJELIS MUSYAWARAH PERFILMAN INDONESIA 1982  
ttd.

MUHAMMAD JOHAN TJASMADI  
Sekretaris Jenderal

**DAFTAR ANGGOTA MUSYAWARAH SIDANG KOMISI C  
MENGENAI  
"MASALAH PERBIOSKOPAN DENGAN SEGALA ASPEKNYA"**

No.	Nama	Utusan	Jabatan	No.	Nama	Utusan	Jabatan
1.	H.M. Ahadin	Jakarta	Ketua	20.	S. Harsono	DPD GPBSI	Anggota
2.	Adnan Siregar	Sumatera Utara	Wakil Ketua			Jawa Tengah	
3.	S. Darman	Jawa Timur	Sekretaris	21.	Bambang Soelistyo	Jawa Tengah	Anggota
4.	Kicky Palilingan	AMPI	Juru bicara/ Pelapor	22.	Zaiful Amri Ali	Sumatera Selatan	Anggota
5.	Tomy Pangalila	Sulawesi Utara	Anggota	23.	Roilan Tjik Asan, SH.	Sumatera Selatan	Anggota
6.	A Gusti Rahim	Peninjau dari IKJ	Anggota	24.	Ishananto	GPBSI	Anggota
7.	Drs. F.X. Eddy Iswanto	Jawa Timur	Anggota	25.	T.M. Eddy Usmaidy	GPBSI	Anggota
8.	Pangestoe BW.	Jawa Timur	Anggota	26.	S u n a r s o	Kalimantan Timur	Anggota
9.	Djoefri Palureng	Jawa Timur	Anggota	27.	Sjafrial Arifin	Wartawan/ Peninjau	Anggota
10.	Moedjimoen	Jawa Timur	Anggota	28.	M. Malik U.K.	Sumatera Selatan	Anggota
11.	Topo Subroto	D.I.Yogyakarta	Anggota	29.	Hidayat R. Wirasoe- padma	Jawa Barat	Anggota
12.	Pong Hardjatmo	PARFI	Anggota	30.	Mudjiarto	Jawa Barat	Anggota
13.	Agust Melasz	PARFI	Anggota	31.	Maman R. Ratman	Jawa Barat	Anggota
14.	Singgih Uthomo	DHN Angkatan '45	Anggota	32.	Eric Roesnadi	Sulawesi Tenggara	Anggota
15.	Eddy Sukirman	DPP KNPI	Anggota	33.	Boy Crain	DPP AMPI	Anggota
16.	Welly C. Waleleng	Sulawesi Tengah	Anggota	34.	Anton Lesiangi, SE	DPP AMPI	Anggota
17.	Djohan Panggabean	Sumatera Utara	Anggota				
18.	Nasir Noer	Sumatera Barat	Anggota				
19.	Marius Nizart	AIFM-DKI	Anggota				

35. Adi Kusuma	GPBSI Bali	Anggota	40. M. Yusran	Kalimantan Selatan	Anggota
36. Soeharto	Bali	Anggota	41. Eva Rosdiana Dewi	Jawa Timur	Anggota
37. Moedjimoen	PT. Perfin Pusat	Anggota	42. Kol. dr. Soeharko	Bakolak/ Kasran	Anggota
38. Eka Budiarta	Majalah Tempo	Anggota			
39. Tb. Maulana Husni	KFT	Anggota			

**SURAT KEPUTUSAN  
MAJELIS MUSYAWARAH PERFILMAN INDONESIA  
NOMOR 003/MMPI/VIII/1982**

tentang

**PENGUKUHAN PROF. DRS. H. AMURA  
SEBAGAI WAKIL SEKRETARIS JENDERAL  
MAJELIS MUSYAWARAH PERFILMAN INDONESIA**

**KETUA SIDANG MAJELIS MUSYAWARAH  
PERFILMAN INDONESIA TAHUN 1982**

- Menimbang :**
- a. bahwa Ny. MALIDAR HADIYOWONO, Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Musyawarah Perfilman Indonesia periode tahun 1981 – 1984 telah berpulang ke rahmatullah;
  - b. bahwa jabatan untuk periode tersebut harus diisi oleh seseorang yang dianggap cakap dan memenuhi persyaratan sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Musyawarah Perfilman Indonesia.

- Mengingat :**
1. Pasal V ayat b Pedoman Dasar Majelis Musyawarah Perfilman Indonesia;
  2. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Majelis Musyawarah Perfilman Indonesia Nomor 001/MMPI/VIII/1982;
  3. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Majelis Musyawarah Perfilman Indonesia Nomor 002/MMPI/1982.

**Memperhatikan :**

1. Saran dan pendapat anggota sidang dalam forum Sidang Pleno II Majelis Musyawarah Perfilman Indonesia 1982;

2. Keputusan aklamasi anggota sidang menerima Prof. Drs. H. Amura sebagai pengisi lowongan tersebut.

**M E M U T U S K A N :**

- Pertama :** Melaksanakan segala tugas-tugas yang menjadi beban pekerjaan Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Musyawarah Perfilman Indonesia bersama-sama Sekretaris Jenderal Majelis Musyawarah Perfilman Indonesia periode 1981–1984.

**Menetapkan :** SURAT KEPUTUSAN MAJELIS MUSYAWARAH PERFILMAN INDONESIA TENTANG PENGUKUHAN PROF. DRS. H. AMURA SEBAGAI WAKIL SEKRETARIS JENDERAL MAJELIS MUSYAWARAH PERFILMAN INDONESIA, sebagai berikut :

- Kedua :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan Sidang Majelis Musyawarah Perfilman Indonesia tahun 1984, dengan

ketentuan akan diubah dan diperbaiki  
bilamana ternyata diperlukan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 13 Agustus 1982.

**KETUA SIDANG MAJELIS MUSYAWARAH  
PERFILMAN INDONESIA TAHUN 1982**

ttd

**S O E L I S T I A D I**

**Tembusan:** disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Penerangan RI selaku Ketua Dewan Film Nasional.
2. Dewan Harian Dewan Film Nasional.
3. Direktur Jenderal Radio—Televisi—Film, Deppen.
4. Direktur Jenderal Penerangan Umum, Deppert.
5. Direktur Pembinaan Film, Deppen.
6. Direktur Penerangan Daerah, Deppen.
7. Para Kepala Kanwil Deppen di seluruh Indonesia.
8. Para Bapfida di seluruh Indonesia.
9. Koordinator Daerah MMPI di seluruh Indonesia.
10. Para Pimpinan Organisasi Perfilman.
11. Segenap anggota persidangan MMPI 1982.
12. Kepada yang bersangkutan.
13. A r s i p .

**LAPORAN SEKRETARIS JENDERAL MMPI  
KEPADA MENTERI PENERANGAN RI  
PADA UPACARA PENUTUPAN SIDANG MMPI 1982**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadirat Allah subhanahuwa ta'alla karena hanya dengan taufiq hidayah, berkat rahmat dan ridho-Nya pada hari ini kita kembali berkumpul di Gedung Dewan Pers dengan penuh keakraban setelah empat hari penuh bergumul dalam persidangan-persidangan yang diikuti 116 peserta dan 131 peninjau, terdiri dari unsur-unsur perfilman dan lembaga masyarakat, perguruan tinggi dan generasi muda. Sidang-sidang tersebut sangat melelahkan, terutama karena melalui perdebatan dan bersitegang leher untuk membicarakan/membahas permasalahan-permasalahan yang ada.

Perdebatan-perdebatan dan pertentangan pendapat, semua telah dilampaui dengan penuh pengertian dan kesadaran akan itikad baik tanpa mengurangi hak peserta yang lain maupun adanya dominasi delegasi yang satu terhadap yang lain. Ini semua dapat terjadi karena para delegasi/peserta telah meresapi dan meyakini serta telah mengamalkan P.4, di mana mereka selalu mendasarkan diri bahwa kita semua bermusyawarah untuk mufakat dengan cara-cara khas Indonesia. Semua keputusan diambil dengan semangat kekeluargaan demi mencapai tujuan dan kepentingan bersama.

Bapak Menteri Penerangan dan hadirin yang terhormat,

Pada upacara pembukaan Festival Film Indonesia, tanggal 9 Agustus 1982 di Balai Sidang Senayan, Bapak Adam Malik, Wakil Presiden RI berkata :

"Film sebagai salah satu anak kandung teknologi modern dan salah satu alat komunikasi massa yang ampuh, dalam dasawarsa delapan puluhan ini akan mempunyai nilai-nilai yang berbeda dari masa sebelumnya. Oleh karena itu sudah sepatutnya bila kita semua, khususnya insan film Indonesia, segera menyesuaikan diri dengan perkembangan nilai tersebut tanpa meninggalkan ciri-ciri kepribadian nasional. Usaha penyesuaian diri tersebut hendaknya dimulai secara mendasar, yaitu dengan mengembangkan fungsi film Indonesia lebih luas lagi, yakni untuk menjadikan perfilman nasional sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional. Oleh karena itu pembinaan serta pengembangannya harus disesuaikan dengan arah, strategi dan tujuan pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan film Indonesia yang kultural edukatif, sehingga dapat memenuhi fungsi sebagai alat hiburan, penerangan dan pendidikan dalam rangka pembangunan nasional".

Oleh karena itu berbeda dari tahun-tahun yang silam, acara Sidang MMPI tahun 1982 ini menitikberatkan pembahasan "Term Of Reference" (TOR) yang intinya adalah dalam rangka usaha meningkatkan

isi TAP No. II/MPRS/1960 lampiran A, angka 1, Bidang Mental/Agama/Kerohanian/Penelitian.

Insan perfilman menganggap perlu dan sudah tiba masanya untuk meningkatkan fungsi film. Seperti kata Bapak Asrul Sani, Ketua Dewan Harian Dewan Film Nasional dalam pidato pengantar penyampaian Term Of Reference pada sidang pleno IV MMPI 1982 yang antara lain menyatakan :

"Akan kita apakah film kita ini? Kalau sudah ada kamera, kalau sudah ada celluloid, ada dana, ada bioskop, ada film dan sebagainya, akan kita apakah film kita ini?"

Dan jawab kita semua di sini adalah : "Akan kita bina semuanya menjadi bagian integral dari pembangunan dan perjuangan rakyat Indonesia".

Jadi insan perfilman menyadari bahwa film bukan sekedar "barang dagangan semata-mata" bahkan film adalah bagian integral dari perjuangan dan usaha pembangunan bangsa seutuhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Bapak Menteri yang terhormat, Saudara-saudara sekalian,

Seperti kami sebutkan di atas, sebelum sidang dimulai telah diterima melalui Ketua Dewan Harian Dewan Film Nasional, Naskah Usulan Dewan Film Nasional tentang Perfilman Indonesia, untuk bahan GBHN 1983 agar dibahas di dalam persidangan MMPI 1982 ini. Naskah tersebut kemudian telah dibahas secara khusus di dalam Komisi B dengan hasil aklamasi disetujui, dengan perbaikan-perbaikan di mana isi usulan tentang perfilman untuk bahan GBHN 1983-1988 antara lain sebagai berikut :

1. Pembinaan dan pengembangan perfilman nasional sebagai komponen sistem komunikasi sosial berbasas kultur edukatif perlu ditingkatkan secara sistematis dan pragmatis guna menunjang pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berdasarkan Pancasila

dan UUD 1945.

2. Untuk menjamin perkembangan perfilman nasional yang bersifat kultural edukatif dan berfungsi sebagai bagian tak terpisahkan dari perjuangan dan pembangunan bangsa, diperlukan adanya Undang-undang Perfilman Indonesia yang baru.

Sejalan dengan pengarahan dari Bapak Menteri Muda Urusan Pemuda yang menekankan adanya hubungan antara film di satu fihak dan pengembangan generasi muda di fihak lain, di mana keduanya harus berjalan secara serasi dan topang-menopang maka para peserta sidang sependapat bahwa dalam memberikan motivasi terhadap usulan tentang perfilman untuk bahan GBHN, perlu ditambahkan motivasi bidang pembinaan generasi muda. Di samping itu para peserta berpendapat bahwa motivasi lainnya yang tidak kalah pentingnya ialah bidang politik dalam dan luar negeri.

Dalam pada itu Komisi A telah berhasil pula menyempurnakan Pedoman Dasar MMPI dan Komisi C menyampaikan masalah-masalah perbioskopian dengan segala macam hambatannya yang masih dimohonkan perhatian kepada Bapak, yang bersama ini kami lampirkan.

Sidang telah pula mengukuhkan dengan persetujuan yang bersangkutan bahwa Festival Film Indonesia dan Sidang MMPI tahun 1983 akan diselenggarakan di kota Medan dan tahun berikutnya, yaitu tahun 1984, Yogyakarta telah menyatakan pula kesediaan untuk menyelenggarakannya.

Sekian laporan kami dan atas perhatian Bapak, tak lupa kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

MAJELIS MUSYAWARAH PERFILMAN INDONESIA  
Sekretaris Jenderal,

ttd.

MUHAMMAD JOHAN TJASMADI





*Sekjen MMPI H. Johan Tjasmadi menyampaikan hasil-hasil Sidang MMPI 1982 kepada Menteri Penerangan Ali Moertopo, selaku Ketua Dewan Film Nasional.*

*Menteri Penerangan Ali Moertopo secara resmi menutup Sidang MMPI 1982 dengan memukul gong.*







DITERBITKAN OLEH:

DIREKTORAT PUBLIKASI  
DIREKTORAT JENDERAL PPG.  
DEPARTEMEN PENERANGAN RI  
NPD.: 79/06/07/83

PENCETAK: PERCETAKAN NEGARA RI